KEHATI

90 Tahun

PROF. EMIL SALIM

Pembangunan Berkelanjutan:

Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045

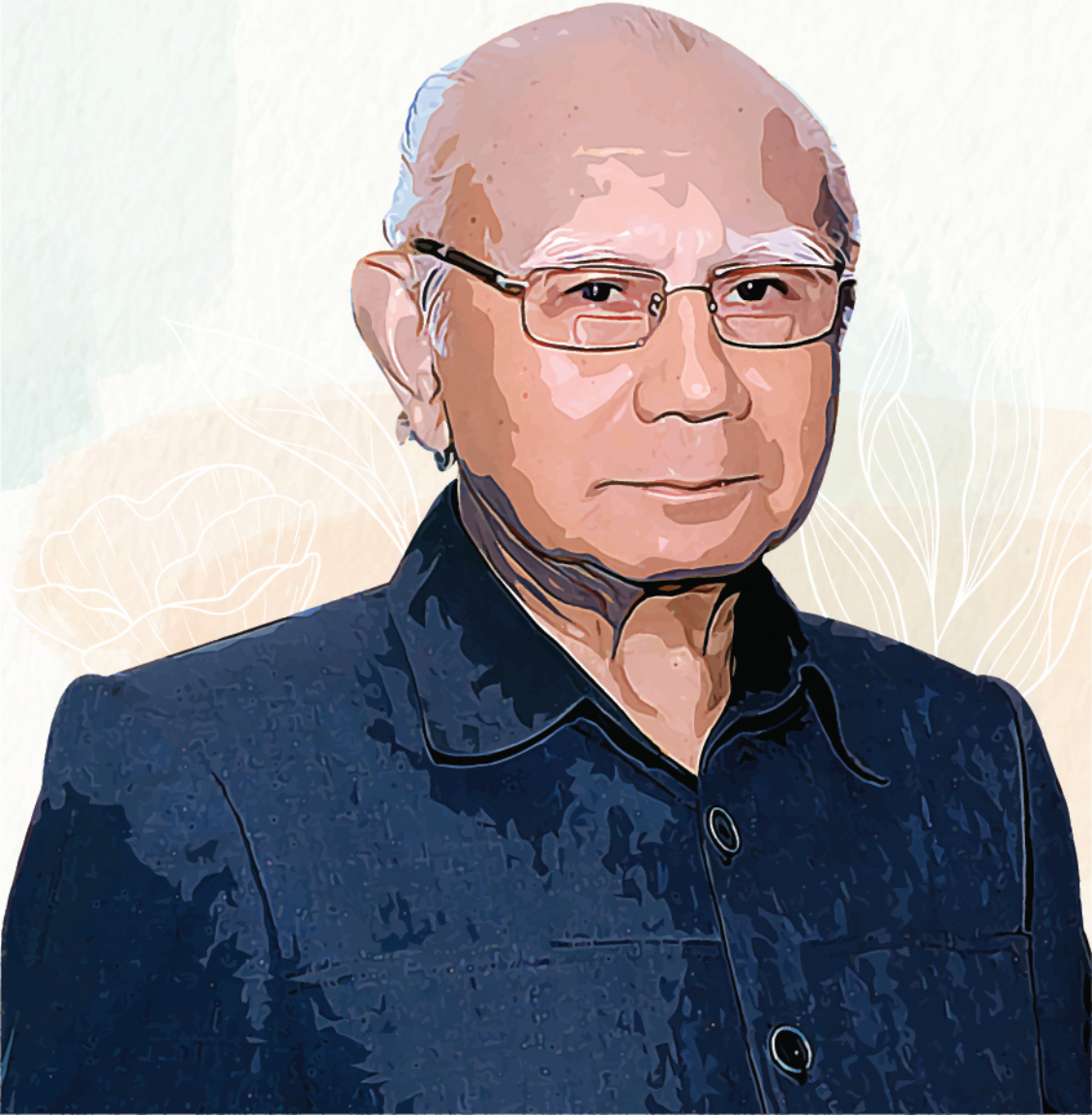

90 Tahun

PROF. EMIL SALIM

Pembangunan Berkelanjutan:

Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045

KEHATI

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
(Yayasan KEHATI)

Ismid Hadad, MPA. | Prof. Emil Salim | Faisal Basri, S.E., M.A. |
Prof. Arif Satria | Amanda Katili Niode, Ph.D. |
Ir. Sarwono Kusumaatmadja | Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc. |
Prof. Hariadi Kartodihardjo | Dr. Rony Megawanto | Samedi, Ph.D. |
Irfan Bakhtiar | Metia Lembasi | Najelaa Shihab |
Drs. Mas Achmad Daniri, M.Ec. | Riki Frindos

90 Tahun Prof. Emil Salim
Pembangunan Berkelanjutan:
Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045

Penerbit Yayasan KEHATI

Editor:
Vidya Nalang
Rika Anggraini
Samedi
Irfan Bakhtiar
Puspa D. Liman
Muhammad Syarifullah
Ahmad Baihaqi

Ilustrasi & Design sampul:
Rika Anggraini
Nur Leili Irma Baynah

Layout isi:
Nur Leili Irma Baynah

Diterbitkan pertama kali oleh
Yayasan KEHATI

www.kehati.or.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-7041-03-0

Daftar Isi

Kata Pengantar **7**

Ismid Hadad, MPA. **13**
Dari Sumber Daya Alam ke Generasi Emas : Menuju Indonesia Tinggal Landas

Pengantar Webinar **35**

Prof. Emil Salim **39**
Bangun Bangsa Adil Makmur 2045

Faisal Basri, S.E., M.A. **53**
Tanggapan Atas Orasi 90 Tahun Prof. Emil Salim

Prof. Arif Satria **65**
Tanggapan Atas Orasi 90 Tahun Prof. Emil Salim

Amanda Katili Niode, Ph.D. **77**
Tanggapan Atas Orasi 90 Tahun Prof. Emil Salim

Rumusan Diskusi **87**

Tulisan Para Tokoh

Prof. Emil Salim: Keteladanan Abadi **105**
Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Pengelolaan Lingkungan Hidup **115**
Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc.

Pembangunan Berkelanjutan dalam Lingkaran Korupsi Sumberdaya Alam **133**
Prof. Hariadi Kartodihardjo

Pembangunan Perikanan Berkelanjutan **149**
Dr. Rony Megawanto

Keanekaragaman Hayati Hutan: Mengapa Perlu Perlindungan? **163**
Samedi, Ph.D.

Sertifikasi Berkelanjutan (Sustainable Certification): Sebuah Upaya Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Usaha Berbasis Lahan **177**
Irfan Bakhtiar dan Metia Lembasi

Pemerataan dan Keberlanjutan, Jauh dari Kenyataan **191**
Najelaa Shihab

Governansi Korporat dan Konsep Keberlanjutan **205**
Drs. Mas Achmad Daniri, M.Ec.

Ketika Kapitalis Mengulurkan Tangan **217**
Riki Frindos

Kata Pengantar

Tahun ini, tepatnya tanggal 8 Juni 2020, Bapak Prof. Emil Salim genap berusia 90 tahun, sebuah momen yang sangat istimewa. Angka 90 tahun ini tidak sekedar menggambarkan sebuah usia, tetapi juga merefleksikan perjalanan panjang Pak Emil dalam menginspirasi bangsa Indonesia.

Bagi kami, Yayasan KEHATI, Pak Emil adalah seseorang yang sangat istimewa. Beliaulah yang melahirkan KEHATI 26 tahun yang lalu, kemudian membesarkan dan senantiasa mengayomi hingga hari ini. Oleh karena itu, kami sangat bergembira memiliki kesempatan untuk ikut merayakan ulang tahun Beliau yang ke 90 dalam sebuah webinar. Buku ini adalah catatan dari orasi Beliau pada webinar tersebut, dan juga dilengkapi dengan goresan dari berbagai tokoh atau pun anak bangsa yang terinspirasi dari ilmu dan ketokohan Pak Emil.

Sulit mendefinisikan Pak Emil. Beliau bagi banyak kalangan dikenal sebagai Bapak Lingkungan Hidup Indonesia. Sebab, memang tidak ada tokoh di negeri ini yang berkontribusi sedemikian besarnya bagi lingkungan hidup di Indonesia. Beliau tidak hentinya mengumandangkan bahwa, adalah sebuah keniscayaan menjaga alam dan lingkungan hidup

kita dan memanfaatkannya secara cerdas, secara adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, mimpi menjadi sebuah bangsa yang maju dan sejahtera bagi semua, akan mustahil digapai.

Pak Emil juga dikenal sebagai Begawan Ekonomi Indonesia, seorang akademisi, intelektual dan pemikir strategis di bidang ekonomi. Beliau memang seorang Guru Besar di bidang ekonomi, yang tidak saja menyumbangkan pemikirannya pada keilmuan ekonomi, tetapi juga telah mendidik dan melahirkan sedemikian banyak ekonom-ekonom bangsa. Beliau juga satu dari beberapa tokoh yang meletakkan fondasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ketika Orde Lama berakhir.

Oleh karena itu, tidak heran juga Pak Emil dikenal sebagai seorang teknokrat, cendekiawan birokrat yang langsung terjun mengawal pembangunan ekonomi Indonesia. Beliau menjabat sebagai menteri pada berbagai bidang selama lebih dari dua dekade hinga era 90-an. Tapi Beliau tidak berhenti di situ. Pak Emil masih terus mengabdi pada kepemimpinan beberapa presiden berikutnya hingga tahun 2014, ketika Beliau menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden pada era kepresidenan SBY.

Konsep ekonomi yang berwawasan lingkungan sangat identik

dengan Pak Emil. Namun, Beliau juga selalu menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek sosial: pembangunan yang inklusif *where there is no one left behind*. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci yang dikedepankan Pak Emil. Tidak heran, isu pendidikan selalu menyita pemikiran Beliau. "Otak, Bung!" demikian Beliau sering mengingatkan. Beliau juga sangat gundah dengan kesenjangan teknologi yang menimbulkan ketidaksetaraan pada akses pendidikan, seperti yang terjadi di era pandemi Covid ini.

Namun, tak disangkal Pak Emil juga adalah seorang tokoh politik. Beliau memang bukan tipikal politikus aktivis partai seperti dikenal banyak masyarakat awam. Tapi Beliau melakukannya dengan bersuara dan mendorong perbaikan-perbaikan dalam sistem dan proses politik bangsa. Beliau juga tidak segan-segan untuk terjun langsung dalam pergulatan politik, jika diperlukan. Pada era 90-an, misalnya, Pak Emil dengan dukungan berbagai tokoh dan intelektual bangsa maju mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden. Sebuah manuver yang tidak terbayangkan dalam sebuah sistem politik Orde Baru saat itu.

Dalam perjalanan panjang hidup Beliau, Pak Emil telah menginspirasi banyak anak bangsa, tidak hanya dengan ilmu,

karya, dan tauladannya, tetapi juga dengan api semangat yang senantiasa Beliau kobarkan ketika Beliau berbicara. Beliau adalah seorang intelektual dengan kemampuan orasi yang luar biasa. Tak heran ketokohan Pak Emil menggema jauh hingga di ranah global.

Barangkali, tidak perlu diperdebatkan apakah Pak Emil lebih tepat dikenang sebagai Bapak Lingkungan Hidup atau Begawan Ekonomi Indonesia, misalnya. Tapi yang jelas Beliau selalu menginspirasi Indonesia dari masa ke masa, senantiasa mengobarkan api semangat bagi kita semua, menuju Indonesia yang lebih baik hingga tinggal landas menjadi maju dan sejahtera, bagi semua. Beliau adalah Guru Bangsa.

Selamat ulang tahun yang ke 90, Pak Emil. Semoga panjang umur, sehat, dan selalu dilimpahi keberkahan. Tetaplah menginspirasi dan membakar api semangat kami!

Riki Frindos
Direktur Eksekutif
Yayasan KEHATI

Dari Sumber Daya Alam ke Generasi Emas : Menuju Indonesia Tinggal Landas

Ismid Hadad, MPA.

Ketua Dewan Pembina

Yayasan KEHATI

Buku yang ada ditangan pembaca ini disusun dan diterbitkan untuk memperingati kiprah, jasa dan kontribusi seorang Emil Salim yang sungguh amat berharga bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang peduli pada solusi masalah bangsa di masa depan.

Kisah dan jejak perjalanan hidupnya selama 90 tahun penuh dengan berbagai warna-warni tantangan kerja, pengabdian dan perjuangan mencari solusi tanpa henti, seperti tak akan ada batas akhirnya. Maka itu Emil Salim merupakan sosok figur yang optimistik, unik, ulet dan selalu menarik perhatian publik. Karena ia selalu "bertemu" dengan tantangan masalah berskala besar dan terus "berjuang" untuk mencoba mencari akar masalah yang besar dan kompleks itu mulai dari akar-rumput ke tingkat nasional sampai ke global. Maka itu baik pemikiran, pengalaman, reputasi maupun jasa dan kontribusinya bersifat "multi-dimensi". Mencakup begitu banyak bidang, dimensi dan aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kiprah kegiatan, jabatan, kinerja apalagi reputasinya tidak terbatas hanya pada satu bidang keahlian, profesi atau disiplin ilmu tertentu saja. Meskipun ia sering disebut dengan identitas sebagai seorang ekonom, teknokrat, pejabat, atau ahli lingkungan, atau pakar pembangunan dan entah apalagi, tapi saya sendiri cenderung melihat dan menyebut Beliau

sebagai cendekiawan dan guru bangsa yang berhati nurani dan berwawasan luas dengan visi jauh ke masa depan.

Lima Dimensi Peran Emil Salim

Selain ciri dan identitas itu, tentu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, perjalanan karier, jabatan dan pengalaman hidupnya selama 90 tahun membuat figur Emil Salim menjadi seorang yang memang "berbeda" dengan kebanyakan tokoh penting yang ada dinegeri ini. Perbedaan itu terjadi dan terlihat pada berbagai dimensi peran, capaian dan nilai citranya yang positif, dan bertahan cukup panjang dan lama di mata publik. Sebagai seorang yang mengenal dan mengikuti jejak Pak Emil dari dekat selama lebih dari setengah abad, dengan menggunakan kacamata seperti itu saya coba meneropong sosok dan menelusuri jejak langkah Emil Salim dalam lima dimensi perannya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pertama, dari dimensi latar belakang pendidikan dan profesi pertamanya sebagai seorang Ekonom, teknokrat/ ahli ekonomi, yang kemudian menjadi Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Dimensi ke dua, dari segi karier dan reputasinya sebagai Pejabat Tinggi negara, terutama

23 tahun pengalamannya menjalankan peran jabatan Menteri dalam lima Kabinet Pembangunan di era Presiden Soeharto, dan juga 15 tahun sebagai ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Pertimbangan Presiden pada 3 periode pemerintahan 3 Presiden yang berbeda, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimensi ke tiga, adalah ketika Pak Emil menjadi sangat terkenal sebagai "pakar lingkungan", karena merupakan orang pertama dan paling lama (15 tahun) di Indonesia yang merintis, menjabat dan bertugas sebagai Menteri Negara yang mengurusi bidang Lingkungan Hidup (1978-1993) dengan kinerja dan popularitas yang sangat tinggi di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, kita masih bisa melihat kiprah Pak Emil lainnya yang tak kalah penting, yaitu dimensi ke empat, dimana ia berperan sebagai pemimpin yang memayungi masyarakat madani (*civil society*), baik ketika masih menjabat sebagai Menteri maupun sesudah keluar dari jabatan di Pemerintahan. Ia menjadi figur pelindung, pembuka jalan, penyedia ruang gerak dan partisipasi bagi publik, khususnya organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) dan lembaga-lembaha swadaya masyarakat (LSM) dalam gerakan sosial-lingkungan untuk

pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Dan dimensi ke lima yang sangat menarik, adalah peran dan kontribusi Emil Salim sebagai tokoh dunia yang punya visi ke depan dan memerankan *intellectual leadership* bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi sebagai figur yang selama lebih dari 30 tahun diakui dan dipercaya oleh lembaga-lembaga, forum dan masyarakat internasional untuk memimpin dan memberi arahan kebijakan global mengenai masalah lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Tiga Tantangan Pembangunan Abad ke-20

Beragam dimensi peran Pak Emil dalam berbagai arena pengabdian pada era zaman yang berbeda-beda melalui kurun waktu begitu panjang, telah membuatnya banyak belajar menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, mendalami sistem tata kelola kebijakan berbagai pemerintahan, serta mencari tahu bagaimana cara memahami hakikat dan pokok permasalahan yang mendasari tantangan yang dihadapi bangsa dan negara. Pembelajaran yang diperoleh dari akumulasi dan sintesa 5 dimensi perannya itu menyimpulkan bahwa ia senantiasa berhadapan dengan tiga tema masalah besar pembangunan abad ke-20, yaitu bagaimana membangkitkan kesadaran

dan kepedulian masyarakat dan negara akan pentingnya: “Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Berkelanjutan” (*Environment, Biodiversity & Sustainable Development*). Dan bahwa ketiga masalah tersebut sebenarnya saling berkaitan dan berasal dari satu sumber tantangan pokok, yaitu meningkatnya ancaman kepada sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, yang merupakan modal dasar pembangunan dan sumber kehidupan umat manusia.

Hal tersebut membuat keprihatinan yang sangat mendalam pada diri Emil Salim. Namun baginya keprihatinan saja tidak cukup. Betapapun besar dan sulitnya, masalah dan tantangan itu harus dihadapi. Perlu ada upaya, harus dicari solusi untuk mengatasinya. Kegigihan upayanya menghadapi dan mencari solusi terhadap tantangan besar “lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan” itu membuatnya terlibat dan aktif bergerak dalam berbagai kegiatan, lembaga, organisasi dan forum, baik di dalam maupun diluar negeri. Dan yang lebih penting lagi, ia sekaligus juga mampu mewujudkan prinsip dan gagasannya untuk mengatasi masalah itu menjadi suatu konsep, strategi, kebijakan dan sistem nilai yang bersifat universal. Prinsip yang berlaku untuk dan bisa diterapkan oleh semua negara dan

masyarakat di seluruh dunia. Dan itulah capaian besar (*life-time achievement*) Emil Salim : menegakkan prinsip, nilai-nilai dan konsep kebijakan yang akhirnya diakui sebagai tonggak kebenaran sejarah yang sampai detik ini masih terus diperjuangkan semua bangsa untuk menyelamatkan planet bumi ini dari krisis iklim dan bencana lingkungan.

Mengingat pentingnya capaian itu, secara ringkas perlu dijelaskan disini esensi dari tiga tema tantangan besar tersebut serta apa kontribusi dan dimana peran Emil Salim dalam mencari solusi terhadap tantangan menjelang abad ke-20 tersebut di atas :

1. "Lingkungan Hidup (*Natural/Living Environment*)" :
   Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang kehidupan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan yang hidup dan merupakan suatu sistem kesatuan alami yang utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk dan menjaga keseimbangan, stabilitas serta produktivitas lingkungan hidup tersebut. Lingkungan hidup adalah

bagian terpenting dari sumber daya alam yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan makhluk lainnya untuk bisa hidup sehat, aman dan lestari di bumi ini. Oleh karenanya lingkungan hidup harus selalu dilindungi, dijaga dan dilestarikan agar tidak rusak atau tercemar oleh kegiatan manusia melakukan produksi, konsumsi ataupun pembangunan.

Melalui perjuangan cukup panjang dan berliku, Emil Salim berhasil meletakkan azas-azas, prinsip dan nilai-nilai dasar lingkungan hidup itu dalam tonggak regulasi dan kebijakan negara RI dengan dikeluarkannya Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No.23 tahun 1997 dan terakhir diganti dengan Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang PPLH 2009 ini mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berfungsi sebagai "payung hukum" bagi penyusunan peraturan undang-undang lainnya yang terkait dengan pembangunan dan lingkungan. Undang-undang tersebut juga menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan aparat negara harus

memperhatikan lingkungan dan menerapkan prinsip yang disebut “pembangunan berkelanjutan”.

Selain merintis Undang-undang dan memimpin pelaksanaan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Pak Emil juga membentuk dan mengembangkan semua kelembagaan, prasarana sistem, tata kelola, serta berbagai program dan terobosan upaya untuk melindungi, mengelola dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia selama 15 tahun memimpin 3 periode Kementerian Negara yang terkait Lingkungan Hidup.

2. “Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)” :
   Keanekaragaman hayati adalah diantara komponen lingkungan hidup terpenting dan merupakan prinsip dasar pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dalam jangka panjang. Keanekaragaman hayati (*biological diversity*) mencerminkan adanya beranekaragam organisme hidup yang terdapat dalam berbagai jenis dan ragam flora dan fauna dalam ekosistem kehidupan, baik di darat, air dan lautan. Adanya keragaman hayati menunjukkan adanya keanekaragaman sistem kehidupan di bumi yang selama ini menopang kehidupan umat manusia. Semakin kaya

keanekaragaman hayati, semakin stabil ekosistem, dan semakin kokoh kemampuannya mendukung kehidupan alam dan manusia dalam jangka panjang. Banyaknya ragam sumberdaya hayati di hutan, gunung, sungai dan laut berperan besar dalam menahan erosi, mencegah banjir, kekeringan, kesuburan tanah, dan mempengaruhi iklim. Juga sebagai kekayaan alam yang besar sekali manfaatnya untuk sumber bahan pangan, sumber energi, bahan baku obat-obatan dan produk-produk industri. Karena itu keanekaragaman hayati wajib dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai terdegradasi menjadi semakin rusak, bahkan harus dicegah dari ancaman kepunahan. Karena punahnya keanekaragaman, akan merusak ekosistem kehidupan kita di bumi ini.

Emil Salim punya andil besar dalam merintis kebijakan dan regulasi Pemerintah untuk perlindungan dan konservasi keanekaraman hayati tersebut, terutama dalam mengubah "*mind-set*" (pola pikir) aparat pemerintah, swasta dan masyarakat agar tidak menganggap kekayaan alam sebagai sumberdaya (*resource*) yang perlu di eksploitasi terus-menerus, bisa dikuras sampai habis, padahal justru harus dijaga dan diperkaya manfaatnya agar tetap bisa dinikmati sampai

ke anak-cucu kita nanti. Pak Emil mengubah konsep "*resource exploitation*" yang merusak lingkungan, menjadi upaya "*resource enrichment*" yang memperkaya manfaat keanekaragaman hayati buat masyarakat dan lingkungan hidup yang lestari.

Pak Emil mendorong penerapan konsep dan nilai-nilai keanekaragaman hayati itu diantaranya melalui didirikannya Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), sebuah organisasi nirlaba independen yang dibentuk dan dipimpinnya bersama sejumlah aktivis LSM dan pencinta lingkungan sejak tahun 1994 dengan tujuan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan kekayaan alam berupa aneka-ragam sumberdaya hayati di Indonesia. Yayasan non-pemerintah itu mengemban mandat untuk melaksanakan tujuan mulia tersebut dengan cara membentuk dan mengelola "dana-abadi (*endowment fund*)" yang khusus digunakan untuk melaksanakan program hibah Yayasan KEHATI yaitu memberdayakan masyarakat melakukan kegiatan konservasi dan pemanfaatan anekaragam sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian Pak Emil juga mengembangkannya menjadi konsep "wawasan keanekaragaman untuk membangun

Indonesia baru" yang berlandaskan kebhinekaan suku, adat-istiadat, dan nilai-nilai budaya bangsa. Pemikiran dan advokasi kebijakan yang inovatif itu merupakan ungkapan keprihatinan sekaligus sumbangan Pak Emil kepada upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dan tuntutan pemekaran wilayah dan otonomi daerah yang belakangan ini makin gencar disuarakan oleh berbagai partai politik dan pemerintah daerah di seluruh tanah air.

"Pembangunan Keberlanjutan (*Sustainable Developmen*t)" : "Keberlanjutan (*sustainability*)" diartikan sebagai keberadaan suatu sistem yang mampu bertahan hidup dan terus berfungsi dalam jangka panjang, bahkan berkelanjutan secara lintas generasi. Prinsip "keberlanjutan" ini menjadi sangat terkenal ketika diadopsi menjadi konsep "Pembangunan Berkelanjutan" oleh Komisi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (WCED) atau dikenal sebagai "Komisi Brundtland" tahun 1984-1987 dengan rumusannya tentang pola "Pembangunan Berkelanjutan", bahwa "*humanity has the ability to make development sustainable–to ensure that a development meets the needs of current generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Jadi "pembangunan berkelanjutan"

diartikan sebagai proses perubahan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada tiga unsur dasar yang menunjang pola keberlanjutan pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam: (a) pertumbuhan ekonomi, (b) pembangunan sosial dan (c) perlindungan fungsi ekologi & daya dukung lingkungan, yang ketiganya terjalin dalam hubungan saling tergantung satu sama lain, sehingga merupakan tiga pilar penunjang proses pembangunan berkelanjutan berjangka panjang baik ditingkat komunitas lokal, nasional maupun global. Karena itu dalam setiap upaya pembangunan, tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut harus berjalan seimbang, simultan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sebagai anggota Komisi PBB untuk Lingkungan & Pembangunan (WCED) dan Tim Perumus konsep "keberlanjutan" pembangunan (*sustainability*), Emil Salim memegang peran penting baik dalam proses penyusunan konsep, juga sosialisasi ke masyarakat dan advokasi kebijakan pelaksanaannya ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kepemimpinannya memperjuangkan konsep "pembangunan berkelanjutan" ini terus berlanjut karena Pak Emil terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Senior PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (1992);

Wakil Ketua Komisi Dunia untuk Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan (1994); Ketua Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (2002); Ketua & *Eminent Person Bank* Dunia untuk evaluasi dampak industri ekstraktif & pertambangan (*Extractive Industries Review*) terhadap pembangunan sosial dan lingkungan (2001-2004). Dan perjuangannya mendorong prinsip dan nilai-nilai "keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial & lingkungan" itu terus berlanjut hingga akhirnya menjadi agenda utama pembangunan global yang diterima Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan pembangunan abad ke-21 dan dirumuskan dalam "*Millenium Development Goals* (MDGs, 2000-2015) dan kemudian "*Sustainable Development Goals* (SDGs)" untuk periode 2015 s/d 2030.

Seperti 'Galau' pada Perkembangan Negeri

Pak Emil tidak termasuk generasi "*baby boomers*", yaitu generasi yang lahir akibat tingginya angka kelahiran setelah Perang Dunia ke-2, dalam rentang tahun 1946-1964. Generasi itu terkenal punya ciri optimis, bekerja keras, maju cepat dan pantang mundur, karena berorientasi pada pencapaian karier dan hasil karya yang tinggi. Meskipun berasal dari generasi yang jauh lebih tua

(lahir tahun 1930), yang kebanyakan lebih konservatif dan serba hati-hati, namun perilaku Emil Salim justru lebih mirip the *baby boomers* itu. Cepat merasa geram dan tak sabar jika berhadapan dengan situasi yang kurang berkenan dihatinya. Ketika menginjak usia mendekati 90-an, saya pikir Beliau akan *slow-down* , mau dan bisa lebih sabar melihat perkembangan keadaan negara. Akan tetapi setelah selesai pemilihan Presiden dan menjelang berakhirnya tahun 2019, saya melihat Pak Emil justru makin sibuk, aktif bicara ke mana-mana dengan topik yang berganti-ganti. Seperti ada sesuatu yang mengusik hati dan pikirannya.

Dia tidak banyak lagi bicara tentang ekonomi, lingkungan ataupun pentingnya keanekaragaman hayati. Topik pembangunan berkelanjutan dan SDGs juga jarang disebut. Dalam beberapa forum dan makalahnya, tiba-tiba dia justru lebih banyak bicara tentang “bonus demografi”, “kualitas SDM yang rendah”, “generasi emas yang tertinggal”, dan banyak lagi istilah dan topik lain yang sebelumnya jarang menjadi fokus perhatiannya. Tema dan nada pidato-pidato sambutannya didepan publik juga sering terdengar sedih dan geram pada “kian merajalelanya praktik suap dan korupsi di semua bidang dan sektor pembangunan”. Pada perkembangan “demokrasi kita yang didominasi oleh

elite partai politik berpandangan sempit dan berjangka pendek hanya untuk menang pemilu dan menguasai pemerintahan setiap 5 tahun". Dalam kegalauannya menyaksikan perkembangan tanah air, Pak Emil sering melempar pertanyaan-pertanyaan lewat *WhatsApp* (WA) dan email kepada saya dan rekan-rekan dekat lainnya. Dia mempersoalkan apa sebenarnya yang menjadi "prioritas masalah bangsa" saat ini ? Apakah pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kaltim merupakan prioritas? Tapi kami masih ragu menjawab pertanyaan-pertanyaannya, karena tak tahu persis masalah apa sebenarnya yang merisaukan hati dan pikiran Pak Emil belakangan ini.

Orasi yang Menguak Tabir Kegalauan

Baru pada tanggal 16 November 2019, ketika Biro Oktroi Roosseno memberi penghargaan "*Lifetime Achievement Award* tahun 2019" kepada Prof. Dr. Emil Salim karena jasa-jasanya "memberi inspirasi dan kontribusi tentang "Nilai-nilai Keberlanjutan, Keanekaragaman dan Integritas" kepada bangsa, Beliau menyampaikan sebuah Orasi berjudul "Bersama Generasi Emas, Indonesia Lepas Landas". Orasi itu cukup panjang, bagus dan disampaikan dengan penuh semangat, yang bagi saya membuka "tabir kegalauannya" belakangan ini. Pak Emil membuka

orasinya dengan pernyataan amat penting sebagai berikut: “Dalam sejarah bangsa Indonesia baru sekarang terbuka kesempatan yang begitu luas untuk membangun tahapan Indonesia lepas landas, berkat tumbuhnya generasi emas usia produktif 15–64 tahun dalam periode tahun 2020-2035 ini”. Kemudian orasi dilanjutkan dengan uraian panjang-lebar untuk menegaskan betapa pentingnya Indonesia segera memetik manfaat “bonus demografi”, karena mulai tahun 2020 ini populasi Indonesia didominasi oleh penduduk usia kerja yang produktif (15-64 tahun) dan karenanya berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi masa depan bangsa. Potensi manfaat bonus demografi itu tidak akan berlangsung lama, hanya dalam periode 2020 s/d 2035 kelompok penduduk usia kerja produktif itu akan naik terus, dan yang berpotensi memberi keuntungan paling besar pada tahun 2040. Sesudah itu, pertumbuhan penduduk usia kerja produktif di Indonesia akan menurun terus. Maka periode yang relatif singkat itulah yang oleh para ahli demografi dan ekonom disebut sebagai “jendela peluang” (*window of opportunity*) untuk memacu dan mencapai kemajuan suatu bangsa. Karena itu Pak Emil menyebut kelompok usia kerja produktif (15-64 tahun) sebagai “generasi emas”. Dan karena itu pula selagi masa bonus demografi dan jendela peluang itu terbuka bagi generasi emas, Pak Emil mendesak agar

upaya akselerasi percepatan pembangunan Indonesia dilaksanakan mulai sekarang. Karena kalau kesempatan emas itu di sia-siakan, dan jendela sudah tertutup, maka akan hilang pula peluang bagi negara kita untuk bisa lepas landas pada 2045.

Setelah merenungkan kembali orasi Pak Emil Salim pada acara Penganugerahan Roosseno Award ke-X itu saya menjadi lebih mengerti mengapa dia belakangan berperilaku seperti generasi *baby boomers*. Teka-teki "kegalauannya" mulai terungkap. Ternyata dia tidak mau kehilangan peluang emas yang sedang terbuka lebar bagi generasi emas. Dia harus bekerja keras dan mau berlari kencang, karena sedang berpacu dengan waktu. Pak Emil merasa perlu bekerja lebih aktif untuk mendorong semua pihak agar berfokus pada tiga sasaran strategis:

(1) Pengembangan kualitas dan produktivitas kelompok penduduk usia kerja (generasi emas) agar bisa melepas bangsa kita dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan sumberdaya manusia (SDM) ; (2) Membangun institusi dan sistem tata kelola pembangunan yang bersih,transparan dan akuntabel untuk menunjang pelaksanaan pembangunan SDM tersebut; dan (3) Meningkatkan sistem pembangunan berkelanjutan dengan menaikkan nilai tambah sumber daya

alam (SDA) dan mengembangkan sains & teknologi untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera.

Jadi pada intinya Emil Salim punya agenda dan fokus perhatian yang relatif baru. Agenda idealnya yang baru itu ingin dikejarnya mulai sekarang. Landasannya masih tetap sama : kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kerangka besar strategi pencapaiannya masih tetap pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi fokus sasaran pokok pembangunan dan skala prioritasnya yang harus berubah. Tak bisa lagi fokus hanya pada ekonomi dan infrastruktur fisik saja. Pemindahan dan pembangunan ibukota baru bukan prioritas, karena justru mengalihkan sumberdaya dan anggaran negara dari sasaran pokok. Kebijakan & upaya pelemahan peran KPK harus segera dihentikan, karena itu bertentangan dengan prioritas untuk membangun tata kelola SDA dan SDM yang bersih, transparan dan akuntabel.

Singkat kata, agar bisa memetik manfaat “bonus demografi” dan “jendela peluang” yang sedang terbuka lebar bagi “generasi emas” di Indonesia, Pak Emil ingin mendesak Pemerintah dan semua pihak agar supaya fokus kepada “agenda membangun kualitas anak bangsa dari Sabang

sampai ke Merauke" mulai tahun 2020 ini. Indonesia menderita ketertinggalan "modal sumber daya manusia" yang sangat besar, karenanya kita membutuhkan investasi paling sedikit Rp 5.300 trilyun atau 36% dari Produk Domestik Bruto per tahun untuk membangun infrastruktur kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan infrastruktur sosial lainnya guna mengejar ketertinggalan modal SDM itu. Tapi investasi modal SDM saja tak cukup, karena sekarang ini dunia termasuk Indonesia sedang berada di era "Industri 4.0", sementara saat ini untuk "Industri 2.0" saja keahlian dan ketrampilan SDM kita belum memadai. Maka untuk menjawab tantangan "era disrupsi", Indonesia harus bisa melakukan terobosan melalui investasi teknologi untuk menyiapkan anak-anak didik kita dan tenaga kerja bangsa ini guna menghadapi perubahan-perubahan besar yang tengah terjadi. Selain itu, proses pembangunan harus tetap berlanjut dengan "pola & azas keberlanjutan" untuk menaikkan "nilai tambah" sumberdaya alam, khususnya anekaragam kekayaan sumberdaya hayati. Untuk itu institusi sosial-politik, tata kelola pembangunan dan pranata demokrasi kita yang masih jauh dari mapan itu tidak boleh dibiarkan terus digerogoti oleh praktik-praktik suap, korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai sektor, terutama dalam pengelolalaan sumber daya alam yang merupakan modal dasar pembangunan dan kehidupan kita semua selama

ini. Begitulah kira-kira rangkuman pokok-pokok gagasan Pak Emil Salim yang terus menjadi obsesi pemikiran dan perjuangannya mencari solusi buat masalah bangsa, ketika menjelang usianya yang ke-90! Luar biasa.

Pak Emil Salim telah memberi kita contoh keteladanan tentang komitmen, integritas dan kegigihan seorang cendekiawan, pemimpin, guru bangsa dan pelayan masyarakat yang terus mengabdi tanpa lelah kepada kepentingan publik, dan berjuang tanpa jeda menegakkan prinsip dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal. Sungguh contoh teladan yang tak ada duanya, dan nyaris hilang di zaman sekarang. Terima kasih dan selamat ulang tahun Pak Emil, semoga terus sehat dan tetap semangat memandu kita semua bisa sampai ke tahap “lepas landas”! Amin, insya Allah.

Pengantar Webinar

Pada tanggal 8 Juni 2020 , penggagas dan pendiri Yayasan KEHATI, Prof. Emil Salim, genap berusia 90 tahun. Usia yang istimewa untuk seorang Profesor Emil Salim yang masih tetap aktif dan bernas dalam berpendapat bagi kebaikan negeri ini. Karena itu, Yayasan KEHATI, sebagai salah satu buah dari gagasan besar Prof. Emil, merasa perlu untuk menjadikan momentum ulang tahun tersebut dalam bentuk seminar tentang pemikiran dan harapan Beliau terhadap masa depan Indonesia.

Di tengah *pandemic* Covid-19, dimana ada pembatasan untuk melakukan acara tatap muka, maka KEHATI menyelenggarakan webinar untuk merayakan ulang tahun Prof Emil Salim ke 90. Tema Webinar adalah Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045, diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2020 . Pembicara utama adalah Prof. Emil Salim dan menghadirkan 3 tokoh yaitu Faisal Basri, S.E., M.A., Prof. Arif Satria dan Amanda Katili Niode, Ph.D. Webinar ini dipandu oleh Desi Anwar, Direktur CNN Indonesia.

Webinar ini dihadiri oleh 1000 peserta melalui zoom dan 600 peserta yang menyaksikan tayangan *live* di youtube

Yayasan KEHATI. Peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, baik dari kalangan LSM, universitas, Lembaga-lembaga pemerintahan di daerah, wartawan, pemerhati pembangunan berkelanjutan serta sahabat dan keluarga Prof. Emil Salim.

Materi dan diskusi pada webinar tersebut, didokumen–tasikan dalam bentuk tulisan dengan menyertakan ringkasan sesi tanya jawab.

Bangun Bangsa
Adil Makmur 2045

Prof. Emil Salim

Pendiri Yayasan KEHATI

Setelah sejak tahun 1945 hingga kini 2020, Setelah bangsa Indonesia melewati berbagai tahapan pembangunan dibawah pimpinan tujuh Presiden, maka tiba kita pada tahap merefleksi apa yang sudah dicapai bangsa kita sekarang untuk menapak tantangan permasalahan pembangunan yang sedang menghadang kiia di masa depan dalam perjalanan bangsa menuju seratus tahun Indonesia Merdeka.

Kita bersyukur bahwa banyak cita-cita bangsa, sudah kita capai. Namun masih banyak lagi yang harus kita rampungkan. Dari begitu banyak masalah yang masih perlu diselesaikan, kita mengangkat tiga masalah besar yang saling berkaitan sebagai tantangan pembangunan yang juga mengancam keberlanjutan hidup manusia dan perlu ditanggapi.

Tiga Tantangan Pembangunan

Pertama: terjeratnya pembangunan Indonesia dalam "jebakan pendapatan menengah" sejak 1986 hingga sekarang. Sehingga menyebabkan kita terperangkap pada tingkat pendapatan yang berputar itu-ke-itu saja, tak kunjung "lepas landas", jumlah penduduk miskin yang tinggi dan Ratio Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) yang

juga tinggi. Sehingga pola kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk daerah satu dengan lain tidak berubah besar. Sehingga meraih cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur seakan-akan sulit diraih.

Selama masa 1970-2017 dibawah setiap Presiden jumlah penduduk miskin masih dua digit dari jumlah penduduk Indonesia. Presiden Soeharto memulai masa pemerintahannya dengan 60% dari jumlah penduduk atau 70 juta sebagai penduduk miskin dan mengakhiri masa jabatannya di tahun 1996 dengan 17,47% jumlah penduduk miskin atau 34,01 juta. Presiden Habibie mengakhiri masa kerjanya di tahun 1999 dengan jumlah penduduk miskin 47,97 juta (23,43%). Presiden Abdurrahman Wahid mengakhiri masa jabatannya di tahun 2001 dengan jumlah penduduk miskin 37,87 juta jiwa (18,41%). Presiden Megawati Soekarnoputri menyelesaikan tugasnya di tahun 2004 dengan 36,15 juta jiwa penfuduk miskin (16,66%). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup masa kerjanya di tahun 2014 dengan 27,73 juta jiwa penduduk miskin (10,96%). Dan Presiden Joko Widodo mencatat di tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 26,58 juta jiwa (10,12%) (Sumber: Kompas).

Sungguhpun persentase jumlah penduduk miskin ini

turun, namun jumlahnya masih cukup besar. Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di tahun 2018 bervariasi antara Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio 0,295 terendah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gini Ratio 0,423 tertinggi (Sumber BPS 15 Juli 2019). Sehingga menonjol keperluan untuk lebih mendorong pola dan kebijakan pembangunan yang tidak hanya menekankan "laju tingkat pertumbuhan yang tinggi" tetapi juga mengutamakan penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan antar penduduk Indonesia yang lebih adil.

Kedua: rendahnya kualitas sumber daya manusia mempengaruhi tingkat produktivitas yang tercermin pada rendahnya jumlah produk yang dihasilkan per satuan tenaga manusia Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain yang sebanding. Rendahnya tingkat produktivitas manusia Indonesia diakibatkan oleh rendahnya tingkat dan kualitas pengembangan sumber daya manusia.

Menurut penilaian *Programme for International Student Assessment* (PISA oleh OECD tahun 2015 yang mengukur kualitas siswa negara bersangkutan tentang pemahamannya dalam membaca, sains dan matematika

maka Singapura meraih urutan nomor satu, sedangkan Indonesia menduduki urutan ke 62 dibawah Vietnam, Thailand dan Malaysia dari 70 negara yang dinilai.

Rendahnya kualitas pendidikan berpengaruh buruk pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencatat 6,30 (mengungkapkan besarnya tambahan modal (*incremental capital*) yang diperlukan untuk menaikkan satu satuan output. Nilai ICOR India adalah 4,64 dan Vietnam sebesar 4,31 jauh lebih rendah dari Indonesia. Ini berarti bahwa untuk memperoleh hasil *output* yang sama, Indonesia memerlukan jumlah modal lebih banyak dari India dan Vietnam, sehingga mengalahkan Indonesia dalam persaingan.

Sehingga untuk menaikkan daya saing ekonomi indonesia sangatlah penting meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu meningkatkan tingkat produktivitas Bangsa.

Ketiga: Tanah air Indonesia terletak di sepanjang khatulistiwa, diapit dua benua besar Asia dan Australia dan dua samudra besar, Pasifik dan Atlantik. Sehingga Indonesia menduduki posisi kedua di dunia, sesudah Brazil, sebagai negara yang terkaya sumber daya alam plasma

nutfah dan keanekaragaman alam hayatinya. Apabila Brazil memiliki kekayaan ekosistem terbesar berdasarkan kawasan kontinen daratan, maka keunggulan Indonesia terletak pada keanekaragaman ekosistem alami terbesar berdasarkan kawasan kepulauan.

Sehingga dengan penerapan ilmu, sains dan teknologi maka sumber daya alam tropis Indonesia bisa menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia dengan keunggulan daya saing yang tinggi. Kuncinya adalah terbangunnya kualitas sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam ini secara berkelanjutan dengan menerapkan sains dan teknologi.

Berkat penerapan kebijakan Keluarga Berencana oleh Pemerintah selama ini, maka untuk pertama kali dalam sejarah bangsa kelompok penduduk usia produktif 15-64 tahun naik jumlahnya dari 170,79 juta jiwa (2015) ke 195,25 juta jiwa (2040) sebagai puncaknya untuk kemudian menurun ke 193,71 juta jiwa di tahun 2045 (lihat "Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini" oleh Editor Sri Moertiningsih Adioetomo dan Elda lucuana Pardede, Rajawali Pers 2018).

Perlu digarisbawahi bahwa sejak 2020 pola usia penduduk

kita didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun sebagai generasi emas bangsa yang bisa melalui pola pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) membawa bangsa kita ke tahap lepas landas mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kunci strategisnya adalah: pengembangan kualitas dan produktivitas bangsa dibawah pimpinan kelembagaan Negara yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam oleh kualitas sumber daya manusia Indonesia tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

Alur pikiran ini semakin penting oleh karena sudah tampak semakin kasar dan besar kemampuan manusia untuk mengganggu dan merusak keutuhan ekosistem alami yang menopang keberlanjutan hidup manusia.

Virus Corona Produk Gangguan Ekosistem

Akhir-akhir ini dunia dikejutkan oleh terjangkitnya pandemi *Corona Desease* 2019 (Covid-2019) yang berasal dari kelelawar-kelelawar di pasar basah Wuhan, RRT. Sudah acapkali lahir penyakit-penyakit baru yang dipicu oleh hewan, seperti monyet sebagai pemicu AIDS, nyamuk pemicu Malaria dan Demam Berdarah, Flu Burung, Flu Babi dan lain-lain. Para ahli lingkungan sependapat bahwa

kerusakan lingkungan alam ini mengganggu ekosistem habitat hewan, serangga, kelelawar, dan sejenisnya. Dan mengakibatkan hewan dan serangga ini berlaku “agresif” mampu menularkan virus ke manusia. Virus Corona menular melalui “embun ludah halus” (*droplet*) dari manusia yang batuk atau bersin yang bisa menular ke tubuh manusia melalui mulut, hidung dan mata.

Yang menjadikan penularan virus ini pelik adalah bahwa manusia tidak sadar dan ketahui bahwa ia kemasukan virus. Sehingga timbul gejala “Orang Tanpa Gejala” yang bebas berkeliaran dan, berlaku bagaikan “musuh dalam selimut” bisa menularkan virus tanpa disadarinya.

Inilah mengapa virus Corona itu “musuh berbahaya”. Karena ia tersembunyi di tubuh “orang tanpa gejala”. Sedangkan kecepatan penularannya antar manusia itu tinggi. Dengan menerapkan pola “*testing-tracing-treatment*” virus bisa dikenali dan ditundukkan. Sementara ini kita tidak tahu ia ada dimana.

Karena ciri virus yang khas ini lahirlah sikap hidup dengan prinsip pokok “ambil jarak fisik antar manusia,” “ambil jarak sosial dengan kelompok manusia”, hindari kerumunan manusia, isolasi dirimu dengan bekerja dari rumah,

belajar dari rumah. Tanpa kita sadar, tumbuh perilaku "hidup ambil jarak". Dan ini menyentuh essensi pergaulan hidup masyarakat Indonesia berlandaskan "masyarakat Paguyuban" (*Gemeinschaft*) dimana sikap hidup yang kita tempuh adalah "semangat kekitaan" dengan pengertian" kita, dimana engkau ikut termasuk".

Ini berbeda dengan esensi pergaulan hidup masyarakat Barat yang bertumpu pada "semangat kekamian" (*Gesellschafft*) dimana "dalam pengertian kami, engkau tidak termasuk".

Karena itu dalam menerapkan ketentuan "ambil jarak fisik" dan "ambil jarak sosial" kita perlu sadar agar sikap perilaku ini tidak mengalihkan perilaku dan pola hidup kita dari semangat Paguyuban ke semangat Patembayan.

Virus Corona perlu kita tolak, namun dengan cara dan kesadaran penuh bahwa "pola ambil jarak individu maupun sosial" tidak berarti merubah karakter bangsa berpola Paguyuban, semangat kekitaan dengan semangat gotong-royong.

Untuk mencapai ini sangatlah penting peranan teknologi. Sarana teknologi digital adalah "wahana pengukuhan dan

pelestarian semangat Paguyuban", sebagai pengganti kontak badan pribadi langsung. Karena itu sangat penting para ahli *social psychology*, ahli komunikasi, ahli sosiologi dan lain-lain, aktif mengembangkan pola, cara dan konsep Teknik digital menjadi wahana sosial mampu melaksanakan "semangat distansi sosial yang tersimpul dalam kebutuhan kesehatan mencegah penularan virus" sambil tetap menumbuhkan "semangat kekitaan yang menyatu dalam semangat gotong-royong masyarakat Paguyuban".

Sehingga teknologi digital menjadi alat penyaluran gagasan-gagasan pelestarian semangat gotong-royong dalam pengembangkan sistem nilai Paguyuban.

Teknologi digital tumbuh baik untuk proses pendidikan sekolah (*distance learning*) dan juga proses pengembangan solidaritas sosial, semangat gotong-royong, dan kebersamaan sosial. Jika "pendidikan berjarak" ditopang oleh sistem pendidikan dan kurikulum, maka pengembangan solidaritas sosial dan semangat Paguyuban juga memerlukan semacam sistem dan kurikulumnya. Pesan pokok bahwa "hidup ambil jarak guna hindari penularan virus" perlu diimbangi dengan pola pengembangan nilai-nilai kebersamaan gotong-royong.

Alur fikir ini juga berlaku dalam mengembangkan pemahaman ancaman virus dalam rangka agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha dll. Alur agamapun diperlukan untuk menghindari berubahnya karakter bangsa gara-gara *Social distancing* untuk hindari virus. Dan sekaligus memberi pemahaman mengapa jenazah korban virus dan kebiasaan acara tahlilan perlu ditiadakan untuk menghindari penularan virus.

Relevansinya "*digital technology learning* baik untuk pengajaran sekolah maupun masyarakat" adalah juga untuk membuka akses fasilitas ini bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dalam masa ancaman penularan Covid-19 ini.

Fakta sekarang ternyata bahwa pelaksanaan "pengajaran tatap muka" hanya bisa diterapkan di 85 kabupaten/kota yang masuk zona-hijau dari 429 kabupaten/kota masih masuk zona merah-orange-kuning. Ini berakibat bahwa "pengajaran berjarak" perlu diterapkan di 344 kabupaten/kota.

Karena fasilitas gelombang telekomunikasi dan listrik belum tersedia lengkap di kebanyakan kabupaten/kota,

maka perencanaan komprehensif perlu dikembangkan di ratusan kabupaten/kota mencakup fasilitas telekomunikasi, listrik, air mengalir, disamping fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten/kota/kota ini.

Sehingga lahir pola pembangunan “menyerang dan menundukkan virus Corona” dengan wawasan lebih luas: menyelamatkan generasi anak bangsa, mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan fasilitas digital telekomunikasi, listrik, air bersih di seantero kabupaten/kota bahkan kecamatan dan desa sebagai wahana pembangunan menghalau kemiskinan dan ketimpangan hidup antar anak bangsa bernapaskan jati diri bangsa: gotong-royong.

Pembangunan Berkelanjutan 2045 Tanggapan Atas Orasi 90 Tahun Prof. Emil Salim

Faisal Basri, S.E., M.A.

Ekonom Indonesia

Selamat ulang tahun, Pak Emil. Saya bersyukur sekali menjadi murid bapak pada mata kuliah “Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan”. Sampai sekarang masih melekat di dalam diri saya apa yang Bapak sampaikan. Bapak selalu menyempatkan diri, tidak pernah bolos. Setahu saya tidak pernah cuti untuk mengajar, lantas sampai kapan pun kami tunggu, sekalipun Bapak terlambat habis sidang kabinet dengan baju safari dan tas kerjanya. Bapak selalu mendatangi kami di Salemba dan mengutamakan kepentingan mahasiswa. Pada suatu ketika, Pak Emil menguji mahasiswa namanya Michael Tene sekarang pejabat tinggi Deplu untuk ujian skripsi pada 17 Agustus. Setelah sidang kabinet, Pak Emil masih pakai jas dan dasi. Datang demi Michael Tene. Demi mahasiswa. Luar biasa, itu yang tidak pernah bisa saya lupakan.

Tadi Pak Emil sudah menyampaikan ICOR. Yang merah adalah ICOR dan yang hitam adalah laju pertumbuhan. Jadi, Pak Emil katakan tadi bahwa kita secara konsisten dalam lima tahun terakhir selalu di atas enam. Artinya, kalau tadi Pak Emil mengatakan Thailand dan Vietnam itu sekitar 4, kita itu 50% lebih banyak membutuhkan modal untuk menambah satu unit output. Dan ini tidak ada presedennya. Di era lima tahun terakhir, ICOR 6,5. Di era Bung Karno 2,6, memang kita dulu belum punya apa-apa.

Di era Pak Harto 4,6. Di era pasca reformasi Pak Habibie, Gusdur, SBY, Megawati, di bawah 5. Sekarang 6,5. Ini yang tentu saja mengkhawatirkan kita semua.

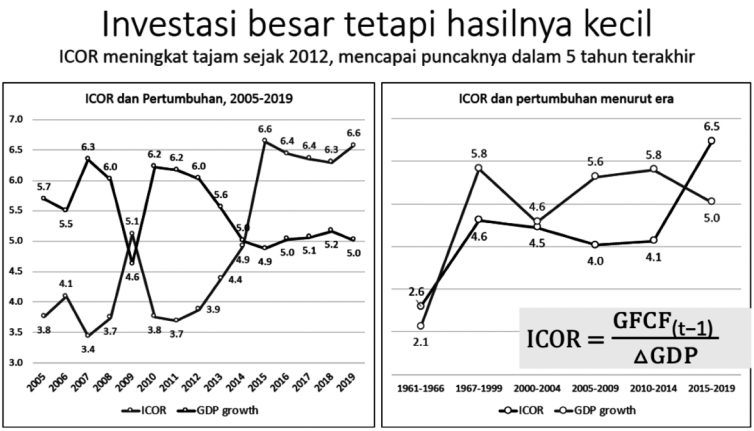

Investasi sebetulnya tinggi. Pak Emil juga tidak mempermasalahkan. Investasi kita yang merah ini tidak jelek. Hanya lebih kecil pertumbuhannya dari Vietnam. Investasi per PDB kita itu lebih tinggi dari rerata negara berpendapatan menengah bawah maupun menengah tinggi. Menengah rendah maupun atas. Jadi kita di bawah *everage* dan memang di era Pak Jokowi, investasi ini tidak pernah setinggi sepanjang sejarah kita. Rekor yang luar biasa. Investasi per PDB kita lebih tertinggi di ASEAN. Jadi *no problem* dengan investasi. Oleh karena itu, kita bingung dengan UU Cipta Kerja. Omnibus Law. Seperti

Pak Emil katakan. Nah, sebetulnya yang jadi masalah itu adalah korupsi. Yang kedua birokrasi yang tidak efisien. Ketenagarkerjaan nomor 13. Tapi ketenagakerjaaan yang utama dalam Omnibus Law.

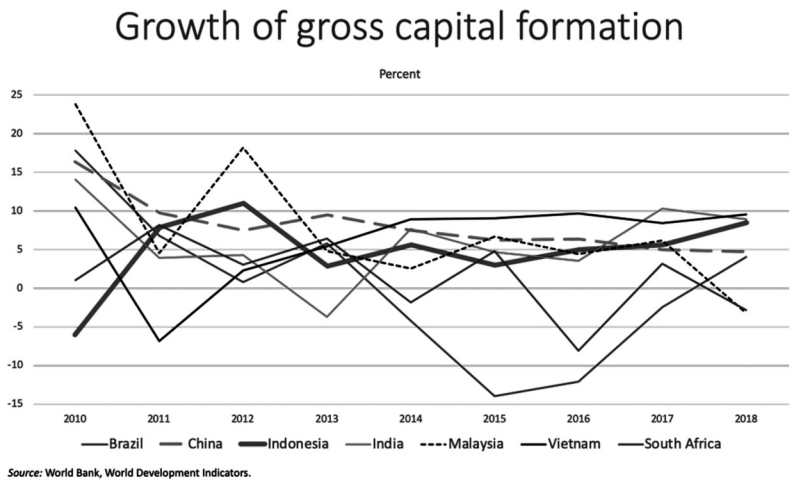

Pertumbuhan yang cukup tinggi itulah yang membuat sumbangan investasi bagi perekonomian (produk domestik bruto/PDB) selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru terus meningkat dan mencapai aras tertinggi dalam sejarah. Pencapaian itu di atas rata-rata kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), dimana Indonesia bertengger di kelompok ini, bahkan jika dibandingkan dengan kelompok negara berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income*).

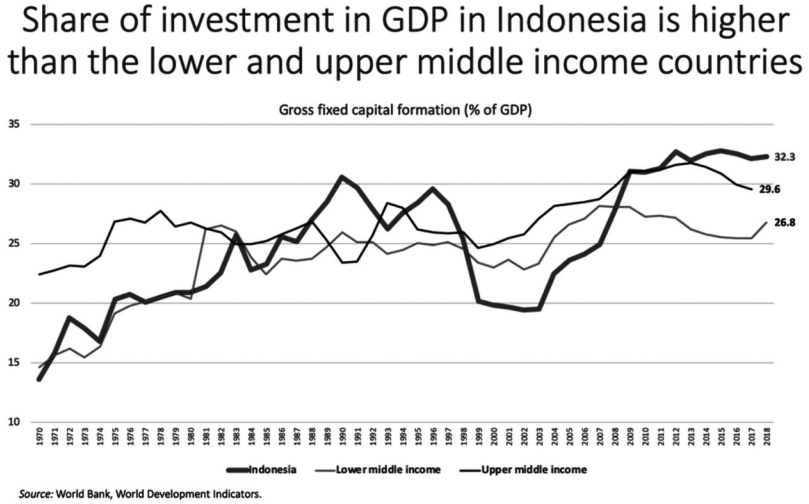

"Namun, yang jadi permasalahan adalah rasio ICOR Indonesia yaitu 6.5 selama lima tahun belakang menunjukan tingkat efisien yang rendah. Investasi besar, namun hasilnya rendah. Di era lima tahun terakhir, rasio ICOR Indonesia mencapai 6,5. Di era Bung Karno 2,6, memang kita dulu belum punya apa-apa. Di era Pak Harto 4,6. Di era pasca reformasi Pak Habibie, Gusdur, SBY, Megawati, di bawah 5. Sekarang 6,5. Ini yang tentu saja mengkhawatirkan kita semua," jelas Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri pada Webinar 90 Tahun Prof Emil Salim (18/6).

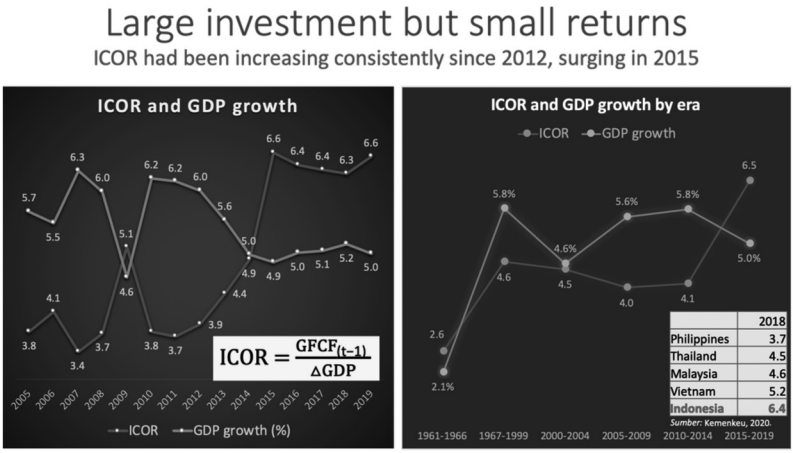

Source: BPS-Statistics Indonesia.

Jadi, di era Pak Jokowi, pertumbuhan investasi Indonesia adalah yang tertinggi dalam sejarah. Artinya, Indonesia tidak memiliki masalah dengan investasi. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja membuat semua orang menjadi bingung, karena yang menjadi masalah di Indonesia adalah korupsi. Kedua yaitu birokrasi yang tidak efisien, dan ketenagakerjaan berada di nomor 13. Tapi, ketenagakerjaaan yang utama dalam Omnibus Law.

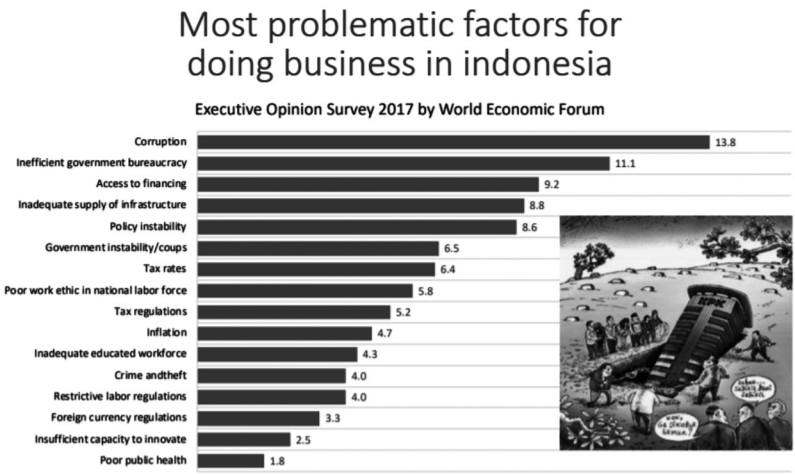

Selain itu, investasi yang dilakukan Indonesia juga tidak berkualitas. Sebanyak 75% investasi yang dilakukan dalam bentuk bangunan, sementara *machinery* dan *equipment* itu hanya 10%. Jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Alhasil, kapasitas Indonesia untuk menghasilkan barang menjadi sangat terbatas, karena keterbatasan mesin dan *equipment* yang hanya 20%.

Low quality of investment

Composition of gross fixed capital formation, percent

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Construction	74.28	73.10	72.84	73.48	74.73	75.19	75.17	75.13	74.48	75.04
Machinery & equipment	10.36	11.44	11.67	11.23	10.39	9.97	9.02	9.29	10.40	10.60
Vehicles	5.78	5.97	6.36	5.66	4.76	4.60	5.16	5.35	5.42	4.95
Other equipments	1.45	1.44	1.37	1.38	1.44	1.55	1.72	1.77	1.80	1.67
Cultivated biological resources	5.91	5.94	5.65	5.82	5.87	5.97	6.11	5.81	5.48	5.41
Intellectual property products	2.23	2.11	2.11	2.44	2.80	2.71	2.82	2.64	2.42	2.32
GFCF	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Source: BPS-Statistics Indonesia.

Lalu pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana membiayai investasi yang besar tadi? *financial development* index Indonesia rendah, bahkan di antara negara-negara ASEAN. Pasar saham Indonesia juga sangat kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Pun dengan *credit penetration*, bahkan jika dibandingkan dengan Myanmar. Melihat data Bank Dunia di tahun 2017, penetrasi kredit Indonesia terbilang sangat kecil, yaitu hanya 42%. Inilah yang membuat tantangan kita sungguh sangat besar untuk menghindarkan diri dari *middle income trap*. Secara keseluruhan, sektor finansial kita masih kedodoran. Sejak krisis ekonomi terparah tahun 1998, indeks pembangunan finansial kita praktis jalan di tempat. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam.

Credit penetration in Indonesia is still very low, has not reached pre-crisis level yet

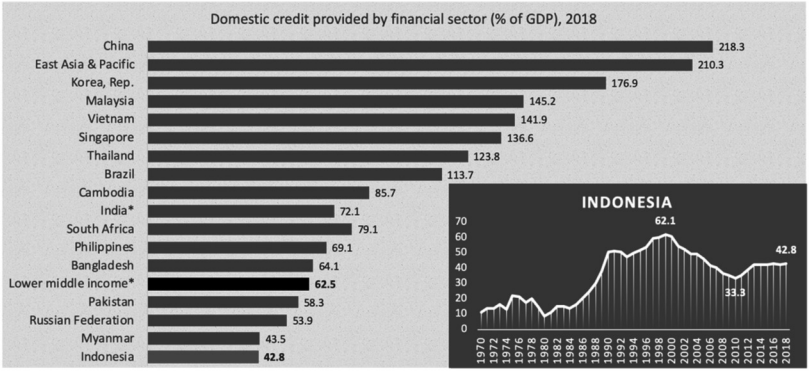

*2017
Source: World Bank, World Development Indicators. Available at: https://datacatalog.worldbank.org/domestic-credit-provided-financial-sector-gdp, downloaded on June 20, 2020.

Kemudian, kalau dilihat, pemerintah sekarang jual obligasi. Obligasi juga masih rendah sekali, dimana PDB-nya hanya 2,8% atau sedikit lebih baik dari Vietnam. *Tax ratio* Indonesia pun turun. Pertanyaannya adalah dari mana kita membiayai investasi itu sementara sektor keuangan kita jauh dari mampu untuk mengatasi ini semua? Jelas jawabannya adalah melalui utang.

Utang BUMN Indonesia tercatat besar karena terbebankan melebihi kemampuannya untuk investasi di bidang infrastruktur. Sebanyak 38% utang pemerintah dalam bentuk obligasi *local currency bond* dipegang oleh asing, sementara negara lain cuma di bawah 10% atau belasan

persen. Kepemilikan utang Indonesia oleh asing sangat besar.

Untuk membayar utang, Indonesia terpaksa harus mengekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan rotan yang mencapai 71 miliar USD (tahun sebelumnya 80 miliar USD). Hal ini disebabkan oleh porsi ekspor manufaktur Indonesia relatif sangat rendah akibat terjadi gejala dini deindustrialisasi. Kebanyakan produk manufaktur yang kita ekspor adalah barang-barang yang berteknologi rendah yang tentunya dengan nilai tambah yang relatif rendah pula. Sekalipun kita gabung yang berteknologi tinggi dan menengah, tetap saja porsinya masih rendah. Padahal devisa dari ekspor bukan semata-mata untuk membayar kewajiban utang, tetapi terutama untuk membiayai impor. Repotnya, impor semakin beragam dan sebaliknya ekspor semakin tidak beragam.

Batu bara ini dikuasai oleh 6 perusahaan, yang kontraknya sudah hampir habis. Oleh sebab itu, mereka harus diselamatkan oleh penguasa yang menyebabkan keluarnya UU Minerba. Enam perusahaan ini menguasai 70% produksi batu bara nasional. Maka produksi digenjot terus selalu melampaui kuota 500 juta ton.

Yang kedua adalah sawit. Sawit dan batu bara sebagaimana disebutkan oleh Prof Emil Salim telah merambah ke hutan karena yang di lahan bukan hutan sudah habis, dimana terdapat 3,5 juta hektar lahan sawit itu ada di lahan hutan. Jadi betul-betul investasinya berbasis pengerukan sumber daya alam dan itu dikuasai oleh segelintir orang. Akhirnya, oligarki kian mencekam, mencengkram, dan demokrasi kita dalam ancaman.

Pembangunan Berkelanjutan 2045 Tanggapan Atas Orasi 90 Tahun Prof. Emil Salim

Prof. Arif Satria

Rektor IPB

Pada tahun 2045, Indonesia sudah diprediksi menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju maka beberapa ukuran (lingkungan, ekonomi, sosial) digunakan dan Indonesia dituntut untuk dapat melakukan upaya pembangunan yang lebih sustain, memperhatikan lingkungan.

Pada saat ini kita dihadapkan pada persoalan krisis lingkungan yang harus segera diatasi, yaitu:

- Sampah, Indonesia merupakan peringkat kedua terbesar di dunia
- Banjir
- Pencemaran sungai,
- Rusaknya ekosistem laut
- Pemanasan global
- Pencemaran udara
- Sulitnya air bersih
- Kerusakan hutan
- Abrasi, sekitar 2000 desa di Indonesia terancam rob
- Pencemaran tanah

Saat ini kita menghadapi dampak konkrit dari krisis lingkungan terhdap sumber daya alam. Sebagai contoh adalah aspek pangan. Indeks ketahanan pangan Indonesia berada pada urutan ke 62 di dunia dan ke lima di Asia

Tenggara. Untuk *Food Sustainability Index*, Indonesia mendapatkan skor 59,1 dimana posisi ini tertinggal dari Ethiopia yag memperoleh skor 68,5. Sedangkan untuk *food lost* dan *food waste*, Indonesia berada pada nomor 2 setelah Arab Saudi, yaitu sekitar 300 kg/kapita/tahun karena banyak makanan kita yang terbuang dan tercecer.

Persoalan krisis lingkungan dan sumber daya alam merupakan sebuah krisis tata kelola (*governance*) yang dapat membuat ekonomi menjadi tidak sustain. Krisis tata kelola adalah kegagalan kita mengatur tindakan para aktor negara, pasar, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap sumber daya alam. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak aspek ekonomi yang tidak akan sustain karena aspek lingkungan tidak diperhatikan.

Pak Emil begitu luar biasa bicara tentang pentingnya aspek lingkungan untuk menjaga *sustainability* ekonomi. Dulu, memang rasionalitas ekonomi begitu dominan. Sekarang saatnya rasionalitas ekonomi dan ekologi dapat dikawinkan. Beberapa tahun lalu, rasionalitas ekonomi merupakan sesuatu yang terpisah dari rasionalitas ekologi. Akan tetapi, sekarang ini kita harus mencoba mengintegrasikan keduanya. Bahwa rasionalitas ekonomi dan rasionalitas ekologi itu bisa menyatu. Ada pendekatan

yang namanya *ecological modernization* sebagai upaya untuk mengintegrasikan dua rasionalitas ini, sehingga hasilnya akan baik.

Dalam *ecological modernization*, ada beberapa asumsi. Pertama adalah ekologisasi produksi yang berarti pengurangan limbah dan pencemaran melalui perbaikan teknologi ramah lingkungan. Kedua, perbaikan kerangka regulasi dan pasar yang pro ekologis. Ketiga adalah menghijaukan nilai sosial dan korporat beserta praktiknya.

Sekarang gerakan-gerakan sosial dalam modernisasi ekologi sudah banyak dan menjadi tren yang luar biasa. Orang sudah mulai menggunakan tumbler, *car free day*, kampanye earth hour, anti kantong plastik, upacara pernikahan yang 'green' mewajibkan pemberian mahar berupa bibit pohon yang harus tanam. Hal ini merupakan gerakan *ecological modernization* yang bagus sekali untuk ditiru dan dikembangkan.

Aktor-aktor yang berkepentingan terhadap tata kelola sumber daya alam adalah negara, pasar dan masyarakat. Masing-masing aktor memiliki karakteristik, sebagai berikut:

1. Negara sebagai solusi krisis lingkungan memiliki

peran untuk menerbitkan, mengimplementasikan, dan menegakkan kebijakan serta mendirikan lembaga-lembaga pemerintah. Namun dalam konteks politikal ekologi, maka negara sendiri dalam posisi dua peran yang kadang sering bertentangan, yaitu satu sebagai aktor pengguna dan lainnya sebagai aktor pelindung.

Pak Emil memberikan contoh kawasan hutan yang terdapat batu bara. Mana yang akan dipilih, lingkungan, pelestarian hutan atau batu bara. Siapa yang akan menang tergantung dari siapa Menteri yang ada disitu. Kalau Menteri atau pelindung lingkungan kuat maka kemungkinan akan mengalahkan aktor ekonomi. Hal ini akan tergantung dari interaksi antar kementerian.

2. Pasar terdiri dari 2 karakteristik, yaitu pertama pasar dimaknai sebagai pendekatan dan aktor (swasta). Sering kali dalam praktiknya kurang peduli lingkungan atau mengakomodasi kepentingan lingkungan melalui green wash atau mengembangkan green business. Sekarang sudah mulai berkembang menjadi *green business*. Kedua pasar sebagai instrumen sekarang sudah mulai berkembang seperti pembayaran atas jasa lingkungan (PES), ekolabeling, *transferable quota*. Beberapa hal dapat menyelesaikan masalah, tetapi beberapa hal tidak efektif.

Peran negara ada banyak keterbatasan termasuk juga terjadinya konflik antarnegara dan instansi. Kemudian pasar juga punya sejumlah kelemahan dalam instrumen. Kalau individual *transferable quota* itu diterapkan di berbagai tempat, ternyata membuat pengerucutan konsentrasi pemilikan kuota. *Transferable* terjadi karena mekanisme pasar. Ekolabeling sekarang sudah mulai berkembang dan kita perlu dukung gerakan pasar ini meski dalam beberapa hal kurang efektif.

3. Masyarakat dalam konteks tata kelola memang aktor yang paling lemah karena rentan terhadap perubahan lingkungan. Kita lihat tahun 2030, jumlah orang miskin hingga 100 juta jiwa. Harga pangan juga akan melambung 12% padahal 60% konsumsi orang miskin itu adalah untuk pangan. Ini adalah sebuah kondisi masyarakat yang memang rentan dan memang aktor yang relatif lemah dibanding yang lain.

Dalam berbagai perspektif, seperti *ecological modernization,* memang masyarakat itu lemah, miskin dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam perspektif lain, masyarakat memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki kekuatan pengalaman dalam mengelola sumber daya. Bahkan dalam konteks covid ini, orang sudah berpikir komoditi *base* untuk mencegah adanya covid.

Negara dan pasar punya keterbatasan. Maka masyarakat menjadi sebuah harapan. Namun demikian, masyarakat juga bukan tanpa masalah. Kita lihat praktik-praktik yang bagus, seperti masyarakat dalam pengelolaan laut yaitu Sasi di Maluku. Kemudian Awik-awik di Lombok dan Bali. Sangat bagus kombinasi antara adat dan sumber daya. Tetapi ada juga praktik yang tidak berjalan dengan baik sebagai bentuk kegagalan masyarakat.

Tata kelola baru harus kita ciptakan agar apa yang diharapkan Pak Emil Salim bahwa *sustainable development* harus dibangun pada 2045. Dalam komponen pengelola sumber daya alam, perlu ada sebuah pendekatan dengan perspektif *ecological modernization* dalam kerangka teoritik dan politikal ekologi. Dua hal yang seolah bertentangan, tapi sebenarnya dapat digabungkan. Pertama adalah dari aspek basis normatifnya yaitu keadilan ekologis. Kedua adalah basis saintifik-teknokratik, pendekatan konstruktivisme yang harus dibangun. Kemudian, basis regulatif, pendekatan inklusivitas, dan keadilan akses harus kita ciptakan.

Sebagai basis normatif, UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 harus kita perkuat, pertegas dan implementasikan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip keadilan itu harus tercipta dalam relasi negara, pasar dan masyarakat.

Basis saintifik, merupakan tantangan bagi kampus. Bagaimana kita sekarang harus mengembangkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya transdisiplin dengan ilmu keberlanjutan (*sustainability science*) yang memadukan sains dan pengetahuan lokal dengan prinsip inklusivitas dan keadilan. Tidak ekologikal sebagai monodisiplin dan tidak semata ekonomi sebagai monodisiplin tetapi sudah berkembang menjadi *ecological economics*. Karena yang berkembang adalah *sustainability science* yang tidak hanya ekonomi dan ekologi tetapi didalamnya ada sosiologi, antropologi, kemudian bidang lain termasuk bagaimana kita memasukkan apa yang dimiliki masyarakat. Masyarakat punya pengalaman untuk *local knowledge* dan sebagainya yang bisa dipadukan. Jadi, *sustainability science* menjadi pendekatan yang lebih terbuka untuk bisa merangkul berbagai perspektif.

Basis *regulative*, inklusivitas dan keadilan akses adalah sesuatu yang sangat penting agar akses itu benar-benar adil. Persoalan yang terjadi adalah ketimpangan di Indonesia, persoalan keadilan akses. Akses yang terbatas

bagi orang menengah ke bawah tapi akses yang semakin terbuka utuk menengah ke atas. Hal ini membutuhkan keadilan khususnya dalam mengelola sumber daya. Oleh sebab itu, perlu kita atur interaksi negara, pasar, dan masyarakat secara lebih inklusif, kemudian mengakomodasi prinsip keadilan tadi. Kalau kita bicara tentang tata kelola, pendekatan baru seperti *adaptive-network governance* menjadi penting seperti bagaimana kepercayaan (*trust*) harus dibangun.

Memang, pasar, negara, dan masyarakat serta *civil society* ini harus terbangun kepercayaan. Lalu instrumen kolaboorasi dan pengelolaan kolaboratif sudah menjdi tuntutan. Negara tidak bisa sendiri utuk mengelola sumber daya alam. Pasar tidak bisa sendiri utuk mengelola sumber daya alam. Manusia tidak bisa sendiri untuk mengelola sumber daya alam. Kita akan coba mencari titik temu dan kolaborasi beberapa proyek. Konservasi laut di berbagai tempat sudah menggunakan prinsip kolaborasi dan pengelolaan hutan. Hal ini adalah tren masa depan, dengan mencoba memasukkan unsur masyarakat sebagai bentuk inklusivitas kita.

Inilah *learning*, saling interindependen dan orientasi mutual benefit. Prinsipnya adalah tata kelola baru SDA

di Indonesia perlu mencari titik temu dan memadukan rasionalitas ekologi, rasionalitas ekonomi, rasionalitas moral, dan rasionalitas politik, sehingga *sustainability* bisa tercipta.

Pembangunan Berkelanjutan 2045 Tanggapan Atas Orasi 90 Tahun Prof. Emil Salim

Amanda Katili Niode, Ph.D.
Manajer Climate Reality Indonesia

Pola Pikir dan Interaksi dengan Alam

Sir David Attenborough, penyiar televisi dan naturalis Inggris yang sudah berkiprah selama 60 tahun mengatakan di World Economic Forum di Davos, bahwa manusia memiliki mekanisme penghancur yang mengerikan sehingga dapat memusnahkan makhluk hidup dan lingkungannya tanpa sadar. Para pemimpin dunia bereaksi sangat lambat terhadap krisis iklim. Ini karena sejak Revolusi Industri hubungan antara masyarakat perkotaan dengan alam semesta semakin menjauh, sehingga manusia tidak menyadari dampak tindakan mereka terhadap ekosistem global.

Melalui COVID-19, Planet Bumi memberikan pelajaran bahwa selama ini manusia menerapkan cara hidup individualistis yang mengabaikan nasib lingkungan hidupnya. Jika roda ekonomi tetap dijalankan seperti sekarang, Bumi akan terus menciptakan krisis demi krisis, seperti banjir, cuaca ekstrem, meningkatnya permukaan laut, gagalnya pasokan pangan, dan berjangkitnya lebih banyak virus.

Sebuah ulasan di majalah ilmiah Nature menyimpulkan, meskipun wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi dapat menjadi sumber bibit penyakit baru, semakin banyak

bukti bahwa hilangnya keanekaragaman hayati dapat meningkatkan penularan penyakit. Ilmuwan menyarankan untuk melestarikan daerah dengan keanekaragaman hayati endemik, yang hanya ada di wilayah geografis tertentu, agar prevalensi penyakit menular dapat berkurang.

Futurisme

Dalam buku "*The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis*," penulis Christiana Figueres dan Tom Rivett-Carnac merekomendasikan pola pikir untuk aktivisme iklim yang bertumpu pada tiga sikap: optimisme radikal, kelimpahan yang tiada habisnya, dan regenerasi radikal.

Optimisme radikal untuk memerangi pesimisme dan penolakan (*denialism*). Kelimpahan yang tiada habisnya, adalah perasaan bahwa ada sumber daya yang cukup untuk semua orang, untuk memerangi daya saing. Regenerasi radikal berarti merawat alam dan diri sendiri, untuk memerangi eksploitasi.

Setelah perubahan pola pikir ada transformasi menjadi aksi yang dapat dilakukan untuk menyikapi krisis iklim. Figueres dan Rivett-Carnac mengusulkan berbagai aksi, yaitu memandang masa depan, mempertahankan kebenaran, menganggap diri sebagai warga, penghijauan, investasi ekonomi bersih,

meningkatkan kesetaraan gender, menggunakan teknologi secara bijak, dan ikut terlibat dalam politik.

Futuris memiliki latar belakang keilmuan, menggunakan berbagai cabang pengetahuan, hasil penelitian, data, informasi ribuan publikasi, dan analisis berdasarkan trend yang berkembang. Ia cenderung mengambil perspektif yang lebih luas, mempertimbangkan cakrawala waktu yang lebih lama, dan memasukkan lebih banyak faktor dalam studinya dibandingkan analis ekonomi, spesialis teknologi, kritikus sosial ataupun komentator politik.

Rentang waktu yang disarankan oleh futuris untuk mempelajari skenario dan strategi masa depan adalah 10 tahun. Jadi di tahun 2020 ini, idealnya kita meneropong apa yang mungkin akan terjadi di tahun 2030.

Mengapa demikian, karena para ahli psikologi dan juga peneliti bisnis mempelajari bahwa manusia memiliki fleksibilitas mental untuk berpikir 10 tahun ke depan.

Sepuluh tahun adalah waktu yang cukup lama bagi kita untuk percaya bahwa segala sesuatunya bisa berbeda, misalnya untuk adopsi teknologi baru maupun untuk perubahan sosial.

Akan tetapi, studi dari Institute for the Future menyimpulkan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia sangat jarang berpikir tentang 10 tahun ke depan.

Krisis Iklim

Kurangnya pemikiran untuk masa depan mungkin dapat menjawab pertanyaan mengapa banyak yang mengabaikan krisis iklim saat ini yang dampaknya tidak saja merusak kualitas lingkungan, akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam, dan infrastruktur fisik.

Sebagai masalah lingkungan global, maka untuk menyikapi krisis iklim diperlukan mobilisasi sumber daya secara global pula melalui mitigasi (mengurangi level gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim akibat kegiatan manusia) dan adaptasi (meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim) yang ditetapkan melalui kesepakatan internasional.

Kesepakatan paling fenomenal sampai saat ini, tercapai pada tahun 2015, yaitu:

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals) guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan pada 2030.

2. Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) untuk memerangi perubahan iklim, melaksanakan berbagai aksi dan investasi menuju masa depan yang rendah karbon, berdaya tahan dan berkelanjutan yang diberlakukan pasca 2020.

Pengambilan keputusan kolektif global merupakan hal yang tidak mudah, karena menyangkut berbagai ma–salah teknis yang rumit, serta kepentingan ekonomi dan politik Para Pihak. Perundingan juga merujuk pada keputusan-keputusan pertemuan sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Kesepakatan internasional memerlukan ratifikasi dan pelaksanaannya pun memerlukan komitmen tersendiri dan pengawalan dari para pemangku kepentingan.

Birokrasi dan Masyarakat Madani

Problem lingkungan akibat kegiatan manusia umumnya disebabkan oleh penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, tanpa memikirkan generasi mendatang.

Selain itu juga karena limpahan pencemar yang melebihi kapasitas lingkungan untuk menyerapnya.

Berbagai masalah baru terus bertambah, bersamaan dengan gelombang data yang terus menyerbu, mencerminkan dampak kegiatan manusia yang semakin mencemari lingkungannya.

Kasus lingkungan lokal maupun nasional dapat digambarkan sebagai persoalan yang sehari-hari dialami langsung oleh masyarakat seperti pencemaran sungai dan polusi udara. Masalah lingkungan regional meliputi perkara antar negara seperti kebakaran hutan dan lahan serta masuknya sampah impor tanpa sepengetahuan negara penerimaannya. Sedangkan contoh masalah lingkungan global adalah krisis iklim, pemicu berbagai bencana yang mengancam penghidupan masyarakat.

Dimensi masalah lingkungan hidup, baik yang ada di tingkat lokal, nasional, regional maupun global jauh melebihi kemampuan hanya satu kementerian atau lembaga untuk mengatasinya.

Jika di masa lalu masalah lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya, kini

peranan pelaku di luar unsur pemerintah (aktor non-negara) semakin krusial. Mereka diperlukan untuk prakarsa kerja sama yang konkret, ambisius dan berkesinambungan.

Termasuk dalam aktor non-negara adalah kota, wilayah dan entitas sub-nasional lainnya, dunia usaha, masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan, pemuda, dan perguruan tinggi. Mereka dapat bertindak sebagai entitas individual atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

Walaupun peran aktor non-negara diakui, fungsi pemerin–tah dan koordinasi antar kementerian/lembaga mutlak diperlukan, karena dari situlah ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jika ditegakkan akan memberikan dampak positif lebih besar dibandingkan dengan hanya upaya seseorang, ataupun sebuah organisasi.

Call to Action

Kita semua dapat menetapkan "*call for action*" untuk melanjutkan "*legacy*" luhur Pak Emil menjaga Bumi ini dengan berbagai cara, antara lain:

1. Selalu mempelajari berbagai masalah, dampak, solusi dan aksi masalah lingkungan lokal, nasional dan internasional.

2. Selalu membina jaringan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan baik pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri dan mancanegara.

3. Selalu berbagi ilmu dan informasi dengan menulis, mengajar, dan membahas. Inilah, tindakan kepemimpinan dalam arti sesungguhnya.

Rumusan Diskusi

Webinar 90 Tahun Prof. Emil Salim
Pembangunan Berkelanjutan:
Menuju Indonesia Tinggal Landas Tahun 2045

1. Akar masalah dalam proses pengelolaan lingkungan di Indonesia yang menyebabkan kita masih terjebak dalam angka kemiskinan yang tinggi di tengah kelimpahan biodiversitas.
   - Konflik antara kepentingan ekonomi yang menghendaki diperhitungkannya aspek lingkungan yang biasanya disebut eksternalitas. Bisnis, kementerian ekonomi, teman-teman yang memutuskan keputusan ekonomi berada hanya pada alur ekonomi. *Cost, benefit,* manfaatnya, apakah *cost* bisa diturunkan, dampak pada eksternalitas, lazimnya tidak diperhitungkan. Karena itu, batu bara terbang cepat sekali, tinggi sekali. Benefitnya jelas uang. Bisa beli bukan hanya barang tapi juga kekuatan politik.

   - Ekonomi memiliki daya tarik sehingga menjadi akar masalah. Lingkungan tidak punya daya tarik sehingga kurang disenangi. Yang menyukai lingkungan adalah LSM dan NGO serta semua orang-orang yang kurang berada atau kurang uang karena tidak memperhatikan soal uang. Jadi ada konflik kepentingan antara *economic interest* dan *environmental interest*. Prof. Emil mengajak berpikir jangka Panjang karena *t* pada jangka panjang akan dihantam oleh *environnmental* yang tertinggal itu.

- Covid-19 adalah terganggunya ekosistem. Perubahan iklim akan menghancurkan keberlanjutan pembangunan, dalam jangka panjang. Bagaimana supaya orang bisa melihat. Bagaimana nasib anak-anak pada tahun 2045 jika perubahan iklim meledak.

- Akar masalah pengelolaan lingkungan ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif Malthusian menganggap bahwa aspek demografi, ledakan penduduk, sebagai krisis lingkungan, sehingga solusi Malthusian selalu teknologi. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah pencemaran dan sebagainya dengan solusi teknologi, ciri khas *ecological modernization*.

- Rasionalitas ekologi dan rasionalitas ekonomi merupakan sesuatu yang terpisah. Sehingga ini yang tidak pernah hadir dalam sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh swasta. Tapi sekarang sudah mulai *green industry* dan *green production* sudah mulai tumbuh luar biasa. SDG sekarang juga sudah mendorong agar swasta juga berkembang, sehingga muncul lagi istilah *green capitalism*. Karena kapitalisme itu dianggap kalau menurut perspektif *political ecology* sumbernya adalah kapitalisme.

- *Green capitalism* dalam konteks lingkungan dapat selesai tetapi dalam konteks *justice*, menjadi persoalan. Apabila menyingkirkan masyarakat akan terjadi konflik atau sebaliknya padahal sama-sama pro lingkngan. Oleh karena itu, dimensi *justice* itu menjadi penting. Perspektif politikal ekologi melihat akar persoalan adalah persoalan struktural, dari sisi paradigma pembangunan, *policy,* dan ketidaksetaraan relasi para aktor tadi. Masyarakat perlu dukungan NGO seperti KEHATI, media dan sebagainya supaya amplifikasi suaranya itu semakin besar dan kuat. Hal ini diperlukan untuk bisa menyeimbangkan antara suara suara dari aktor market dan pemerintah.

2. Satu dekade terakhir, Indonesia lebih fokus mengejar *economic growth* tapi abai dengan lingkungan. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan *economic growth* dan kelestarian lingkungan
   - Indonesia memiliki 429 Kabupaten dan hanya 85 yang zona hijau, sisanya terancam covid 19. Kesehatannya terancam dan terganggu kehidupan ekonominya. Bisa kah pemerintah dan organisasi non pemerintah memikirkan nasib 429 Kabupaten dimana 344 kabupaten berada pada zona merah, kuning dan oranye.

- Keberlanjutan mereka menjadi taruhan, melihat fasilitas Pendidikan, telekomunikasi, air bersih dan listrik. Pemerintah, pemerintah daerah dan NGO bisa bersama-sama memikirkan keberlanjutan dan survival dari 429 kabupaten ini. Hal ini mungkin bisa kita lakukan untuk menghindari konflik antara lingkungan dan ekonomi.

3. Penggabungan dua kementerian kehutanan dan lingkugan, apakah sudah tepat? Kementerian lingkungan itu sebagai kontrol pengendalian lingkungan dan pembangunan itu sendiri?

   Konsep *sustainable development* yang menghendaki passion sosial, ekonomi, dan lingkungan melebur. Pada saat Pak Wijoyo memimpin BAPPENAS, sudah menyatukan visi dari berbagai departemen. Kuncinya adalah bagaimana sosial, ekonomi dan lingkungan bersama sama. Jangan menteri ekonomi hanya memikirkan ekonomi saja, IKPN hanya memikirkan modal input saja, cara berpikir itu yang rusak. Hal ini bisa diatasi kalau BAPPENAS punya passion yang *integrated,* dan BAPPENAS harus memiliki posisi seperti Pak Wijoyo, didengar oleh presiden.

4. Perhitungan angka pertumbuhan ekonomi dan kerusakan

lingkungan.

- Perhitungan *resource depletion* dimana PPDB harus dikoreksi. Apabila prinsip keberlajutan dilanggar maka pertumbuhan ekonomi tidak akan sustainable. Hal ini sudah terbukti, pertumbuhan turun terus. Reratanya itu turun dari 8%, 7%, di era Pak SBY 6%, sekarang 5%.

- Pondasi yang lemah dan *recovery* yang lama menyebabkan negara selalu bangkit belakangan. Jangan percaya ada trade off antara lingkungan dengan ekonomi. Sama seperti covid, tidak ada *trade off* antara ekonomi dan kesehatan. Menyelamatkan ekonomi adalah menyelamatkan manusia.

5. Pola Pikir – *mind set*

Champion dan *policy* tidak akan menjadi action kalau tidak didukung dengan pola pikir yang sesuai.

Buku *The Future We Choose Surviving The Climate Crisis* yang ditulis oleh Christiana Figueres dan Tom Rivett-Carnac mencantumkan ada tiga pola pikir yang bisa mendukung.

Pertama, sudah dimiliki oleh Pak Emil, yaitu *radical*

optimism. Optimis untuk melawan para deniers dan mereka-mereka yang pesimis.

Kedua, *endless abandon*. Harus ada sense bahwa sebenarnya sumber daya itu cukup untuk semuanya. Tapi, bagaimana kita tentunya mengelolanya? *Mindset*-nya sudah ada bahwa sumber daya itu cukup untuk semuanya.

Ketiga, *radical regeneration*. Harus punya pola pikir untuk peduli pada alam dan tentunya pada diri sendiri dan sesama untuk melawan eksploitasi.

6. *Lesson learned* penting dari kejadian covid-19. Dalam perspektif pengelolaan lingkungan dan sosial budaya dan bagaimana *lesson learned* tersebut bisa didengar dan diakomodasi oleh pemerintah.
   - DPR dan Kabinet memiliki pola pikir seolah-olah covid 19 tidak punya dampak. Covid 19 dianggap selesai, terkendali dan gelombang turun lalu kita menghadapi *new normal*. Tidak disadari bahwa Covid-19 *is a wake-up call*. Covid-19 menggugah hal yang selama ini terabaikan yaitu kontak para hewan dengan manusia serta adanya gangguan ekosistem yang memicu covid-19. Ada tipe penyakit yang tambah lama tambah

sulit dikendalikan dan belum tentu ada obat yaang manjur. Yang paling sulit diketahui adalah orang tanpa gejala sehingga menambah kompleks hal ini. Hal ini memerlukan keterampilan, kemampuan, akal, pikiran, sains, teknologi, otak manusia.

- Oleh karena itu kita harus mengembangkan *human being* dalam konteks sosial yang berubah, yaitu *social distance*. Dengan demikian harus dicari cara-cara baru dalam berbisnis, belajar-mengajar. DPR maupun kabinet belum menyerap makna itu. Karena itu, kewajiban para akademisi, intelektual, masyarakat yang paham untuk mengingatkan covid-19 *is a wake-up call*, memberitahu ada kekurangan di dalam cara kita membangun. Belajar dari hal ini perlu dipahami dan diperbaiki pola pembangunan, tetapi intinya tetap gabungan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- Pada tahun 1962, ada buku berjudul "The Silent Spring" karya Rachel Carson yang mengungkap tentang musim semi yang sunyi di Amerika. Di mana setelah ditemukannya pestisida, maka tidak ada lagi suara burung dan serangga. Itulah awal mula krisis lingkungan di Amerika terjadi. Sekarang kita berada musim semi juga, *the silent spring* yang sama. Kalau dulu yang sunyi

adalah serangga dan burung, sekarang yang sunyi adalah manusia, karena manusia-manusia ada di rumah.

- *Wake up call* yang disampaikan Pak Emil sama dengan *re-install* pola adaptasi ekologi kita dengan alam ini. Jadi, sekarang kita sadar bahwa covid terjadi karena ketidakseimbangan alam. Sehingga sekarang tuntutan kita untuk menjaga harmoni, keseimbangan alam sudah menjadi keniscayaan. Kita juga sudah semakin harus hidup bersih.

- Dulu, orang selalu tidak paham tentang kampanye gizi seimbang. Sekarang tanpa ada kampanye masif, orang sudah sadar dengan gizi seimbang, makan sehat, gizi beragam, olahraga, berjemur, dan sanitasi. Jadi sekarang tidak perlu promosi tentang gizi pun orang sudah sadar. Proses *new normal* ini akan membuat kita *re-install* aspek sosial, ekologi, dan spiritual.

- *Lesson learned* dikaitkan dengan krisis iklim. Perlu ditekankan bahwa covid-19 ini bukan *suffer lining*. Jadi bukan hikmah atau solusi untuk masalah lingkungan karena kita harus tetap menanggapi krisis sosial, ekonomi, dan kesehatan. Tetapi *lessons learned*

adalah refleksi. Kita bisa refleksi secara mendalam kaitan antara masyarakat dan kerapuhan, ketahanan, dan ancaman sistematis. Selain itu, pandemi yang terjadi sekarang juga membuktikan pentingnya mendengarkan peringatan dini para ilmuwan, juga menggunakan saran ilmiah untuk memandu tindakan, tanggapan, dan kebijakan, serta berbagi informasi dan berkolaborasi lintas geografi. *Mindset* susah karena memang tidak digarap dan tidak ada yang mengadakan acara atau kegiatan atau studi tentang hal ini. *Lessons learned*-nya adalah dunia akan belajar menjadi lebih siap menghadapi krisis iklim yang sekarang memang sedang berlangsung terus-menerus.

7. Omnibus Law. Kaitan aspek lingkungan dan pembangunan
   - Esensi Omnibus Law memberantas bermacam-macam gangguan terhadap masuknya investasi dari luar. Jadi sangat mengatasi hal-hal yang dianggap mengganggu masuknya investor. Dalam dan luar negeri. AMDAL (analisis dampak lingkungan), air, sumber daya laut, dan sebagainya dianggap mengganggu investasi. Dan *growth* dianggap kuncinya *investment*. Jadi, sangat ekonomi materialistis *oriented*. Dampak pada lingkungan dan sosial dianggap tidak ada atau

mengganggu. Maka lahir suatu pola pembangunan asal tumbuh. Asal *growth* 7%, 8%, 9% itu tercapai. *Growth* menjadi tuan kita yang semacam Tuhan dan tidak dapat menjawab *growth* untuk apa, untuk siapa dan mengapa. Hidup manusia lebih dari *growth* ekonomi.

- Hal ini menjadi kerisauan Prof Emil Salim. Beberapa pertanyaan muncul seperti mengapa DPR tidak menangkap? Mengapa partai politik tidak mengerti bahwa pembangunan itu bukan hanya ekonomi saja? Manusia itu multidimensi. Membangun manusia sempurna. Hablum minallah, hablum minannas. Mengapa itu tidak belaku? Tidak disuarakan? Jadi, ada hal yang tidak betul dalam perkembangaan kedewasaan masyarakat kita. Kita ini seolah-olah menjadi masyarakat yang tumpul perasaan dan pikiran hanya materialistis *oriented*. Pada siapa menghasilkan devisa terbanyak, seperti kelapa sawit dan batu bara. Ada sesuatu yang salah dalam *value system* yang berkembang. Kalangan akademisi diharapkan dapat menggugah hati nurani bangsa. Bahwa kita ini bukan manusia materialistis.

- Terkait dengan lingkungan, UU Omnibus mengurangi partisipasi masyarakat, supaya *radical optimism* tidak muncul. *Radical optimism* menjadikan *people*

coming together, bahaya buat kepentingan modal dan kepentingan penguasa. Oleh karena itu, dalam kajian AMDAL, nantinya partisipasi masyarakat itu hanya masyarakat terdampak. NGO dan lembaga riset tidak boleh. Secara sistematik ujung-ujungnya mencengkram oligarki ini. *Radical optimism* ini sebenarnya masih bisa kita usung, mengingat kekuatan anak mudanya luar biasa. Menggugah nurani itu menjadi sangat penting. Dan syaratnya Kampus tidak menjadi bagian dari kekuasaan.

8. Peluang memanfaatkan bonus demografi bagi kemajuan bangsa dan persayaratan untuk menjadi bangsa unggul di masa depan (2030 atau 2045).
   - Dalam keadaan sekarang, ada titik terang di dalam menteri pendidikan yang mengerti permasalahan bangsa kita untuk maju. Menteri Pendidikan mempunyai pikiran, ide, gagasan, dan langkah-langkah yang perlu lebih banyak kita dukung. Kuncinya adalah *mindset* di dalam mengembangkan sumber daya manusia ini. Menteri Pendidikan harus diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Menteri pendidikan mengelola pola pendidikan yang memerlukan dukungan listrik, telekom, air, fasilitas, dan terutama dukungan anggaran. Oleh karena itu perlu dikembangkan di

kalangan pemerintahan pusat dan daerah, bahwa ingat kita punya 429 kabupaten yang hanya bisa ditangani pendidikannnya dengan *distance learning*? Bagaimana listrik, telekom, dan kemampuan lainnya.

- Pada jaman dulu masalah adalah buta huruf, kalau sekarang buta telekom. Maka harus didukung Menteri Pendidikan untuk mengembangkan telekom, listrik, dan lain-lain. Ini adalah sarana pembangunan bangsa, jangan menjadi objek komersial dan jangan dimonopolisir persoalan listrik hanya oleh PLN. Jangan hanya didorong penggunaan batu bara, tetapi juga penggunaan *solar energy, wind energy* dan sebagainya. Jadi ada suatu perubahan *mindset*, yaitu *Human resource development*. Yang menghendaki dukungan infrastruktur ini adalah 429 kabupaten dan desa. Kalau hal ini bisa kita dorong untuk dikembangkan pada masa ini, fokus pada generasi bonus demografi, maka pada tahun 2045, kita akan keluar dari ketertinggalan.

- Transformasi Pendidikan, harus menghasilkan lulusan-lulusan yang punya *growth mindset*, bukan *fixed mindet*. Suasana selalu berubah, butuh *mindset* yang terus berubah. Bonus demografi ini hanya bisa punya potensi besar pada tahun 2045 kalau orang-

orang yang hadir hari ini, sedang studi ini, adalah orang yang punya *growth mindset*. Berpikir tentang *future practice*, bukan *base practice* lagi. Sesuatu yang belum pernah ada. Itulah lompatan yang memugkinkan bangsa ini untuk maju luar biasa. Karena dia mampu menciptakan *future practice* dengan kreativitasnya. Oleh karena itu, hal ini yang harus didorong dalam dunia pendidikan. Mengintegrasikan sistem pendidikan dari dasar, menengah, tinggi dengan orientasi pada itu tentu dilandasi oleh integritas yang sangat kuat. Jadi, integritas menjadi basis dalam penguatan-penguatan lain, termasuk untuk memperkuat *mindset* tadi.

- Teknologi digital sangat diperlukan karena adanya covid-19. Mengacu pada pengalaman waktu yang diperlukan oleh *Facebook* memerlukan waktu 5 tahun dari didirikannya sampai mencapai 500 juta *user* dan membutuhkan waktu 7 tahun untuk mencapai 1 milyar user. Jadi memang ada waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan teknologi ini.

- Terkait demografi, kita harus melakukan dengan apa yang kita miliki, bukan mengeluh karena adanya kekurangan tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat. Agak susah

untuk menggeneralisasi bahwa masyarakat kita belum mampu, dan tidak *fair* karena dalam berkomunikasi dengan masyarakat selama 40 tahun terakhir, sangat jarang saya ditemukan mereka yang menyangkal keadaan yang terjadi. Banyak yang mendukung kebijakan pemerintah ataupun juga kegiatan masyarakat, asalkan tentunya diberi pendekatan pemahaman secara individu maupun komunitas.

- Kita harus tetap optimis karena Indonesia sebenarnya pondasinya begitu banyak kekayaan. Tidak perlu cari-cari lagi, tapi kita harus memaksimalkan apa yang sudah kita miliki. Bonus demografi, usia produktif, kreativitas anak muda kita, kekayaan alam, kekayaan lingkungan, keanekaragaman hayati seharusnya tidak ada hambatan membuat Indonesia itu bukan tinggal landas lagi, sudah harus terbang tinggi di langit yang kita harapkan semakin cerah, bukan semakin tambah polusinya.

9. Pesan Prof. Emil, otak kita harus terus-menerus mampu menjamin sustainabilitas pembangunan generasi demi generasi.

Tulisan Para Tokoh

Prof. Emil Salim: Keteladanan Abadi

Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Menteri Negara Lingkungan Hidup 1993-1998

Prof. Emil Salim adalah seorang pribadi yang menarik. Sehubungan dengan berbagai jabatan serta penugasan yang disandangnya sejak muda, Beliau bisa masuk dalam berbagai kategori, seumpama: aktivis pemuda, ilmuwan, politisi, birokrat. Demikian kaya rentang pengalaman dan variasinya. Namun, bagi saya sosok Pak Emil Salim yang menonjol adalah sebagai ilmuwan multidisiplin. Itulah sebabnya Pak Emil Salim begitu dikenal luas di luar negeri, karena pendekatan keilmuan yang disandangnya dibawakan dengan artikulasi yang jelas, tajam dan rinci, sekaligus dengan penguasaan bahasa yang sempurna.

Melalui Pak Emil Salim, Indonesia dipandang mempunyai kebijakan lingkungan yang progresif hanya beberapa tahun setelah Stockholm UN *Conference on Human Environment* tahun 1972. Berbagai apresiasi dan penghargaan internasional Beliau peroleh, meskipun di dalam negeri posisi lingkungan hidup sebagai kebijakan sangat kontras berbeda.

Pada tahun 1970-an, lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu yang asing karena khasanah pengetahuan tentang keanekaragaman hayati, klimatologi, pencemaran dan perusakan lingkungan, serta hal-hal terkait belum tersebar luas. Rawa *mangrove* dan rawa dataran rendah

dianggap sebagai lahan tak berguna, sehingga dikonversi menjadi tambak-tambak dan perkebunan berskala besar. Produk budidaya ikan memang melonjak tinggi, tetapi segera disusul oleh penurunan produktivitas yang tajam, serta tanda-tanda kerusakan lingkungan pun muncul. Pengalaman-pengalaman pahit kita lalui, karena ketidaktahuan dan ketamakan. Dibukanya perkebunan-perkebunan besar sering disertai konflik-konflik sosial dan memicu deforestasi berskala besar, dengan kerugian jangka panjang yang pada waktu itu belum diketahui.

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang baru berdiri belum sempat menyelesaikan kerangka regulasi yang efektif ketika itu. Bahkan di kalangan pengambil keputusan puncak di dalam negeri, lingkungan hidup hanya sekadar kebijakan tambahan yang ditempelkan pada kebijakan utama. Namun Prof. Emil Salim beserta staf dengan segala keterbatasan yang ada, melaksanakan hal-hal yang fundamental dan perlu diinisiasi. Dalam masa kepemimpinan Beliau, kita menyaksikan berdirinya berbagai Pusat Studi Lingkungan Hidup di beberapa universitas. Program-program terobosan diciptakan, seperti: Kalpataru dan Adipura, sehingga pemahaman lingkungan pun meluas. Masyarakat juga didukung untuk berperan dalam gerakan

lingkungan. Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lahir di Era Pak Emil Salim.

Jika kita lihat ke belakang dan mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Prof. Emil Salim beserta jajarannya semasa Beliau menjabat Menteri, dapat disimpulkan bahwa yang diupayakan pada waktu itu adalah memperkuat legitimasi lingkungan hidup dengan membangun kesadaran yang meluas. Prof. Emil Salim tidak terpaku pada kenyataan bahwa kabinet tidak terlalu responsif ketika itu. Legitimasi program dibangun sebagai pembuka mata, pikiran, dan hati orang banyak. Proses menjelmanya Adipura sebagai program kebanggaan Pemerintah Kota, Kabupaten, dan masyarakat merupakan contoh.

Pada tahun 1985, kebersihan Kota Padang yang dipimpin oleh Walikota Sjahrul Udjud menjadi berita "*viral*", demikian dalam istilah jaman sekarang. Segera Prof. Emil Salim mengambil inisisatif menggelar "Seminar Kebersihan Kota Gaya Padang" pada tahun 1986 di Bukittinggi. Dari seminar tersebut lahirlah gagasan pemberian penghargaan Adipura yang mendapat sambutan luar biasa dan menyebabkan berbagai kota dan kabupaten berupaya memperolehnya. Kebersihan lingkungan kemudian menjadi jalan masuk

sebagai awal pemahaman tentang lingkungan hidup yang lebih komprehensif. Cara yang sama ditempuh pada saat itu dengan melahirkan Program Kalpataru, kemudian Prokasih. Inilah yang disebut "*Programme Driven Policies*". Ciptakan dan laksanakan programnya, beri predikat yang menggugah, kemudian susun pengaturannya. Dengan demikian yang dikejar oleh Prof. Emil Salim adalah pengaruh, bukan kewenangan, karena sebagai Kementerian non Departemen, Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup tidak mempunyai kewenangan langsung. Dengan memperkuat pengaruh dan legitimasi, kementerian-kementerian sektoral akan "menari sesuai genderang yang ditabuh Prof. Emil Salim".

Dari keunggulan pengaruh dan legitimasi itu, akhirnya timbul potensi kewenangan. Untuk menampung potensi itulah, di era Prof. Emil Salim, dilahirkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sebagai sayap operasional Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Bapedal bersanding dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pimpinan Prof. Harjono Soejono, menangani program Keluarga Berencana dan juga sukses dengan menggunakan logika yang sama, yaitu menumbuhkan pengaruh dan legitimasi.

Di antara berbagai predikat yang dilekatkan kepada Prof. Emil Salim seperti ditulis di awal, Beliau antara lain disebut sebagai politisi. Hal tersebut masuk akal, karena Menteri adalah jabatan politik dan hal itu Beliau emban selama 20 tahun. Hal yang mungkin tidak banyak diketahui adalah bahwa Prof. Emil Salim juga aktif berperan setiap penyelenggaraan Sidang Umum MPR. Saya mengetahui persis mengenai hal tersebut, misalnya ketika menjelang Sidang Umum MPR tahun 1983 di mana saya menjadi Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan (FKP) Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai Sekretaris FKP-MPR, saya bertugas menyiapkan rancangan naskah-naskah kebijakan fraksi, baik untuk Sidang Badan Pekerja maupun dalam Sidang Umum MPR. Pekerjaan tersebut sama sekali tidak mudah, karena berkenaan dengan harmonisasi sekian banyak rancangan naskah yang perlu dirumuskan dalam bentuk final dengan mengindahkan berbagai masukan yang ada sekaligus memelihara konsistensi.

Pekerjaan Tim Sekretariat FKP-MPR dengan demikian sangat kompleks juga bisa sensitif. Dalam era digital seperti sekarang, pekerjaan tersebut banyak tertolong dengan "*copy paste*" secara elektronik. Dalam dekade 1980-an, "*copy paste*" berarti menggunting potongan-potongan kertas untuk direkat ke halaman yang tersedia,

menggunakan lem. Jika ada yang keberatan dengan naskah yang ditawarkan, proses "*copy paste*" harus diulang.

Di manakah Prof. Emil Salim ketika semua itu terjadi? Berbeda dengan banyak Menteri lain, yang juga merupakan anggota Badan Pekerja MPR dari FKP, Prof. Emil duduk, berbincang, dan ikut bekerja penuh waktu dengan anggota Sekretariat FKP-MPR. Tidak semata membatasi dirinya berkomentar tentang isu lingkungan hidup dan kependudukan, namun juga menyumbang pikiran yang membangun dan berguna dalam bidang-bidang lain. Berpartisipasi secara egaliter merupakan ciri langka dari para pejabat tinggi masa itu. Prof. Emil Salim menjalaninya dengan sukacita dan penuh semangat. Terkadang terjadi debat yang panas dan cenderung keras, itu pun dijalani dengan tenang. Beliau tidak pernah kehilangan keseimbangan menghadapi semua hal yang terjadi. Senyum selalu menghias wajahnya, sehingga orang yang marah-marah menjadi salah tingkah.

Prof. Emil Salim mohon pamit ke Presiden Soeharto karena merasa sudah terlalu lama berada di kabinet. Saya kemudian menggantikan Beliau sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 1993, walaupun sebelumnya

Presiden Soeharto memberi isyarat yang jelas bahwa Beliau tidak menghendaki saya berada di pemerintahan. Jauh hari kemudian, saya baru mengetahui bahwa masuknya saya ke kabinet merupakan saran Prof. Emil Salim kepada Presiden Soeharto.

Setelah mengamati langkah-langkah Prof. Emil Salim sebagai menteri dan menimba pengalaman bersama Beliau di Badan Pekerja MPR, saya merasa sangat terbantu dengan rintisan-rintisan berharga yang Beliau lakukan. Hal-hal yang dilakukan Prof. Emil Salim banyak miripnya dengan perjalanan saya di Golkar, seperti yang saya ceritakan dalam memoar saya "Menapak Koridor Tengah". Intinya adalah, peluang sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pengaruh dan legitimasi.

Dengan berbekal pada teladan Prof. Emil Salim dan mempelajari literatur lingkungan hidup, saya merasa cukup dibekali untuk melaksanakan tugas meneruskan apa yang telah Beliau rintis.

Prof. Emil Salim bisa dengan lega menjalani kehidupan sebagai seorang negarawan senior setelah selesai menjabat Menteri selama 20 tahun, karena telah meletakkan dasar-dasar kuat bagi penerusnya. Masa

senjanya pun masih diisi dengan jabatan sebagai anggota dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Sungguh suatu rekam jejak yang sulit ditandingi oleh siapapun, semuanya dilandasi oleh rasa hormat.

Selamat Ulang Tahun ke-90 Prof. Emil Salim, semoga selalu sehat dan mendampingi generasi penerus yang mendapat banyak sekali pembekalan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi acuan dalam Undang-Undang No. 04 Tahun 1982, dimana pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pada bulan Desember 1983, Sekretaris Jenderal PBB Javier Pérez de Cuéllar mengangkat Ketua Komisi Dunia Untuk Lingkungan Dan Pembangunan (WCED) yaitu Gro Harlem Brundtland dan Emil Salim sebagai salah satu anggota komisi tersebut. Komisi ini sempat bersidang di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 25-31 Maret 1984. Komisi ini menghasilkan laporan berjudul *Our Common Future* (Masa Depan Kita Bersama) yang memopulerkan serta mendefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, istilah pembangunan berkelanjutan juga populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dimana UU tentang Lingkungan Hidup selanjutnya menetapkan tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Emil Salim menyosialisasikan program-program pengelolaan lingkungan hidup kepada semua instansi terkait dengan menandatangani satu persatu pernyataan dukungan dari instansi tersebut. Bahkan

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi salah satu unsur dalam UU Pokok Pengelolaan Lingkung Hidup.

Dalam melaksanakan program-program lingkungan hidup, Emil Salim juga mengajak perguruan tinggi, pers, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis. Usaha tersebut mendapat dukungan dari negara-negara donor, antara lain Kanada melalui EMDI program, Jerman dengan GTZ, Denmark dengan Danida, Amerika Serikat melalui USAID, Australia melalui AIDAB, Jepang melalui JICA, serta dari World Bank, ADB, dan UNDP. Bantuan dari negara donor dan lembaga internasional pada saat itu menjadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan staf dengan dikirim belajar ke luar negeri, studi banding, dan pendampingan dalam pembuatan program dan peraturan perundangan. Peran Emil Salim juga tak lepas dari dibangunnya fasilitas informasi, laboratorium, dan pelatihan di Serpong yang dibangun dengan dana bantuan JICA, serta pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 di Cileungsi, Bogor dan Institusi Bapedal. Emil Salim sudah membangun fondasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya memerlukan kerja keras dan idealisme yang tinggi.

Diplomasi Emil menghadapi tekanan terhadap lingkungan hidup

Pada uraian ini, saya ingin menyampaikan kegigihan Emil Salim dan stafnya untuk menjaga upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan industri yang ramah lingkungan pada saat itu sangatlah belum populer. Dan yang paling sulit adalah industri-industri tersebut mendapat dukungan dari pejabat-pejabat yang berkuasa. Salah satu peristiwa tersebut adalah yang dialami oleh bagian Kementerian yang menangani dampak lingkungan terhadap suatu kegiatan di dekat danau Toba. Pada saat itu, Menteri PPLH (Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) melalui Amdal Industri tidak menyetujui dilakukannya kegiatan ini di dekat Danau Toba karena dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Kegiatan tersebut akan memanfaatkan Sungai Asahan di daerah hilir untuk PT Inalum. Dampak negatif lain yang dikhawatirkan yaitu potensi pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, eksploitasi pohon di sekitar Danau Toba dan risiko terjadinya kecelakaan karena jalan kecil. Namun instansi yang membidangi ekonomi sangat mengharapkan industri ini dibangun.

Pada rapat pembahasan masalah tersebut, Herman

Haeruman, Sudaryono dan saya sendiri mengikuti rapat karena Asisten Menteri II Kementerian Lingkungan Hidup Rachmat Wiradisurya sedang berada di Nairobi bersama Emil Salim. Dalam rapat yang diadakan di BPPT tersebut, nama-nama kami dicatat oleh Bakin. Hal ini mungkin dilakukan karena kami mempertahankan posisi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sementara BPPT dan instansi lain terkait pembangunan ekonomi mengizinkan dengan alasan bisa diatasi oleh teknologi.

Setelah Emil Salim Kembali dari Nairobi, Beliau memanggil saya untuk melaporkan hasil rapat. Kemudian Beliau langsung menelepon Menteri Sekretaris Negara, dan meminta agar pada saat rapat (tingkat staf), para staf dibiarkan berbicara bebas secara teknis dan transparan tanpa tekanan. Bila ada keputusan politis, Emil Salim menyarankan agar dibahas pada level menteri. Ketika menelepon, Emil Salim menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Bapak Moerdiono nama pemilik perusahaan tersebut. Dia mengonfirmasi apakah yang punya adalah om saya. Setelah pembicaraan via telpon tersebut, staf BPPT membahas teknologi, standar ling–kungan yang ditetapkan seperti sistem pemantauan kualitas lingkungan, emisi, efluen dan limbah B3 yang ditetapkan oleh KLH. Akhirnya, industri tersebut berdiri

dengan menaati standar-standar yang ditetapkan oleh KLH dan teknologi yang ditetapkan oleh BPPT.

Kasus lainnya adalah ketika Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Marjono (1985–1990) melakukan pengawasan terhadap industri-industri yang membuang limbahnya ke kali Surabaya. Terdapat satu industri kertas yang membuang limbahnya ke Kali Surabaya. Pencemaran ini sangat jelas terlihat air limbahnya yang berwarna hitam pekat. Namun, industri tersebut mendapat dukungan dari Menkopolkam Sudomo. Emil Salim meminta saya dan staf Asisten Deputi Dampak Lingkungan Hermien Roosita ke Surabaya untuk melakukan pemantauan dan mengambil sampel limbah, dan memotret keluarnya limbah cair ke Kali Surabaya. Hasil pemantauan ini dilaporkan dengan foto dan data kualitas air yang disusun dalam kertas karton, sehingga sangat jelas bahwa perusahaan kertas ini mencemari Kali Surabaya. Emil Salim meminta saya dan Hermien untuk menghadap untuk menjelaskan foto-foto dan data kualitas air limbah perusahaan tersebut. Sudomo terkejut dan menelpon perusahaan tersebut untuk mengolah limbah cairnya sebelum dibuang ke Kali Surabaya.

Setelah itu, dibuatlah perjanjian antara industri dan pemda tentang standar limbah cair yang wajib dipenuhi.

Perusahaan diberikan waktu setahun untuk membangun pengolahan limbah cair. Perjanjian dilakukan antara perusahaan dan Pemda Jawa Timur, disaksikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Kejadian tersebut menginspirasi terciptanya program kali bersih (prokasih). Emil Salim menekankan kepada kami staf Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan fakta dan data ketika mengkaji permasalahan lingkungan hidup perusahaan.

Selain masalah dampak lingkungan diatas, melalui Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang berisi persyaratan kawasan lindung untuk tata ruang, Emil Salim pada saat itu mempunyai konsep yang sangat jelas, yaitu jika persyaratan lingkungan dalam penataan ruang ditaati, maka upaya pengelolaan lingkungan selanjutnya akan lebih mudah.

Sebagai bagian pelaksanaan Kepres No. 32 Tahun 1990, diadakanlah penertiban Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur). Pada pelaksanaanya, staf KLH mendapat tekanan dari oknum legislatif. Namun demikian, program tetap berjalan dan Emil Salim merasa perlu melakukan kerja

sama yang kuat antar instansi terkait dalam penanganan tata ruang dengan dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN), dimana Emil Salim diminta untuk menjadi ketua. Namun, Beliau meminta agar jabatan ketua diemban oleh Menteri Bappenas, dan Beliau menjadi wakil ketua yang juga mengawasi pelaksanaan penataan ruang tersebut.

Pengalaman lain adalah pemberian AMDAL untuk membangun *real estate* di daerah pesisir oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Emil Salim meminta pihak pengem–bang untuk menangani persoalan genangan air sehingga tidak menyebabkan banjir. Permintaan dipenuhi, namun pemda kemudian mengubah kembali isi amdal tersebut setelah Emil Salim tidak menjabat, yang akhirnya memperkecil tampungan air. Alhasil, jalan tol menuju Bandara Soekarno–Hatta banjir dan pemerintah harus meninggikan jalan dan membuat jalan alternatif.

Pada tahun 1982, terjadi peristiwa penggiringan gajah sejumlah 232 ekor gajah yang masuk ke lokasi transmigrasi Air Sugihan ke Lebong Hitam sejauh 70 km. Awalnya, gajah-gajah tersebut akan ditembak, tetapi Emil Salim melaporkan peristiwa ini kepada presiden dan disetujui penggiringan gajah dilakukan dengan bantuan

TNI. Panglima Kodam IV Sriwijaya waktu itu Try Sutrisno memerintahkan Kol. IGK Manila Untuk memimpin ope–rasi penggiringan gajah dengan nama sandi Operasi Ganesya. Masuknya gajah ke pemukiman transmigran sebenarnya disebabkan oleh proses pembangunan yang mengabaikan hak hidup hewan dan tumbuhan, yang berujung pada pembabatan hutan, dan menurunnya jumlah keanekaragaman hayati.

Berbagai peristiwa diatas memperlihatkan upaya Emil Salim dalam pengelolaan lingkungan, guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Prioritas Sektor Ekonomi Menekan Lingkungan Hidup

Peristiwa demi peristiwa dimana sektor ekonomi menjadi primadona dalam pembangunan berkelanjutan dapat merubah warna peraturan perundangan di bidang ling–kungan hidup. Pada tahun 1994 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang pada salah satu pasalnya menetapkan larangan untuk impor limbah B3. Namun asosiasi pengusaha aki bekas meminta kepada pemerintah agar dapat impor aki bekas karena kekurangan bahan baku dalam negeri, yang dapat mengakibatkan industri daur ulang bisa tutup dan

jumlah pekerja yang akan menganggur cukup besar. KLH tetap bertahan dengan alasan bahwa industri daur ulang B3 sangat berbahaya dan beracun dimana pekerjanya tercemar oleh timah hitam. Hal ini didukung hasil penelitian PPSDAL, Universitas Padjajaran yang mendapatkan kandungan timah hitam pada darah pekerja industri daur ulang tersebut adalah 15 mg/dl – 60 mg/l, padahal standar yang diperbolehkan 20 mg/dl. Pengalaman negara lain seperti Taiwan yang menutup industri daur ulang aki bekas karena timah hitam dalam darah pekerjanya mencapai 80 mg/dl menjadi salah satu alasan dari larangan tersebut. Namun, KLH kalah dalam negosiasi tersebut, dimana PP No. 19 Tahun 1994 diganti dengan PP No. 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan pada peraturan ini dibolehkan impor limbah B3 untuk penambahan bahan baku industri. Lobi dari pihak asosiasi industri pengolah limbah B3 juga bisa mempengaruhi penyusunan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satu pasalnya melarang impor limbah B3, dan dapat diakomodasikan di dalam pasal mengenai ketentuan peralihan untuk dapat diberikan waktu penyesuaiannya selama 5 tahun.

Akibat dari kebijakan ini aki bekas di Indonesia menjadi *over supply* sehingga menjamurlah *illegal smelter* yang

menimbulkan masalah pencemaran tanah oleh timah hitam dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan pada pekerja dan masyarakat sekitar. Menurut KLHK (2020), tanah yang terkontaminasi timah hitam di tiga lokasi saja, yaitu Bogor, Tegal dan Jombang total luas areal yang tercemar mencapai 172.999,50 m^2, dengan berat 126.890,16 ton. Dan untuk dapat memanfaatkan tanah tersebut, harga pengolahannya saja Rp. 1,2 juta/ton, dan Rp. 700.000/ton kalau diolah di industri semen. Biaya tersebut belum termasuk biaya studi dan pengangkutan. Mengingat illegal smelter ini tidak ada yang bertanggung jawab, maka biaya pemulihannya harus ditanggung oleh Pemerintah melalui dana APBN. Biaya tersebut belum termasuk biaya yang ditanggung masyarakat karena menderita sakit akibat terkontaminasi oleh timah hitam.

Hal serupa juga terjadi pada pelarangan impor limbah plastik. KLH mempresentasikan keuntungan dan kerugian impor limbah plastik dihadapan institusi bidang ekonomi. Karena lebih banyak kerugiannya, maka rapat yang dipimpin Menteri Muda Keuangan menyetujui pelarangan impor limbah plastik melalui SK Menteri Perdagangan No. 349 Tahun 1992. Namun, karena resesi ekonomi tahun 1998, maka impor plastik bekas diizinkan kembali. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara nomor 2 setelah

China yang lautnya dicemari oleh sampah plastik. Kerugian dampak lingkungan pun menjadi beban pemerintah Indonesia.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) menyatakan bencana yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang pasang. Bencana ini merupakan akibat dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Pada Juli 2020, banjir bandang terjadi di Masamba Sulawesi Selatan dan membawa lumpur dan kayu gelondongan sehingga menyebabkan jalan trans Sulawesi lumpuh total, dan bandara ditutup selama 14 hari. Fasilitas umum juga terendam lumpur sampai ± 2m, aktifitas masyarakat terhambat, jembatan rusak, aktifitas ekonomi terhenti dan menggangu kesehatan masyarakat. Kejadian ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Dari masalah sosial khususnya kesehatan, menurut laporan GAHP pada Januari 2019, kematian akibat pencemaran bahan berbahaya dan beracun hampir 92% terjadi di negara-negara, seperti China, India, Nigeria, Bangladesh, dan Vietnam. Pencemaran tersebut bertanggung jawab

terhadap 1 dari 4 jumlah kematian.

Anak-anak memiliki risiko yang paling tinggi, karena dapat terdampak melalui dosis yang kecil. Pada saat ini, terjadi peningkatan penyakit tidak menular pada anak-anak seperti diabetes, kelainan nongenital seperti penyakit jantung bawaan, *down syndrome*, celah bibir, autism, leukimia dan banyak lagi, yang oleh para ahli disebut sebagai *silent epidemic*. Menurut data klaim BPJS ternyata penyakit tidak menularlah yang banyak diklaim masyarakat kepada BPJS seperti hipertensi, stroke, gagal jantung, diabetes.

Pencemaran udara di Jakarta pernah merupakan yang terburuk di antara kota-kota besar lainnya di dunia. Dari data yang ada, penyakit yang tertinggi di Jakarta Timur adalah ISPA, darah tinggi, diare dan penyakit kulit. Penyakit ISPA sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara.

Menurut KLHK pada tahun 2017, sebesar 73,24% sungai berada dalam status tercemar, dan terdapat 2,01% sungai yang memenuhi baku mutu air kelas 2. Limbah domestik merupakan penyumbang terbesar pencemaran air sungai. Terdapat 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas untuk dipulihkan di Pulau Jawa, antara lain DAS Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, dan Brantas.

Pada saat ini, pemerintah memfokuskan pada pemulihan sungai Citarum dari pencemaran yang biayanya kurang lebih 1 triliun rupiah. Itu pun dengan target pemulihan dari tercemar berat menjadi tercemar ringan. Hitungannya, pemulihan 15 sungai prioritas akan memakan biaya 15 triliun rupiah. Kerugian di atas belum termasuk yang disebabkan oleh kerusakan lahan dan hutan di Indonesia akibat eksploitasi hutan dan lahan. Data luasan kebakaran hutan dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2015, 2.611.411,44 ha, tahun 2016, 438.363,19 ha, tahun 2017, 165.483,92 ha, tahun 2018, 529.266,64 ha, tahun 2019, 1.649.258,00 ha dan tahun 2020, 8.253,00 ha.

Masalah kebakaran hutan dan lahan serta deforestrasi dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi gas rumah kaca dikhawatirkan dapat berdampak pada keberlanjutan persetujuan pendanaan dari *Green Climate Fund* untuk proposal REED+ yang telah diumumkan oleh Menteri KLHK, yang saat ini berjumlah 103,8 juta USD.

***

Pemerintah berharap Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Untuk menjadi negara maju di 2045, GNP Indonesia harus mencapai USD 23.199 per kapita (Bappenas pada rapat kerja dengan DPR 4/1/2020). Dalam upaya tersebut, maka diperlukan investasi ke Indonesia, sehingga dibuatlah draf UU Cipta Kerja. Yang mengejutkan, draf UU tersebut meniadakan izin lingkungan dan melemahkan pasal pengawasan dampak lingkungan dan upaya pencegahan masuknya *sunset technology* yang tidak ramah lingkungan di Indonesia.

Padahal, pengalaman Indonesia memperlihatkan bahwa mengabaikan faktor lingkungan hidup akan berdampak pada faktor sosial dan ekonomi. Di bawah ini gambar hubungan SDA, penduduk, pembangunan dan dampak lingkungan:

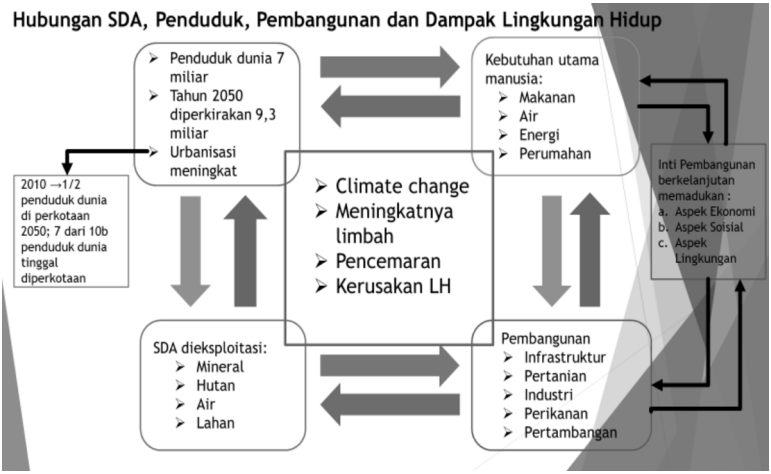

Gambar tersebut menunjukan, bahwa faktor-faktor lingkungan akan berpengaruh pada kegiatan pembangunan berkelanjutan. World Bank (02/07/2020) dalam laporan perekonomian *Prospects; The Long Road to Recovery,* menyorot tiga poin yang terdapat pada draf UU Cipta Kerja, yaitu klausul ketenagakerjaan, perizinan dan lingkungan hidup. Dalam aspek lingkungan, direlaksasinya syarat-syarat perlindungan lingkungan memiliki potensi mengganggu kehidupan masyarakat dan akan berdampak negatif terhadap investasi. Kemudian, dalam persyaratan lingkungan akan mendatangkan investasi yang tidak ramah lingkungan seperti *sunset technology*.

Tantangan ke depan lainnya yang semakin mengkhawatirkan, yaitu terjadinya *climate emergency* yang menyebabkan meningkatnya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Untuk mencapai Indonesia maju pada tahun 2045 mendatang, diperlukan kerja sama yang kuat, dan memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi. Hal ini diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang seimbang dengan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. *Plus* didukung dengan program yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, penanaman kembali,

pemulihan sungai, tanah, laut yang terkontaminasi, infrastruktur hijau, pengembangan *traditional knowledge* pada pembuatan obat dan makanan yang menggunakan biodiversitas, penanaman tanaman yang orientasi ekspor, pembangunan desa proklim, industri ramah lingkungan, serta ekonomi sirkular. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mendorong pendanaan hijau seperti *green climate fund, green loan* dan dana-dana yang mendukung ekonomi hijau.

Harapan kita semoga Indonesia pada tahun 2045 dapat tergolong sebagai negara maju dengan masyarakatnya yang adil dan makmur.

Pembangunan Berkelanjutan dalam Lingkaran Korupsi Sumberdaya Alam

Prof. Hariadi Kartodihardjo

Anggota Dewan Pembina Yayasan KEHATI,

Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB

Pada awal 1990an, ketika pembahasan pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Prof. Emil Salim diterapkan untuk sektor kehutanan, pilihan di saat itu tertuju antara lain pada usaha-usaha kehutanan berskala besar, baik berupa pengusahaan hutan alam produksi maupun usaha hutan tanaman dalam bentuk sertifikasi ekolabel. Dari pengertian umum mengenai "keberlanjutan" yaitu kemampuan suatu sistem untuk bangkit kembali dari guncangan dan tekanan, termasuk pengambilan dan pemanenan ke kondisi keseimbangan yang stabil, dijabarkan menjadi segenap kriteria dan indikator teknis mengenai batasan produksi, rehabilitasi atau pemulihan, kewajiban sosial maupun pengelolaan lingkungan hidup, yang wajib dilakukan oleh setiap usaha besar kehutanan.

Saat ini, setelah hampir 30 tahun kemudian, usaha-usaha besar itu bukan hanya tidak berkelanjutan, tetapi juga terwujud konglomerasi yang mematikan usaha-usaha hutan tanaman mandiri, ketimpangan usaha besar dan kecil serta terpinggirkannya masyarakat adat dan lokal maupun konversi hutan produksi menjadi tambang dan perkebunan kelapa sawit, baik melalui mekanisme legal maupun ilegal. Hutan alam produksi yang semula seluas sekitar 60 juta ha, kini di areal yang sama yang masih diusahakan hanya tersisa sekitar 32 juta ha (KLHK,

2019). Artinya, setiap tahun negara telah kehilangan fungsi hutan produksi sekitar 1 juta ha. Dalam laporan Asosiasi Pengusaan Hutan Indonesia (2019) juga disebut bahwa terdapat perusahaan hutan tanaman yang tidak lagi melakukan penanaman. Sebanyak 201 perusahaan dan terdapat 82 perusahaan hutan alam yang tidak lagi melakukan penebangan.

Kenyataan demikian itu setidaknya dapat ditinjau dari tiga hal. Pertama, pengembangan inisiatif keberlanjutan tidak dapat hanya dilihat pada lingkup perilaku internal pelaku usaha, kelompok masyarakat ataupun lembaga-lembaga negara secara terpisah, sebaliknya perlu tinjauan kebijakan serta teks peraturan (*rule in form*) maupun praktik bagaimana kebijakan dan peraturan itu dijalankan (*rule in use*). Kombinasi penggunaan teks dan praktiknya itu secara nasional selama hampir 30 tahun menunjukkan bahwa norma-norma praktis keberlanjutan tidak dapat dijalankan. Hal itu dapat terjadi akibat adanya faktor-faktor internal terutama yang terkait dengan rendahnya sistem insentif untuk melindungi sumberdaya alam ataupun buruknya tata kelola pemerintahan (*bad goverannce*) serta faktor-faktor eksternal seperti berbagai bentuk tekanan politik yang selama ini pembicaraan dan pembahasannya masih berada di luar konteks pembangunan berkelanjutan.

Praktik tata kelola pemerintahan yang buruk tersebut ditunjukan antara lain oleh hasil survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK (2018). Indikator SPI yaitu budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan SDM dan anggaran daerah, yang dilakukan terhadap 6 Kementerian, 15 Pemerintah Provinsi dan 15 Pemerintah Kota. Hasilnya menunjukkan bahwa di 15 lembaga itu seluruhnya terdapat perantara dalam pelayanan publik dan 17% pegawai di lingkungan itu melihat bekerjanya perantara itu. Untuk 10 pemda tertinggi penerimaan gratifikasi/suap dengan frekuensi semakin meningkat yaitu di Provinsi Sumatera Utara dan Papua. Adapun pengalaman pemerasan pengguna layanan dengan frekuensi semakin meningkat terjadi di Provinsi Riau, Papua, Banten dan Aceh. Dalam penilaian integritas itu juga diungkap pengalaman pegawai yang terkait dengan kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh atasan mereka, yaitu di Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Papua Barat. Di sisi lain, bagi pegawai Pemerintah Provinsi cenderung tidak percaya bahwa setiap pegawai yang melaporkan kejadian korupsi tidak akan dikucilkan, tidak akan diberi sangsi, serta karirnya tidak akan dihambat.

Praktik nyata hasil SPI itu dapat dilihat pada kasus adanya temuan DPRD Provinsi Riau yang disampaikan dalam

kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)—KPK, di Pekanbaru 2016. Temuan itu menunjukkan adanya 1,8 juta Ha kebun sawit ilegal, baik tidak memiliki izin, izin tidak lengkap ataupun kebun sawit di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh pemilik HGU tersebut. Kondisi seperti itu hingga saat ini tidak menjadi fakta yang diungkap untuk diselesaikan. Bahkan dalam penetapan Peraturan Daerah No 10/2018 mengenai Penataan Ruang Provinsi Riau, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun dan mendapat revisi perbaikan dari KLHK dengan menetapkan norma dan arahan penyelesaian masalah itu, diabaikan.

Kedua, pergeseran dari teks peraturan menjadi fakta-fakta pelaksanaan peraturan di lapangan tersebut sangat tergantung pada operasi kerja pemerintahan. Operasi itu tidak murni dipandu oleh garis-garis lurus komando ataupun tugas-tugas formal, melainkan secara internal ditentukan pula oleh sistem insentif yang bekerja di dalamnya. Misalnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, terdapat fenomena hutan dan sumberdaya alam lainnya dibawah penguasaan negara (*state property*), hingga saat ini belum pernah dibukukan sebagai aset. Kebijakan seperti itu dalam praktiknya cenderung menghilangkan tanggungjawab untuk melindungi aset itu. Misalnya dalam

pengelolaan hutan jati oleh perusahaan negara Perhutani di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu, jumlah sisa stok tegakan hutan jati di lapangan setelah ditebang selalu lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dan kondisi demikian itu tidak pernah membuat perusahaan menjadi rugi secara finansial. Artinya, kehilangan aset hutan di lapangan itu tidak pernah menjadikan perusahaan merugi, sehingga cenderung dibiarkan bahkan dapat dicuri sendiri oleh pengelolanya (Laporan Litbang KPK, 2016).

Atas dasar kenyataan seperti itu termasuk apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta berakibat hilangnya hutan produksi secara nasional tidak pernah masuk sebagai kerugian negara ataupun kerugian pengelolanya swasta, ataupun badan usaha milik negara sehingga secara *de facto* tidak ada yang bertanggungjawab. Dengan kata lain, kerusakan sumber daya alam tersebut bukanlah bagian dari *key performance indicator* swasta ataupun lembaga-lembaga negara. Bagi lembaga-lembaga negara cenderung untuk memaksimalkan input atau anggaran sebagai tolok ukur keberhasilannya. Sedangkan bagi usaha-usaha swasta cenderung mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan asset negara itu (KPK, 2018). Bagi pengelola hutan itu, situasi tersebut memungkinkan barang curian, dalam hal ini berupa

pohon, apabila ditemukan dapat menambah pendapatan perusahaan dan menghasilkan untung dan bukan kerugian.

Ketiga, banyak pertanyaan seputar hambatan perbaikan kebijakan mulai dari rendahnya *political will*, minimnya transparansi dan partisipasi publik, lemahnya penegakkan ataupun maraknya mafia hukum, sampai pada hal-hal teknis seperti ketiadaan data dan perencanaan yang baik, dapat dijelaskan dari hasil studi maupun telaah peraturan-perundangan dengan pendekatan telaah dampak isi peraturan terhadap terjadinya korupsi (*corruption impact assesment*). Hasil-hasil studi yang dituangkan dalam Jurnal KPK "Integritas" pada edisi khusus Desember 2019 menunjukkan bahwa telah terjadi korupsi melalui penangkapan kuasa negara (*state capture corruption*) yang menjadi penyebab hal-hal tersebut.

Hasil kajian KPK, 2016, 2017 dan 2018, mengenai sumbangan biaya Pilkada dan benturan kepentingan yang diakibatkannya, mengonfirmasi hal-hal tersebut. Calon kepala daerah (cakada) cenderung sudah diikat janji-janji oleh donaturnya, sehingga tidak bisa melayani kepentingan masyarakat luas. Sejumlah 70,3% hingga 82,6% cakada mengaku menerima dana dari donatur dan 56,3% hingga 71,3% cakada menyebut bahwa donatur akan

minta balas jasa ketika mereka terpilih. Atas permintaan itu, 75,8% hingga 82,2% cakada menyanggupinya.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa, walaupun kebebasan pengambilan keputusan bagi para pimpinan daerah sesuai peraturan-perundangan tetap dapat dilakukan, tetapi iklim paternalisme seperti telah menjadi desain bagi cara pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Dari kajian itu diketahui pula motivasi donatur dari hasil wawancara terhadap 286 informan (2016) dan 150 informan (2017). Sejumlah 61,5% hingga 76,7% dari jumlah donatur umumnya bermaksud untuk mendapat keamanan dalam menjalankan bisnis. Selain itu, 64,4 % hingga 73,3% donatur ingin mendapat kemudahan tender dari proyek pemerintah daerah dan sejumlah 63,3% hingga 73,0% ingin mendapat kemudahan akses perizinan. Motivasi donatur lainnya yaitu kemudahan akses untuk mendapat jabatan di pemerintahan atau BUMD (60,1% hingga 56,0%) serta mendapat akses untuk ikut menentukan kebijakan atau peraturan daerah (43,7% hingga 49,3%).

Berbagai keinginan tersebut memang cenderung dipenuhi oleh pimpinan daerah. Hal itu terbukti dari 88 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK selama periode 2004 sampai 2018. Tiga besar obyek yang diperkarakan yaitu

pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan sumberdaya alam.

Fakta-fakta demikian itu telah diketahui sebagai argumen bahwa berbagai perbaikan kebijakan yang sudah diusulkan oleh berbagai pihak ataupun dirancang oleh pemerintah sendiri, tidak dapat berjalan, karena berbagai inovasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah dihambat oleh berbagai isi peraturan-perundangan maupun masalah-masalah yang bersifat struktural yang sudah dirancang untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Hal itu nampak akan terus terjadi, karena skema permainan jenis korupsi seperti itupun diduga juga terdapat dalam proses penetapan isi RUU Cipta Kerja.

Dalam RUU Cipta Kerja itu, untuk bidang-bidang pendidikan tinggi, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta perizinan dasar dimuat berbagai perubahan sembilan undang-undang yang telah ada, sehingga bukan hanya mengubah secara mendasar nilai-nilai kehidupan, seperti dihapusnya landasan budaya bangsa dalam pendidikan tinggi tetapi juga mengecilkan peran perlindungan publik terhadap kelompok rentan, termasuk dipermudahnya konversi lahan-lahan pertanian subur maupun penyempitan peran masyarakat luas dalam keikutsertaannya melindungi

fungsi-fungsi lingkungan hidup (DGB-IPB, 2020; Kartodihardjo. 2020). Sebaliknya, kelompok-kelompok usaha swasta mendapat kemudahan untuk mendapat hak pemanfaatan atas sumberdaya alam, dalam kondisi ketimpangan alokasinya bagi masyarakat adat dan lokal. Ini artinya, peraturan-perundangan kontemporer saat ini dibuat hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, walau dengan nama menarik "Cipta Kerja".

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pembanguan berkelanjutan diperlukan tinjauan dan pendekatan secara terintegratif dengan pendekatan transdisiplin yang dikaitkan dengan lingkaran korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Apabila tidak demikian, berbagai konsep yang dijalankan tidak akan sejalan dengan fakta-fakta masalah yang dihadapi. Persoalan pokok untuk Indonesia kini adalah justru pada lemahnya pemahaman atas fakta masalah itu, sehingga terlalu mudah mengadopsi berbagai jenis instrumen berbagai negara untuk mewujudkan pembangunan ber–kelanjutan, yang, sebagaimana diuraikan di atas, terbukti gagal.

Tetapi Indonesia tidak terpuruk sendirian. Pada 1992, lebih dari 170 negara berkumpul di KTT Bumi Rio sepakat untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, mencegah gangguan berbahaya dari perubahan iklim, dan melestarikan hutan. Namun saat ini, 28 tahun kemudian, sistem alami yang menjadi sandaran umat manusia di dunia terus mengalami degradasi. Mengapa dunia tidak menjadi lebih ramah lingkungan meskipun telah ada puluhan perjanjian internasional, kebijakan nasional, undang-undang dan rencana-rencana lokal?

Dalam kolom Ideas and Debate, Business Daily, 3 April 2017 membuat tajuk "*Why sustainable development plans have failed*" menjawab pertanyaan itu, dengan meninjau 94 studi, bagaimana kebijakan keberlanjutan gagal di setiap benua.

Dalam tajuk itu disebut bahwa tiga jenis kegagalan yang terus berulang yaitu bidang ekonomi, politik dan komunikasi. Kegagalan ekonomi berasal dari masalah dasar bahwa kegiatan yang merusak lingkungan tetap dihargai secara finansial. Akibatnya, hutan bernilai uang lebih banyak justru setelah ditebang. Hal itu menjadi masalah khusus bagi negara-negara yang beralih ke ekonomi berbasis pasar. Kegagalan politik terjadi ketika pemerintah tidak dapat atau tidak akan mengimplementasikan kebijakan

pembangunan berkelanjutan secara efektif. Ini sering terjadi karena industri ekstraktif besar, seperti pertambangan, menjadi pemain dominan dalam suatu ekonomi dan melihat diri mereka yang paling dirugikan.

Kegagalan komunikasi berpusat pada konsultasi yang buruk atau keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Di berbagai negara, oposisi kemudian berkembang, kadang-kadang didasarkan pada kesalah-pahaman tentang keparahan masalah itu semakin mencuatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ketika masyarakat melihat keprihatinan mereka diabaikan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pada tingkat global, debat mengenai pembangunan berkelanjutan berujung pada proses transformasi politik. Ian Scoones (2016) dalam publikasinya "*The Politic of Sustainability and Development*" menyebut bahwa transformasi keberlanjutan semakin dipahami dalam kaitannya dengan proses perubahan jangka panjang dan lintas skala dari ketahanan sistem sosio-ekologis. Tantangan utama menurutnya terletak pada cara mengubah rezim kebenaran yang selalu mempertahankan cara pikir lama dan tidak sesuai dengan perkembangan kenyataan. Rezim kebenaran semacam itu tertanam dalam apa yang disebut

Peluso dan Watts (2001) sebagai rezim pengaturan yang menentukan siapa yang mengendalikan apa dan melalui bentuk pemerintahan mana.

Rezim pengaturan yang bertahan telah menciptakan pemerintahan "pasca-politik", yang semakin didominasi oleh aktor-aktor non-negara, termasuk perusahaan besar dan para elit politik. Di sini, orang dapat menjalankan kontrol negara, baik melalui kepentingan perusahaan swasta, elit global, nasional maupun lokal. Dalam hal ini, peran negara yang mewakili kepentingan publik telah dilemahkan atau dirusak. Fakta itu di Indonesia terungkap dalam rapat untuk mewujudkan inisiatif anti korupsi sektor bisnis di kantor KPK, pada akhir 2019, yang disebut bahwa selama periode 2004—2018, 80% kasus korupsi melibatkan sektor swasta dan sektor publik atau instansi pemerintah. Adapun urut–an tindak pidana korupsi dari 651 kasus berdasarkan profesi yaitu oleh swasta 25%, aparat pemerintah (eselon 1, 2 dan 3) 23%, DPR-RI/DPRD 20%, dan profesi lainnya seperti pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, hakim, komisioner, duta besar, dan lain-lain 32%.

Dalam konteks itulah, pada akhirnya politik transformasi menuju pembangunan berkelanjutan harus dipahami telah

dihambat oleh rezim akumulasi siapa mendapatkan apa dan bagaimana distribusinya. Ini telah diperluas untuk menjelaskan proses apa yang disebut Harvey (2005) dalam publikasi Ian Scoones di atas sebagai “akumulasi dengan perampasan” atau proses pengelolaan aset publik yang dilingkupi kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan, yang pada gilirannya mendorong akumulasi dan peningkatan ketidaksetaraan sosial.

Di Indonesia hal seperti itu dapat diketahui dari bagaimana masalah transaksi perizinan untuk menguasai aset publik dijalankan, termasuk penguasaan lahan ratusan ribu bahkan jutaan hektar oleh kelompok-kelompok usaha besar. Dari dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) 2018, misalnya, diketahui bahwa dalam satu tahun di suatu pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang jumlah semuanya 539, terdapat sekitar 77 sampai 192 investasi di setiap provinsi, kabupaten atau kota yang memerlukan studi AMDAL atau UKL/UPL. Itu artinya di Indonesia setiap tahun tidak kurang dari 40.000 studi lingkungan dilakukan, belum termasuk di Pusat. Dalam pembahasan inisiatif swasta dalam mencegah terjadinya korupsi perizinan terungkap bahwa dalam satu tahun potensi uang suap di seluruh Indonesia sekitar Rp 51 Triliun yang terkait dengan perizinan itu. Akibatnya berbagai

bentuk akumulasi kapital, pelanggaran tata ruang maupun perusakan lingkungan tidak menjadi perhatian.

Mengingat kondisi dan konfigurasi kekuasaan di Indonesia saat ini, perhatian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang telah digagas dan dijalankan oleh Prof. Emil Salim sejak 30 tahun yang lalu perlu dicurahkan terhadap perbaikan buruknya tatakelola, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan untuk melakukannya diperlukan pandangan dan tindakan kritis terhadap rezim pengetahuan, rezim pengaturan dan rezim akumulasi yang saat ini sedang terus bekerja.

Pembangunan Perikanan Berkelanjutan

Dr. Rony Megawanto

Direktur Program Yayasan KEHATI

Dulu, kita mengenal konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Konsep yang digagas dan diperjuangkan dengan gigih oleh Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dalam perjalanannya, konsep ini berganti dengan pembangunan berkelanjutan seiring dengan kesepakatan global dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992. Konsep pembangunan berkelanjutan yang disepakati dalam KTT Bumi ini mengacu pada *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang dikenal juga dikenal dengan Komisi *Brundtland*. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Emil Salim merupakan anggota dan tim perumus Komisi WCED.

Selain menyepakati konsep pembangunan berkelanjutan, KTT Bumi juga mennyepakati Agenda 21, yaitu program aksi global yang secara komprehensif mencakup semua bidang pembangunan berkelanjutan, termasuk perikanan. Bidang perikanan ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas (*high seas*) dan di wilayah yurisdiksi nasional.

Pada perikanan laut lepas, Agenda 21 memandatkan kepada semua negara pantai untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan perikanan, khusunya dalam pengelolaan ikan-ikan yang bermigrasi jauh (*highly*

migratory species) dan ikan-ikan yang bermigrasi terbatas (*straddling fish stock*). Sementara untuk pengelolaan perikanan di wilayah yurisdiksi nasional, negara pantai diharapkan memiliki komitmen untuk melakukan konser–vasi dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya perikanan di wilayah yurisdiksi nasional, mendukung keberlanjutan perikanan artisanal skala kecil, melarang praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*destructive fishing practices*), dan mengembangkan ka–wasan konservasi.

Agenda 21 terkait kelautan dan perikanan seperti gambaran diatas, pada dasarnya merujuk pada *the United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut Internasional yang disepekati tahun 1982. UNCLOS membagi laut ke dalam dua zona maritim, yaitu zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional dan zona-zona di luar yurisdiksi nasional.

Zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial (*territorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contigous zone*), Zona Ekonomi

Eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Sementara zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

UNCLOS memandatkan kepada negara pantai untuk mempromosikan tujuan dari pemanfaatan optimum sumber daya perikanan agar tidak terjadi penangkapan ikan berlebih, yaitu dengan menjaga stok ikan pada *level Maximum Sustainable Yield* (MSY).

UNCLOS juga mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish*) dan jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*). Karena itu negara pantai diminta untuk bekerja sama melalui organisasi internasional untuk menjain konservasi dan mempromosikan pemanfaatan optimum spesies-spesies tersebut, baik di dalam maupun di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

UNCLOS memberi mandat kepada negara pantai untuk melaksanakan konferensi tentang jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh. Karena itu,

pada Agustus 1995, ditandatangani A*greement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/ UNIA 1995).*

UNIA 1995 mengharuskan negara pantai dan negara penangkap ikan di Laut Lepas untuk bekerja sama melalui Regional Fisheries Management Organization (RFMO). Dengan mandat tersebut, saat ini telah terbentuk 17 RFMO di dunia, dimana Indonesia menjadi anggota di tiga organisasi RFMO, yaitu *Indian Ocean Tuna Commission*/ IOTC (Komisi Ikan Tuna Samudera Hindia), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*/CCSBT (Komisi Konservasi Ikan Tuna Sirip Biru Selatan), dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission*/WCPFC (Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah).

Sejalan dengan Agenda 21, UNCLOS, dan UNIA, Konferensi FAO tahun 1995 secara konsensus menyetujui *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) atau Tata Laksana Perikanan yang Bertanggungjawab. CCRF me–ngatur prinsip-prinsip dan standar internasional tentang perilaku praktik-praktik yang bertanggung jawab untuk

menjamin konservasi, pengelolaan, dan pembangunan sumber daya perairan yang efektif dengan memperhatikan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Dengan CCRF, negara harus mencegah tangkap lebih (*overfishing*) dan penangkapan ikan yang melebihi kapasi–tas (*excess fishing capacity*), dan harus melaksanakan langkah pengelolaan untuk menjamin upaya penangkapan seimbang dengan kapasitas produktif sumber daya per–ikanan tersebut dan pemanfaatannya yang berkelanjutan.

KTT Bumi tahun 1992, selain menghasilkan Agenda 21, juga menyepakati Konvensi Keanekaragaman Hayati (*the Convention on Biological Diversity*/CBD), yaitu kesepakatan global tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keragaman biologi. Otoritas tertinggi konvensi ini adalah *the Conference of the Parties* (COP) yang terdiri dari semua pemerintah yang telah meratifikasi kesepakatan, termasuk Indonesia. Pada pertemuan COP 10 di Jepang tahun 2010, disepakati Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati dan Target Aichi 2011-2020 yang terdiri dari 20 target.

Aichi Target 6 menyebutkan bahwa pada tahun 2020 semua stok ikan dan invertebrata dan tumbuhan akuatik dikelola dan ditangkap secara berkelanjutan, secara legal,

dan menerapkan pendekatan ekosistem, sehingga bisa menghindari *overfishing*. Rencana dan tindakan pemulihan terhadap semua spesies yang mulai dilaksanakan, kegiatan perikanan tidak berdampak signifikan terhadap spesies terancam punah dan ekosistem rentan, dan dampak dari kegiatan perikanan terhadap stok ikan, spesies, dan ekosistem berada pada batas-batas ekologi yang aman. Aichi Target 6 juga selaras dan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan, UNCLOS, CCRF, dan UNIA 1995.

Seiring dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, UN *Sustainable Development Summit* 2015 mengadopsi dokumen T*ransforming Our Wolrd*: 2030 *Agenda for Sustainable Development* sebagai dokumen agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Dokumen ini selanjutnya dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan/ *goals* dan 169 target. Pengelolaan perikanan terdapat pada Goal 14 berjudul ekosistem lautan (*life below water*): Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Perikanan di Indonesia

FAO mengevaluasi status pemanfaatan sumber daya ikan global berdasarkan perairan-perairan penting yang dikelompokan menjadi 16 perairan dunia dimana Indonesia masuk dalam kategori 2 wilayah perairan, yaitu Perairan Pasifik Barat Tengah (*Western Central Pacific*) dengan kode wilayah 71 dan Samudera Hindia Timur (*Eastern Indian Ocean*) dengan kode wilayah 57. Pengelompokan wilayah perairan FAO tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pada awalnya terdapat 9 WPP, namun kemudian berkembang menjadi 11 WPP yang terdiri dari 8 WPP dari kode wilayah 71 (Perairan Pasifik Barat Tengah) dan 3 WPP dari kode wilayah 57 (Samudera Hindia Timur).

WPP merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang menjadi dasar dalam penentuan status stok ikan di perairan Indonesia. Pemerintah secara reguler menyampaikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap WPP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Estimasi terakhir menunjukan bahwa stok ikan di perairan

Indonesia sebesar 12,5 juta ton per tahun (Kepmen 50/2017). Dari estimasi stok tersebut, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) atau *Total Allowable Catch* (TAC) ditetapkan 80%, sehingga JTB yang berlaku sebesar 10 juta ton per tahun. Tahun 2018, produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton.

Indonesia merupakan tujuh negara terbesar (*top seven*) penghasil perikanan tangkap dunia, bersama China, Peru, India, Rusia, AS, dan Vietnam. Produksi dari ketujuh negara tersebut mencakup 50% dari total produksi perikanan tangkap. Kontribusi China masih tertinggi yang mencapai 15%, sementara Indonesia tertinggi kedua dengan kontribusi sebesar 7%.

Catatan paling penting dalam pengelolaan perikanan adalah tingkat pemanfaatan atau level eksploitasi. Kepmen 50/2017 menunjukan bahwa semua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) mengalami *over-exploited* untuk jenis ikan yang berbeda. Demikian juga, semua jenis ikan mengalami *over-exploited* di WPP yang berbeda. Lobster, misalnya, mengalami *over-exploited* di 6 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 571, WPP 712, WPP 713, WPP 714, WPP 715, dan WPP 717.

Status *over-exploited* menunjukan tingkat penangkapan ikan yang telah melewati batas keberlanjutan atau melampaui *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Selain itu, ada juga tingkat *fully-exploited* (tingkat penangkapan berada pada *level* MSY) dan *moderate* (tingkat penang–kapan di bawah *level* MSY).

Pemahaman terhadap tingkat eksploitasi sumber daya ikan memudahkan pemerintah dalam mengelola sumber daya ikan. Kebijakan perikanan yang perlu diambil untuk sumber daya ikan yang telah mengalami *over-exploited* adalah mengurangi upaya penangkapan ikan, misalnya dengan mengurangi armada penangkapan ikan melalui instrumen perizinan. Upaya penangkapan dapat ditambah hanya untuk sumber daya ikan pada *level moderate*, sementara upaya penangkapan ikan dipertahankan dengan monitor ketat untuk *level fully-exploited*.

Menghilangkan *over-exploited* merupakan salah satu tujuan utama pengelolaan perikanan. Melakukan pembiaran atau menambah upaya penangkapan terhadap kondisi *over-exploited* akan menggiring perikanan menuju kehancuran (*collapse*) bahkan berpotensi terjadinya kepunahan spesies. Widodo dan Suadi (2008) mencatat perikanan beberapa negara yang pernah mengalami *collapse*, yaitu

perikanan cod di Kanada, perikanan anchoveta di Peru, dan perikanan hering di Laut Utara. Kondisi ini berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan dampak sosial-politik lainnya.

Stok sumber daya ikan yang telah mengalami tangkap lebih (*over-exploited*) menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun yang mengakibatkan pendapatan nelayan ikut menurun, dan selanjutnya berdampak pada tingkat kemiskinan nelayan. Konsekuensi dari kemiskinan adalah nelayan mencari jalan pintas melalui penangkapan ikan dengan cara yang merusak ekosistem laut (*destructive fishing practices*), seperti penggunaan bom dan sianida, yang menghancurkan struktur karang dan membunuh juvenil ikan. Kondisi ini menurunkan kemampuan sumber daya ikan untuk bereproduksi dan memperparah *over-exploited*.

Teori *Malthusian overfishing* menunjukan keterkaitan antara kemiskinan dengan *overfishing* dan *destructive fishing practices*. Pauly (1994) menjelaskan bahwa perikanan skala kecil di negara berkembang tropis umumnya miskin dan kurang alternatif pekerjaan lain, sehingga ketika mereka mulai menangkap ikan akan sulit berhenti meskipun sumber daya ikan menurun dengan

cepat sepanjang waktu. Jumlah nelayan biasanya juga meningkat, baik karena tambahan anggota keluarga yang menjadi nelayan maupun nelayan baru yang berasal dari sektor lain. *Malthusian overfishing* terjadi ketika tidak ada alternatif pekerjaan lain, sumber daya ikan menurun, dan terdapat penambahan jumlah nelayan. Dengan kondisi ini nelayan terpaksa melakukan penangkapan ikan yang merusak sebagai upaya untuk mempertahankan pendapatan. Dengan demikian terjadi lingkaran setan antara *overfishing*, kemiskinan nelayan, dan kerusakan ekosistem laut.

Karena itu konsep pembangunan perikanan berkelanjutan sebagaimana disepakati pada KTT Bumi, UNCLOS, CCRF, dan UNIA perlu diterapkan dengan disiplin. Tentu dengan mempertimbangkan aspek kelokalan setiap daerah. Demi kesejahteraan masyarakat masa kini, dan masa depan anak negeri.

Keanekaragaman Hayati Hutan: Mengapa Perlu Perlindungan?

Samedi, Ph.D.
Direktur TFCA Sumatera,
Yayasan KEHATI

Pak Emil Salim (Antara, 18 September 2008), mengatakan bahwa masa depan ekonomi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi akan bergantung pada sumber daya alam (SDA) hayati. Dalam tata kehidupan dunia masa depan, Indonesia akan mempunyai posisi tawar yang sangat tinggi, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga bagi peradaban manusia. Inilah mengapa keanekaragaman hayati Indonesia harus mendapatkan cukup perlindungan agar kemanfaatannya tetap dapat dipertahankan dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Keanekaragaman hayati akan menjadi fondasi ketahanan kesehatan dan pangan manusia serta energi terbarukan di mana manusia bergantung.

Pentingnya SDA hayati bagi umat manusia diakui masyarakat dunia, yang secara fomal telah menyepakati suatu perjanjian internasional di bawah payung PBB yaitu Konvensi mengenai Kenekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*/CBD). Preambul Konvensi tersebut mengakui bahwa keanekaragaman hayati merupakan penyangga kehidupan manusia. Namun pengakuan tersebut juga disertai dengan kekhawatiran terhadap tingginya laju kerusakan dan kehilangan keanekaragaman hayati yang sedang terjadi. Secara eksplisit CBD

menekankan pada kontribusi jasa ekosistem terhadap kesehatan, mata pencaharian dan kesejahteraan. Ke–anekaragaman sumber daya genetik, spesies dan mikroba memiliki properti obat-obatan yang dapat menyediakan solusi bagi isu kesehatan sekarang maupun masa depan. Berbagai komponen keanekaragaman hayati yang mengandung biomasa dapat dipakai sebagai sumber bahan bakar (*biofuel*). Berbagai spesies tumbuhan liar dapat dengan mudah dikonversi menjadi gula monomerik yang mungkin dapat dipakai sebagai stok produksi bahan bakar berbasis biomasa tanpa harus berkonflik dengan produksi pangan.

Hutan tropis merupakan salah satu komponen penting ekosistem pembentuk keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati hutannya, Indonesia menjadi tiga besar negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dan disebut sebagai salah satu *Mega Biodiversity Countries*. Namun demikian tingginya laju kerusakan dan kehilangan keanekaragaman hayati juga disumbang oleh tingginya deforestasi dan fragmentasi hutan Indonesia.

Tidak berlebihan apabila Pak Emil Salim mengatakan bahwa keanekaragaman hayati adalah masa depan umat manusia. Tetapi ini juga membawa konsekuensi agar kita

tetap dapat memberikan perlindungan dari kerusakan dan kehilangan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah bencana.

Hutan tropis Indonesia, pusat kekayaan keanekaragaman hayati dunia: dapatkah dipertahankan?

Kekayaan keanekaragaman hayati hutan tropis Indonesia beserta peran penting yang dimainkannya telah banyak didokumentasikan baik di tingkat nasional maupun global. Berbagai publikasi mengemukakan bahwa hutan hujan Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies. Daratan Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, tetapi Indonesia memiliki lebih dari 10% tumbuhan berbunga dunia, 12 % mamalia, 16% reptil dan amfibi, dan 17% burung. Banyak angka yang berbeda-beda yang menunjukan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan tropis merepresentasikan lumbung keanekaragaman hayati paling kaya di daratan yang memainkan peran utama dalam pengaturan iklim global. Hutan hujan tropis juga mendukung jutaan kehidupan masyarakat, serta merupakan sumber berbagai komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Telah banyak sumber daya manusia dan uang untuk melindunginya, namun kerusakan masih tetap berlangsung. Pertanyaannya, dapatkah peran penting

hutan tropis ini dipertahankan untuk masa depan?

Sampai saat ini masih terjadi diskrepansi mengenai data deforestasi di Indonesia, yang disebabkan oleh cara penghitungan dan data dasar (*baseline data*) yang dipakai oleh berbagai pihak berbeda. Tetapi yang jelas semuanya mengakui bahwa deforestasi masih tetap terjadi sampai saat ini. Sebagai gambaran, pada tahun 2000an LSM maupun Pemerintah sepakat angka deforestasi masih di atas angka 1 juta ha/tahun. Pada saat ini (2018/2019), Kementerian LHK mencatat deforestasi yang mencapai 0,46 juta ha.

Menelisik angka resmi Pemerintah terlihat bahwa deforestasi sampai saat ini masih tetap terjadi di atas 400 ribu ha per tahun walaupun pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan moratorium pengeluaran ijin-ijin baru di sektor kehutanan. Angka-angka tersebut membunyikan alarm yang mengkhawatirkan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Penyajian informasi keanekaragaman hayati yang spektakuler ternyata tidak terlalu memotivasi untuk melindunginya.

Bagaimana hutan tropis harus dilindungi:
konservasi di semua tingkat keanekaragaman hayati

Deforestasi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan fragmentasi habitat adalah penyebab utama ter–jadinya kepunahan spesies, selain perburuan dan per–dagangan. Mencegah kepunahan adalah tujuan utama dari konservasi keanekaragaman hayati. Walaupun pencegahan kepunahan berfokus pada konservasi di tingkat spesies, konservasi keanekaragaman hayati harus dilaksanakan di tiga tingkat keanekaragamannya, yaitu ekosistem, spesies dan genetik karena ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Konservasi di tingkat ekosistem. Letak geografis kepulauan Indonesia di wilayah tropis dan di antara dua benua dan dua samudera membuat Indonesia kaya dan unik dari segi bio-geografis. Bappenas pada tahun 1993 mengidentifikasi sedikitnya ada 47 tipe ekosistem yang masih dapat terbagi lagi ke dalam lebih dari 90 tipe ekosistem. Ekosistem yang paling kaya keanekaragaman hayatinya adalah hutan hujan tropis yang walaupun secara global hanya meliputi 7% permukaan bumi, ini mengandung paling sedikit 50% - 90% dari semua spesies tumbuhan dan hewan yang ada di dunia. Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mendesak negara anggota untuk paling tidak

mencadangkan 10% dari wilayah daratannya menjadi kawasan dilindungi. Perlindungan ekosistem harus dapat melindungi keterwakilan, memelihara keseimbangan, ketersambungan dan kemantapan ekosistem di dalam suatu jejaring kawasan konservasi. Kawasan konservasi menjadi satu-satunya harapan yang kita punya untuk mencegah terjadinya kepunahan spesies endemik atau spesies terancam punah.

Sayangnya, walaupun lebih dari 20 juta hektar wilayah terestrial Indonesia telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, seperti Taman Nasional, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sebagian besar kawasan itu berada di dataran tinggi. Padahal keanekaragaman hayati yang paling tinggi berada di dataran rendah. Permasalahannya, kita memerlukan daerah dataran rendah tersebut yang masih mungkin untuk dapat berfungsi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam kondisi seperti itu, diperlukan suatu sistem hukum untuk dapat melindungi kawasan yang telah dibebani hak untuk difungsikan sebagai kawasan perlindungan ekosistem penting tanpa mengorbankan hak atas lahan yang telah ada. Untuk mengakomodasikan hal ini diperlukan suatu sistem insentif dan disinsentif untuk

mengkompensasikan adanya pengurangan hak atas lahan yang telah diberikan. Dengan demikian konservasi di tingkat ekosistem pada kondisi saat ini masih belum cukup memadai. Kawasan konservasi perlu dikomplementasikan dengan kawasan produksi yang dapat dikelola untuk dapat berfungsi konservasi, agar Indonesia dapat tetap mempertahankan kekayaan keaneragaman hayatinya.

Konservasi di tingkat spesies. Ancaman terbesar dalam konservasi spesies adalah kepunahan. Sampai tingkat tertentu, kepunahan spesies secara alami dapat ditoleransi. Namun saat ini kepunahan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Agar tindakan perlindungan spesies dapat efektif, semua spesies perlu diklasifikasi berdasar status populasinya. Pada tingkat internasional, Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam (CITES) membagi status perlindungan spesies berdasar resiko kepunahan di alam yang diakibatkan oleh perdagangan internasional, ke dalam *Appendix*. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Konservasi No. 5 tahun 1990 hanya membagi status perlindungan spesies ke dalam dua kategori saja, yaitu dilindungi dan tidak dilindungi. Spesies yang dilindungi diikuti dengan pengaturan dan ancaman sanksi pidana

(maksimum 5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta). Namun, spesies yang tidak dilindungi tidak diatur ketentuan dan sanksinya. Klasifikasi spesies yang hanya dalam dua kelas tersebut menyiratkan kelemahan mendasar dari undang-undang. Terlepas dari kekurangan tersebut, konservasi di tingkat spesies harus mampu mengatur pemulihan populasi di habitat alami dan mengendalikan pemanfaatannya melalui sistem kontrol yang memadai. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi negara-negara anggota CITES agar perdagangan internasional tidak merusak populasi di alam (*non-detriment*). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, seperti PP No 7 tahun 1999 dan PP No 8 tahun 1999 telah mencoba untuk mengatasi kelemahan tersebut tetapi ternyata tidak cukup berhasil karena kelemahan ada pada undang-undang.

Konservasi di tingkat genetik. Perlindungan sumber daya genetik diperlukan untuk menghindari “pencurian” atau yang sering disebut sebagai *biopiracy* sumber daya genetik. Pemerintah harus segera membuat aturan setingkat undang-undang yang penting bagi Indonesia agar tidak hanya menjadi “pasar” bioteknologi yang justru bersumber dari negara seperti Indonesia.

Seperti dikatakan oleh Pak Emil Salim, masa depan umat

manusia akan sangat bergantung pada keanekaragaman hayati, khususnya genetik. Perubahan iklim global dapat dipastikan mengubah pola suplai pangan dan kesehatan dunia. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru seperti COVID-19 sangat membutuhkan temuan-temuan obat baru yang dapat dipastikan bersumber dari sumber daya genetik. Kekhawatiran yang muncul adalah kehilangan kesempatan mendapatkan obat-obatan atau varitas unggul baru karena sumbernya sudah hilang sebelum diketahui manfaatnya. Indonesia perlu segera menerjemahkan Protokol Nagoya yang telah disahkan hampir 10 tahun, ke dalam legislasi nasional untuk mengatur pemanfaatan dan melindungi sumber daya genetik.

Perlunya sistem hukum konservasi yang efektif: *non-sense,* konservasi tanpa pelibatan masyarakat

Perlindungan yang efektif bagi kelestarian jangka panjang keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, spesies dan genetik sangat diperlukan bagi masa depan umat manusia. Walaupun tujuannya sangat mulia, tindakan konservasi selalu mendapatkan tantangan yang besar yang disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi dan kejahatan.

Faktor sosial dan ekonomi merupakan faktor dominan yang menjadi tantangan besar upaya konservasi keaneka–

ragaman hayati. Pelaksanaan norma-norma konservasi yang secara hukum mengikat banyak mengalami hambatan di negara berkembang seperti Indonesia. Sistem hukum konservasi yang berasal dari negara-negara barat banyak menimbulkan konflik pada saat diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi kendala utama konservasi, sehingga tidak akan ada konservasi selama masih banyak masyarakat miskin dan tak terdidik di sekitarnya.

Permasalahan ini menjadikan konservasi tidak efektif, karena tindakan-tindakan ilegal menjadi sulit diatasi dan diperburuk dengan adanya "petualang tanah" (*free rider*) yang mengejar penggunaan (*rente*) tanah murah atau SDA murah di tanah negara dengan menggunakan masyarakat miskin sebagai latar.

Oleh sebab itu sistem hukum harus dibangun sesuai dengan kondisi setempat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pelaku konservasi yang disertai dengan penegakan hukum secara efektif. Untuk menghindari konflik dalam membangun konservasi, masyarakat harus terlibat di dalam semua aspek kegiatan konservasi seperti misalnya melalui konsep pengelolaan konservasi secara kolaboratif.

Selain tingginya peluang konflik dengan masyarakat, konservasi juga dapat tidak populer di kalangan unsur pemerintah itu sendiri. Disharmoni peraturan perundangan konservasi dengan peraturan sektoral sering terjadi, misalnya konflik antar peraturan perundang-undangan, konflik peraturan perundang-undangan dengan hukum adat, peraturan yang tidak konsisten, kekosongan hukum, dan konflik penataan ruang.

Secara yuridis, saat ini hanya ada satu undang-undang yang secara khusus mengatur konservasi sumber daya alam hayati yaitu UU Konservasi yang telah berusia 30 tahun. Telah terjadi begitu banyak perubahan lingkungan strategis nasional, baik sistem politik dan demokratisasi, serta berubahnya peraturan perundang-undangan sektoral, maupun perubahan lingkungan konservasi global. Terlepas dari keputusan Pemerintah dan DPR pada untuk menunda proses pembahasan revisi UU ini, melihat berbagai kekurangan mendasar dan kekosongan aturan, revisi UU ini dirasakan perlu untuk segera dilakukan. Ada beberapa undang-undang sektoral, misalnya perikanan, yang di dalamnya mengatur tentang konservasi sumber daya ikan. Namun banyak ketidakharmonisan UU ini dengan UU KSDAHE sehingga pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan kerancuan sehingga harmonisasi

tentunya menjadi hal yang harus dilakukan.

***

Pemerintah dan masyarakat madani telah banyak melakukan usaha baik biaya maupun tenaga yang sangat besar bagi konservasi keanekaragaman hayati. Namun kondisi di lapangan masih terlalu banyak masalah yang harus dibenahi. Pembenahan juga diperlukan di tingkat kebijakan seperti perbaikan sistem perundang-undangan nasional. Jika hal itu tidak dilakukan, kita semua patut khawatir jika pernyataan Pak Emil Salim mengenai keanekaragaman hayati adalah masa depan umat manusia, bisa tidak menjadi kenyataan. Semoga ini tidak terjadi.

Sertifikasi Berkelanjutan (*Sustainable Certification*): Sebuah Upaya Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Usaha Berbasis Lahan

Irfan Bakhtiar dan Metia Lembasi
Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS Indonesia)
Yayasan KEHATI

Pembangunan, Eksploitasi Alam, dan Sertifikasi Berkelanjutan

Pada tahun 2003 *Food and Agriculture Organization* (FAO) mencatat bahwa laju kerusakan hutan dunia khususnya di daerah tropis dalam 50 tahun terakhir adalah sebesar 0,22% persen pertahun (FAO 2003). Di Indonesia sendiri, pada periode 1009 – 2011, satu dekade setelah terjadinya *illegal logging* besar – besaran pada 1998 – 2001, angka deforestasi masih menyentuh angka 900,000 hektar per tahun (Dit IPSDH, Ditjen Planologi Kehutanan 2012). Kerusakan hutan dan dampaknya yang serius menjadi perhatian global yang kemudian menjadi topik utama dari agenda-agenda pemerintah dunia dalam 30 tahun terakhir. Beberapa sektor perekonomian yang turut berkontribusi pada kerusakan dan konversi hutan ini adalah sektor pertambangan, pengembangan infrastruktur, perkebunan, terutama kelapa sawit, dan sektor kehutanan itu sendiri, yaitu produksi kayu dan barang olahannya seperti kertas, furnitur, dll.

Untuk mencoba menekan kerusakan hutan dan lingkungan hidup, berbagai inisiatif dikembangkan oleh para pegiat lingkungan, pemerintah, dan pelaku ekonomi itu sendiri. Salah satu inisiatif yang terbentuk adalah dikembangkannya standar dan sistem sertifikasi berkelanjutan. Standar dan

sistem sertifikasi berkelanjutan ini banyak dikembangkan untuk pengelolaan hutan dan perkebunan, terutama sawit. Untuk pengelolaan hutan dan produk kayu, sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC) merupakan label terbesar di dunia. FSC merupakan sistem sertifikasi sukarela, yang mengandalkan pasar sebagai alat penekan pada produsen untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan dan hasil hutan. Di Indonesia, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dikenalkan pada tahun 1998 oleh Pak Emil Salim, Djamaludin Suryohadikusumo, dan para pegiat lingkungan sebagai sistem sertifikasi hutan ala Indonesia. Menyusul kemudian pemerintah Indonesia juga mengembangkan sistem sertifikasi wajib yang dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), meskipun di dalam skema tersebut juga terdapat standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Di sektor perkebunan, dikenal sertifikasi RSPO yang organisasinya didirikan pada bulan April 2004, dan pada tahun 2015 telah mencatat 20% produksi kelapa sawit di dunia telah mengikuti skema ini (Carlson et al. 2018). Sama dengan sertifikasi kayu, RSPO juga bersifat sukarela. Dua negara produsen kelapa sawit dunia, yaitu Indonesia dan Malaysia, sejak tahun 2011 kemudian mengembangkan sistem sertifikasi sendiri, yaitu ISPO

(*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan MSPO (*Malaysian Sustainable Palm Oil*) yang bersifat wajib (wajib), meskipun pada kenyataanya, terutama di Indonesia, belum semua produsen kelapa sawit telah mengikuti skema sertifikasi ini.

Bagaimana Sistem Sertifikasi Bekerja?

Pada dasarnya, sistem sertifikasi disusun dengan mengacu pada berbagai prinsip, kriteria dan indikator untuk menilai tiga aspek pembangunan berkelanjutan dan kelestarian yang ada, yaitu; (a). Aspek kelestarian produksi; (b). Aspek kelestarian lingkungan dan (c) Aspek kelestarian sosial.

Dalam implementasinya, sistem sertifikasi dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit atau pemeriksaan operasional unit manajemen berdasarkan prinsip dan kriteria sistem yang ada. Lebih jauh lagi, beberapa sistem sertifikasi, terutama sistem sertifikasi sukarela, seperti FSC, LEI (hutan) dan RSPO (sawit), juga mengembangkan mekanisme konsultasi publik untuk memastikan tidak ada keberatan dari ber–bagai pihak terkait seperti NGO dan masyarakat lokal atas dikeluarkannya sertifikat pengelolaan berkelanjutan.

Di pasar, sistem sertifikasi seringkali melengkapi dirinya dengan promosi, untuk menyampaikan kepada publik hasilhasil sertifikasinya. Penggunaan label sertifikasi seperti FSC, RSPO, ISO, VLegal, dan berbagai sertifikasi lainnya pada produk akhir merupakan salah satu alat bagi produsen untuk menyatakan dirinya diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, tentu masing-masing sistem sertifikasi juga melakukan upaya-upaya promosi kepada pasar untuk meyakinkan bahwa produk yang menggunakan label mereka telah memenuhi standar-standar keberlanjutan beserta indikatornya. Pada tahapan ini, sistem sertifikasi menjadi titik kompromi antara kebutuhan pelestarian alam dengan kebutuhan pasar. Para pelaku pengelolaan sumberdaya alam (lahan) didorong untuk memenuhi standar-standar keberlanjutan yang dibangun. Di sisi lain, konsumen, selain diedukasi dengan pentingnya jaminan pengelolaan berkelanjutan, juga ditawari dengan alternatif produk yang dijamin keberlanjutannya. Dalam sistem sertifikasi sukarela, ke–relaan unit pengelola hutan atau kebun tersebut akan mendapatkan *reward* dari konsumen dalam bentuk harga premium atau *premium price.* Dengan kata lain, konsumen harus rela untuk membayar lebih mahal produk yang dihasilkan dari pengelolaan yang berkelanjutan.

Sertifikasi: Alat Pasar atau Upaya Perbaikan Pengelolaan?

Kewajiban sertifikasi berkelanjutan pada awalnya di–bangun untuk memastikan dilakukannya pengelolaan sumber daya lahan (hutan dan kebun) dengan lebih memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, sudah seharusnya bahwa sertifikasi ini harus dapat memastikan pengelolaan sumber daya lahan yang lebih baik di lapangan. Salah satu perbaikan yang sudah terlihat terjadi adalah berkurangnya angka deforestasi di Indonesia. Terlepas dari berbagai kelemahan yang masih terjadi, sejak implementasi SVLK (dan PHPL) pada tahun 2009, telah terjadi penurunan *illegal logging* dan berdampak pada penurunan deforestasi di Indonesia. Angka deforestasi yang mencapai 1,6 – 1,8 juta hektar per tahun pada kurun waktu 1995 – 1998 (FWI, 2017), sudah berangsur–angsur turun. Pada tahun 2015 - 2016, tercatat angka deforestasi 630,000 hektar, pada tahun 2016 - 2017, tercatat 496,000 hektar, dan tahun 2017–2018, angka deforestasi Indonesia sudah ada di angka 440,000 hektar, meskipun pada periode 2018–2019 sedikit naik menjadi 462,000 hektar (KLHK 2020). Selain itu, dapat dikatakan bahwa kayu ilegal yang diperdagangkan keluar dari Indonesia semakin menurun dengan adanya kewajiban untuk diliput dengan dokumen V-Legal sebagai bukti bahwa setiap produk kayu yang keluar dari pelabuhan-

pelabuhan di Indonesia telah memenuhi seluruh ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Dari sisi pemasaran produk kayu, implementasi SVLK telah berhasil membuat Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) – *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade* (FLEGT) dengan Uni Eropa (EU). Dalam perjanjian tersebut, EU secara resmi mengakui sistem SVLK sebagai pembuktian legalitas kayu yang diperdagangkan di Eropa. Catatan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ekspor produk kayu Indonesia terus naik sejak diimplementasikannya SVLK, dari angka 6 miliar dolar Amerika pada tahun 2013 menjadi 11,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2018 (Kwan 2020).

Ilustrasi dari penerapan sertifikasi SVLK di atas menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi berkelanjutan yang bersifat wajib dapat memperbaiki pengelolaan sumbe daya alam, dalam hal ini hutan, dari sisi lingkungan dan ekonomi.

Situasi yang terjadi pada implementasi SVLK memberi secercah harapan bahwa sertifikasi berkelanjutan da–pat berdampak signifikan dalam perbaikan tata kelola kehutanan. Situasi yang sama juga diharapkan dapat

diwujudkan pada sertifikasi komoditas sawit dan komoditas lain yang bersinggungan dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Sertifikasi berkelanjutan, yang selama ini lebih banyak dimaknai sebagai alat pasar, ternyata juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik. Tentu saja, pasar tetap menjadi pengendali yang signifikan. Mulai terlihatnya hasil implementasi SVLK tidak terlepas dari rekognisi pasar Eropa, yang berimbas pada pasar yang lain, pada sistem sertifikasi ini. Ketika saat ini atau di masa mendatang rekognisi pasar itu tidak lagi didapatkan, atau pasar mulai meragukan kredibilitas sistem sertifikasi, hampir dapat dipastikan bahwa perbaikan tata kelola ini tidak dapat berjalan. Dengan demikian, memang kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan dalam penerapan sertifikasi berkelanjutan. Aspek pasar, dan perbaikan tata kelola sumber daya alam.

Tantangan Sertifikasi Berkelanjutan

Terlepas dari manfaatnya yang mulai nampak, sertifikasi berkelanjutan memiliki beberapa tantangan dalam imple–mentasinya. Beberapa tantangan implementasi sertifikasi berkelanjutan ini antara lain:

Insentif bagi pengelolaan berkelanjutan

Pemenuhan standar berkelanjutan seringkali bukan merupakan hal yang sederhana bagi unit pengelola sumber daya, baik hutan, kebun, ataupun industri pengolahannya. Terlebih lagi bagi unit pengelola yang berskala kecil. Belum lagi, pencatatan pemenuhan standar tersebut juga membutuhkan upaya yang tak kalah besar, bahkan harus menyediakan sumberdaya khusus, baik itu sumber daya manusia ataupun biaya. Itulah mengapa, pemenuhan standar sertifikasi berkelanjutan seringkali dianggap beban bagi sebagian unit usaha dimana unit pengelola dalam usaha ini mengharapkan adanya insentif untuk upaya keras mereka.

Sistem sertifikasi sukarela seperti FSC dan RSPO menawarkan adanya harga premium atau *premium price* di pasar, yang harapannya selisih harga premium ini akan terbagi rata sampai ke produsen di hulu. Para pelaku kecil, seperti petani hutan atau pekebun sawit, yang memiliki sertifikasi berkelanjutan, bisa mendapatkan insentif atas harga produk mereka, yaitu kayu atau tandan buah segar. Sementara itu, sertifikasi wajib, seperti SVLK dan ISPO tidak dapat menawarkan insentif berupa harga premium sering menjadi pertanyaan di kalangan pelaku usaha. Di satu sisi, mereka harus melakukan upaya sangat

keras, energi yang besar, dan biaya yang tidak murah untuk menyiapkan diri dan membiayai proses sertifikasi, namun tidak ada “insentif ekonomi” yang diterima. Untuk pemegang sertifikat SVLK, peluang pasar luas di Eropa sering dipertanyakan oleh pelaku industri kecil, karena untuk beberapa pasar, masih dibutuhkan lagi sertifikat wajib sukarela seperti FSC, yang membuat mereka harus memiliki dua sertifikat berkelanjutan, yang sebenarnya mirip-mirip saja. Situasai yang sama dihadapi oleh sertifikasi berkelanjutan di perkebunan sawit. Pemegang sertifikat ISPO, masih harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membiayai proses sertifikasi RSPO yang tidak murah.

Kemampuan unit kelola skala kecil untuk masuk dalam sistem sertifikasi

Bagi pelaku usaha skala besar, memenuhi standar berkelanjutan, meskipun tidak mudah, bukan merupakan upaya seperti “*mission impossible*”. Mereka cukup punya modal dan infrastruktur untuk memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan yang baik. Kemauan dan tekad “*owner*” atau pemegang saham pengendali saja yang menjadi kunci untuk penerapan standar berkelanjutan

yang ada. Berbeda halnya dengan pelaku usaha kecil, apalagi mikro. Menerapkan tata kelola yang baik pada unit kelola lahan ataupun industri kecil merupakan tantangan yang sangat berat. Selain biaya dan sumber daya manusia yang harus disiapkan secara khusus, pemenuhan standar kelestarian harus dilakukan dengan mengubah sistem kelola usaha mereka, karena dalam sertifikasi berkelanjutan, tidak hanya praktik berkelanjutan yang penting, namun pendokumentasian atau pencatatan praktek itu menjadi sangat penting untuk proses audit (Putri dan Bakhtiar, 2017).

Pada unit manajemen lahan, misalnya kebun sawit rakyat, sistem yang rapi dan tercatat juga menjadi "barang yang baru" untuk mereka. Mengelola kebun dalam sebuah unit manajemen atau kelompok bersama-sama dengan pekebun lain, juga merupakan tantangan yang tidak mudah. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pelaku usaha kecil dan rumah tangga, tentu tidak dapat dibiarkan sendiri. Harus dibangun mekanisme pendampingan yang generik, yang layanannya dapat diberikan kepada unit kelola skala kecil untuk sertifikasi berkelanjutan. Tentunya, oleh pemerintah.

Keterlibatan berbagai institusi negara terkait dalam

prakondisi dan implementasi sistem sertifikasi ber–kelanjutan, baik yang wajib ataupun sukarela, seringkali menghadapi tantangan dari sisi layanan institusi negara. Masih banyak dijumpai di lapangan, bagaimana institusi negara yang seharusnya menyediakan layanan bagi masyarakat, malah menjadi beban tambahan bagi warga. Salah satu yang masih saja terjadi adalah layanan pendaftaran dan perizinan. Pelaku usaha, terlebih usaha kecil, baik itu industri kecil ataupun kebun sawit rakyat, banyak yang memiliki tantangan dengan "legalitas" keberadaan usaha mereka. Pada industri kayu misalnya, perizinan merupakan rezim tersendiri yang sering menjadi penghalang bagi para pelaku usaha.

Pada kasus kebun sawit rakyat, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang merupakan tanda dari legalitas usaha, dan salah satu "*killing indicator*" dalam proses sertifikasi berkelanjutan, seringkali menjadi hal yang sangat rumit. Meskipun dalam peraturan di tingkat nasional jelas-jelas disebutkan bahwa STDB merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mendata dan mendaftar kebun rakyat, dan bukan merupakan izin, namun pada praktiknya, pengurusan STDB ini banyak diperlakukan sebagai izin yang prosesnya sangat berbelit-belit.

Dua kasus di atas hanya merupakan gambaran betapa dukungan dari instansi pemerintah terkait sangat dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya sertifikasi berkelanjutan, baik yang wajib, ataupun sukarela. Dukungan ini terutama dibutuhkan bagi usaha skala kecil, baik industri ataupun unit kelola lahan, untuk bisa masuk dalam sistem sertifikasi.

***

Sertifikasi berkelanjutan, sedikit banyak, telah menunjukkan manfaatnya bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya berbasis lahan. Meski demikian, banyak keterbatasan dan banyak tantangan untuk bisa melaksanakan sertifikasi berkelanjutan ini. Sertifikasi juga mempunyai banyak keterbatasan, dimana sertifikasi hanya merupakan salah satu instrumen yang tertarget dan bukanlah "*panacea*" untuk menyelesaikan semua permasalahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada.

Pemerataan dan Keberlanjutan, Jauh dari Kenyataan

Najelaa Shihab

Seorang pendidik yang telah mendirikan dan menginisiasi organisasi pendidikan sebagai bentuk kontribusi dalam reformasi pendidikan Indonesia yang utuh melalui karya-karya nyatanya

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, bukan hal baru dalam percakapan ekosistem belajar-mengajar di negeri ini. Tetapi, sebagaimana banyak perubahan dalam pendidikan, masih banyak sekali miskonsepsi yang menyelimuti konsep ini. Salah kaprah yang utama adalah kecenderungan membatasi definisinya sebatas pendidikan lingkungan hidup, khususnya terkait perubahan iklim atau mata pelajaran sains dan geografis di sekolah semata.

Pemahaman tentang bidang studi interdisipliner juga pembudayaan integrasi nilai dan etika dalam pembelajaran, masih langka dilakukan oleh satuan pendidikan. Sebagian besar percakapan tentang daur ulang sampah contohnya, terjadi hanya di salah satu tema pelajaran pengetahuan alam, ditanyakan saat ujian, tapi tidak dikaitkan dengan pola konsumsi masyarakat di pelajaran ekonomi, analisis pesan iklan yang tak ramah lingkungan di pelajaran bahasa, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di pelajaran agama, apalagi praktik nyata audit jejak karbon dari makanan yang disajikan di kantin sekolah. Tak heran, prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada perubahan perilaku, penumbuhan keterampilan dan sikap untuk terwujudnya kompetensi yang utuh, masih sulit diimplementasikan. Prestasi murid kita di banyak sekolah dan madrasah masih sebatas

pada menjawab ujian di atas kertas, sekadar hafalan pengetahuan dan belum menuju pada penalaran tingkat tinggi dan kemampuan melakukan *transferrability* dari apa yang dipelajari ke berbagai situasi. Hasil asesmen AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) maupun hasil tes PISA (*Program of International School Assesment*) terus menunjukkan, bahwa krisis pembelajaran dan kualitas capaian lulusan pendidikan kita masih jauh tertinggal.

Tantangan bagi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bukan hanya soal prinsip pedagoginya, tetapi soal paradigma. Tujuan pendidikan adalah pemberdayaan, sebagai jembatan untuk masa depan. Belajar-mengajar perlu pelibatan anak yang merupakan subjyek dari proses dirinya. Ini berarti semua orang dewasa disekelilingnya perlu percaya; anak adalah warga negara dan warga dunia di saat ini, yang perlu didengarkan, mendapat validasi atas apa yang dirasakan, mendapat kesempatan beraksi dan melakukan refleksi sepanjang pembelajaran. Data dari Komunitas Guru Belajar di ratusan kabupaten/kota yang diinisiasi Kampus Guru Cikal menunjukkan, hanya kurang dari 7% murid yang menyatakan bahwa materi yang dipelajari sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai tingkat kesiapan dan peminatan.

Pendidikan harus relevan untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Kenyataannya, standardisasi masih sangat sering dipertentangkan dengan kontekstualisasi dalam proses pendidikan saat ini. Akibatnya? Kesenjangan akses dan kualitas menjadi kegawatdaruratan utama pendidikan kita hari ini. Sebagian besar kita masih memelihara persepsi bahwa pemerataan berarti menyamaratakan proses belajar semua anak. Padahal, meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan justru berarti memberikan intervensi yang berbeda pada input dan proses, sesuai konteks masing-masing, agar hasil belajar setiap murid sebagai output dari pendidikan berkualitas bisa sama baiknya.

Salah satu hal utama dari Prof. Emil Salim yang saya pelajari, adalah dorongan terus menerus tentang perlunya pola dan kebijakan pembangunan yang tidak hanya menekankan laju tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga mengutamakan penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan antar penduduk Indonesia yang lebih adil. Sebagai pendidik, saya yakin pintu awal memulainya adalah memenuhi janji terkait akses dan kualitas pendidikan untuk semua dan setiap anak, yang masih sulit terwujud selama ini, dan menjadi makin jauh setelah pandemi. Walau isu kesempatan

pendidikan tidak terkait langsung dengan wabah, satu hal yang terjadi di banyak negara, kesenjangan terlihat semakin nyata.

Jangankan mempraktikkan, selama ini, menyepakati prinsip tentang pemerataan saja masih jadi perdebatan. Saat fenomenanya terlihat di pelupuk mata, pada pembelajaran jarak jauh yang terjadi kepada tetangga atau kerabat di desa dan ibukota, saya berharap penuh bahwa semua pemangku kepentingan pendidikan mengakselerasi berbagai langkah penting untuk mengatasinya.

Kesenjangan kesempatan pendidikan, terjadi karena berbagai hal, bukan hanya *socioeconomic status* (SES), tetapi akibat adanya disparitas geografis (rural, urban, Jawa, luar Jawa, dsb), gender, kondisi disabilitas, suku dan agama. Namun, beberapa kajian menunjukkan keterkaitan yang kuat antara SES dengan faktor-faktor lain di atas (mis. SES dengan kesempatan pendidikan anak perempuan, di mana risiko anak perempuan tidak sekolah berkaitan dengan SES mereka).

Miskonsepsi juga mendominasi isu pemerataan ini. Pema–haman dan pengalaman tentang prinsip keadilan yang salah, bahwa murid mendapatkan kesuksesan karena berjuang, dan gagal karena malas. Padahal, kalau saja kita lebih

reflektif, ada begitu banyak faktor di luar kendali anak yang secara signifikan berkaitan dengan capaian pendidikan. Misalnya lokasi tempatnya dilahirkan, di keluarga dengan status ekonomi seperti apa ia besarkan, jenis kelamin atau disabilitas yang minim dukungan. Semua faktor ini menjadi sumber dari kemewahan yang saya, dan mungkin sebagian besar pembaca dapatkan tanpa perlu diusahakan, dan jarang kita akui dalam percakapan atau dijadikan pertimbangan dalam perancangan kebijakan pendidikan.

Tahukah Anda? Anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera 1,3 kali lebih besar peluangnya untuk mengikuti PAUD dibandingkan anak-anak dari keluarga termiskin (*World Bank*, 2019). Padahal PAUD yang berkualitas dapat membantu anak untuk siap sekolah (*school readiness*) atau kesuksesan belajar di jenjang-jenjang berikutnya.

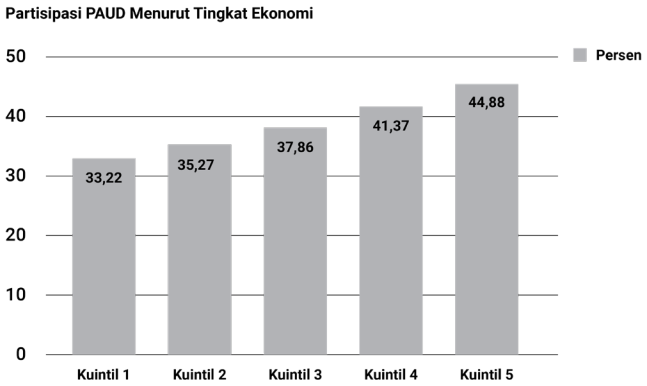

Bayangkan angka ini akan makin menurun setelah wabah, di saat corona membatasi kesempatan balita bermain dan belajar di luar rumah.

Sadarkah kita? Angka putus sekolah juga jauh lebih tinggi di kalangan murid miskin. Hanya 13% dari kelompok miskin yang dapat menuntaskan kelas 12 SMA/SMK/ Madrasah Aliyah.

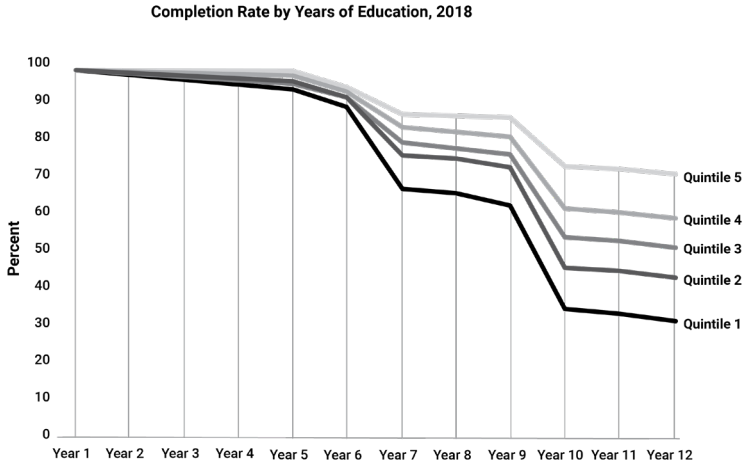

Source: Susenas 2018

Hasil pendataan di berbagai negara sudah menyatakan, bahwa tingkat putus sekolah di negara miskin dan berkembang meningkat tajam setelah penutupan sekolah, yang sering kali sama dengan libur berkepanjangan untuk murid-murid yang tidak mendapat dukungan pembelajaran jarak jauh.

Akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia, masih didominasi kelompok masyarakat yang lebih sejahtera.

Kualitas hasil belajar, dari tes internasional PISA yang dianalisis World Bank menunjukkan bahwa secara sis–tematis, performa murid dari keluarga yang lebih sejahtera lebih baik daripada murid dari keluarga miskin.

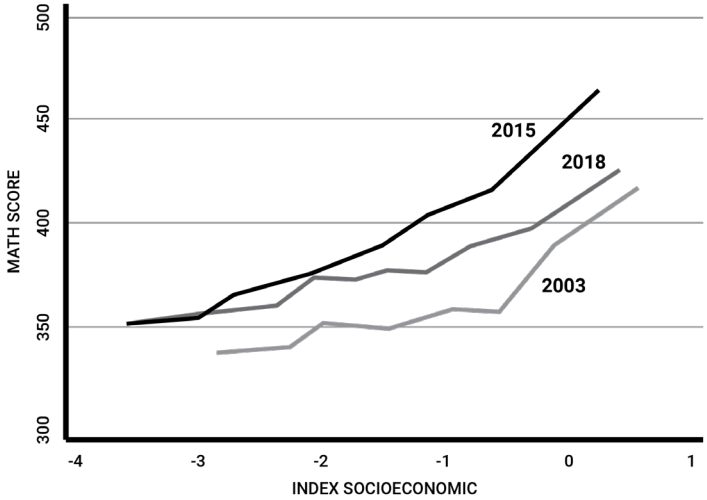

Kajian kami di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) menggunakan data PISA 2015 menunjukkan sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga sejahtera memiliki skor yang lebih tinggi daripada sekolah dengan mayoritas siswa miskin.

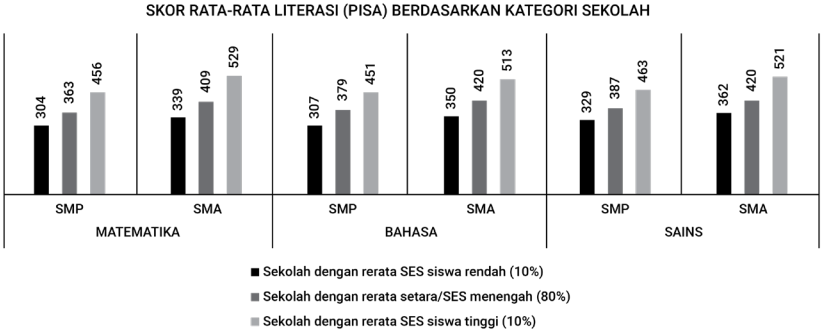

Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah melihat seberapa besar kesenjangan capaian anak-anak kita, yang disebabkan faktor di luar kendalinya, seperti orang tua yang kurang terlibat dan gagal menyiapkan prasarana karena mengalami tambahan tekanan pekerjaan dan keuangan, sekolah dan madrasah swasta yang ketahanannya kurang, guru yang kompetensinya tak setara, serta tidak adanya kebijakan rotasi untuk kelas-kelas yang justru butuh dukungan nyata. Dalam konteks pandemi, kita bukan hanya melihat anak-anak dengan akses teknologi yang tidak memadai, namun di situasi yang tanpa masalah kuota data pun, ratusan ribu satuan pendidikan kesulitan beradaptasi, guru jarang mengirim materi dan minim interaksi, kondisi geografis dan keterbatasan mobilisasi yang lebih sulit lagi di saat ini.

Negara dan kita semua yang bertanggung jawab atas pendidikan, punya kewajiban pada setiap anak. Kita perlu mengintervensi input dan proses pembelajaran, agar sistem pendidikan dapat menghasilkan capaian yang sama baiknya bagi semua anak.

Sebagai prinsip, pemerataan kesempatan pendidikan melekat pada banyak praktik dan kebijakan. Mari mengevaluasi, sekaligus melihat potensi perubahan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan kesempatan pendidikan, sekaligus mendukung pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sejak usia dini hingga perguruan tinggi.

Berbagai bentuk inisiasi perlu dijalankan secara konsisten dan diperbesar skalanya. Di Jaringan Semua Murid Semua Guru, ada lebih dari 700 komunitas dan organisasi pendidikan yang melakukan berbagai praktik baik di ratusan daerah. Beberapa inovasi yang terbukti berdampak antara lain: penyediaan perpustakaan, ak–ses internet, serta sumber belajar di masyarakat yang terjangkau oleh murid, tanpa atau minim biaya, kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan potensi minat dan bakat anak, pelibatan keluarga/orang tua dalam pen–didikan anak secara terstruktur di dalam maupun luar

satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi guru yang mampu menerapkan *differentiated instructions* dan *culturally-responsive pedagogies*, afirmasi untuk sekolah dan madrasah dengan persentase murid miskin yang tinggi agar dapat melakukan intervensi yang relevan dengan demografi murid, kemitraan pemimpin sekolah dengan komunitas untuk memperkaya sumber belajar dan mengatasi hambatan belajar, berbagai program liburan edukatif untuk anak-anak keluarga miskin, bimbingan karier dan kesempatan magang yang relevan untuk murid di sekolah vokasi, maupun mahasiswa, serta layanan untuk anak berkebutuhan khusus yang berkualitas.

Tak ada satu pun data di Indonesia yang menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan sudah tercipta. Percepatan capaian membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, secara khusus adanya umpan balik kepada pemangku kebijakan yang menyebabkan pencapaian tujuan-tujuan jangka panjang, bukan hanya program jangka pendek yang didasarkan pada satu siklus anggaran.

Keadilan yang sesungguhnya, yaitu saat kondisi awal (calon) murid tidak menjadi hambatan mengakses pendidikan berkualitas. Ini masih jauh dari harapan. Untuk mencapai cita-cita bangsa membangun masyarakat yang

produktif dan demokratis, pendidikan yang berkualitas tidak bisa hanya diakses oleh segelintir anak kita. Pengalaman reformasi pendidikan berbagai negara seperti Jepang, Spanyol dan Finlandia menunjukkan, bahwa membuka kesempatan pendidikan yang lebih berkeadilan sosial dapat menghasilkan lulusan di masa depan yang lebih baik.

Wabah menambahkan begitu banyak pekerjaan rumah untuk pendidikan kita. Tekanan sosial dan ekonomi menambah kemiskinan dan pengangguran, serta otomatis menambah jumlah anak yang rentan.

Komitmen pada pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan meyakinkan kita, bahwa bukan waktunya lagi pemerataan dikebelakangkan. Saya dan Anda semua, disadari atau tidak, adalah orang-orang beruntung di ekosistem pendidikan negeri ini. Kita tidak ingin segala subsidi, bimbingan berlebih atau apapun yang kita dan keluarga telah nikmati sebagai dampak dari kurangnya kebijakan afirmasi terhenti terdistribusi pada sasaran utama yang punya kebutuhan tertinggi.

Kegawatdaruratan butuh ribuan pahlawan dari berbagai pemangku kepentingan, yang langkah pertamanya

adalah pemahaman tentang siapa dan apa yang sedang diperjuangkan bagi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan bagi keberlanjutan pembangunan pendidikan.

Governansi Korporat dan Konsep Keberlanjutan

Drs. Mas Achmad Daniri, M.Ec.

Pada saat kita menjalankan bisnis paling tidak ada dua hal yang selalu menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan perusahaan. Pertama, apakah bisnis dimaksud memberi manfaat bukan saja hanya kepada perusahaan tetapi juga kepada pemangku kepentingan. Bisnis perusahaan tumbuh secara berkelanjutan karena mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan.

Kedua, apakah perusahaan sudah mempertimbangkan potensi dampak negatif yang ditimbulkan dari ke–giatan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, setelah merampungkan perencanaan bisnisnya perusahaan hendaknya mengawali kegiatannya, melakukan pemetaan kepentingan stakeholder perusahaan. Pengelolaan bisnis perusahaan mengikuti arah sesuai visi, misi, tata nilai dan strategi serta tujuan perusahaan yang dinyatakan di dalam Rencana Jangka Panjang dan Rencana Tahunan Perusahaan. Dengan demikian secara konsep, pendirian perusahaan mengemban tugas mengelola bisnis secara jangka panjang dan berkelanjutan.

Dasar pendirian suatu perusahaan pada awalnya untuk tujuan merealisasikan keuntungan dengan akronim 3 P (*Profit, Profit, Profit*). Akronim 3 P sampai disebut tiga kali untuk memberikan penekanan semata-mata hanya mencari

keuntungan. Namun dalam perjalanannya 3 P berkembang menjadi *Profit, People* dan *Planet* yang bermakna bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, namun juga sekaligus menyejahterakan para pihak yang terlibat disebut "*People*" dan dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan, sering disebut dengan "*Planet*".

Dalam konsep *Triple Bottom Line* (*Profit, People* dan *Planet*) yang dipopulerkan oleh Elkington (1997) ada 3 (tiga) istilah yang dikenalkan yaitu *economic prosperity, environmental quality,* dan *social justice*. Sehingga, selain mengejar keuntungan (*Profit*) yang merupakan tanggung jawab kepada shareholder untuk menumbuhkan profit secara berkesinambungan, perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*People*), dan pelestarian ling–kungan (*Planet*), dengan selalu mengupayakan dampak positif bagi pemangku kepentingan.

Pemahaman di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah komitmen yang harus terus dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi. ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility*, memaknai Tanggung Jawab Sosial sebagai tanggung jawab untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik; yang dilaksanakan

secara transparan dan beretika, sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dengan memperhatikan semua kepentingan stakeholders, serta mematuhi regulasi dan norma-norma internasional yang berlaku.

CSR dilakukan melalui pendekatan *Triple Bottom Lines* (3P), dengan mengunakan rujukan ISO 26000 sehingga bisa menghasilkan outcome yang berbasis multi-manfaat yang pada akhirnya menciptakan kegiatan CSR yang saling memberi manfaat terhadap semua pemangku kepentingan. Dalam hubungan ini terjadi sinergi antara keunggulan kompetitif dan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep penciptaan manfaat bersama atau *Creating Shared Valued,* disingkat CSV berpotensi dapat menyelesaikan masalah sosial, terutama di negara-negara berkembang, sekaligus meraih hasil komersial. Pendekatan CSV lebih efektif daripada pendekatan CSR tradisional. Ada konsensus umum yang mengadopsi pendekatan CSV menawarkan banyak peluang bisnis justru karena membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. CSV berarti menciptakan peluang, memberi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis sekaligus berbuat baik pada saat yang

bersamaan (Bulcke, Kramer, Soiron, Turpin, & Gonzalez (2014). CSV membuka peluang baru untuk memper–timbangkan masalah sosial dan bahkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing. Tujuan bisnis sebenarnya adalah menciptakan nilai bersama. CSV dapat menjadi peluang bagi semua sektor untuk mendukung masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Governansi Korporat

Governansi korporat dimaknai sebagai suatu pola hubungan sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah dan manfaat bersama kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, minimal dengan mematuhi prosedur internal dan peraturan perundangan yang berlaku. Governansi Perusahaan yang baik dimaknai sebagai struktur dan proses yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran organ perusahaan dan para *stakeholder* lainnya. GCG juga bermakna sebagai mekanisme *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan dengan membangun rambu-rambu untuk menghindari pengelolaan yang salah termasuk penyalahgunaan aset

perusahaan guna memanfaatkan peluang bisnis.

Beberapa aspek penting dalam penerapan GCG, mencakup keseimbangan hubungan antar organ perusahaan, disebut dengan keseimbangan internal dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis kepada *stakeholder* (keseimbangan eksternal). Aspek yang tak kalah pentingnnya adalah hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan, plus perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Governasi korporat juga mengatur tata kerja, mekanisme dan komunikasi RUPS, dekom, dan direksi, mengatur kebijakan, struktur dan mekanisme perusahaan dengan seluruh karyawan. Termasuk juga mengatur kebijakan dan mekanisme interaksi perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Perkembangan ke depan, diskursus mengenai GCG selalu diikuti dengan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi. Governansi korporat, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC mencakup pendekatan organisasi di tiga area ini. Karena keterkaitannya yang erat implementasi governansi korporat, manajemen risiko dan kepatuhan di dalam praktik diintegrasikan dan diselaraskan untuk menghindari konflik, tumpang tindih

dan kesenjangan. GRC biasanya mencakup aktivitas seperti, governansi korporat, manajemen risiko perusahaan (ERM), dan kepatuhan perusahaan terhadap kode etik dan perilaku serta peraturan perundangan yang berlaku. Manajemen hendaknya mengembangkan sistem GRC terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terintegrasi. Implementasi GRC yang terintegrasi merupakan kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Kemampuan mengelola risiko harus dimiliki secara kolektif oleh manajemen dan secara paralel upaya membudayakan kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku serta Pedoman GRC menjadi sangat mendasar.

GRC yang konsisten dan terukur merupakan pilar utama dalam mendukung inisiatif GRC yang berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa kerangka GRC sesuai dengan standar dan praktik bisnis dan peraturan yang berlaku. Perusahaan juga perlu menjaga kepentingan *stakeholder*, kepercayaan pelanggan dan reputasi. Penerapan GRC secara terintegrasi dapat di gunakan untuk memastikan pencapaian target-target bisnis sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Governansi Korporat dan Keberlanjutan

Lameira dan Ness Jr. (2012) menunjukkan beberapa konsekuensi yang mungkin timbul dari praktik governansi yang baik, seperti berkurangnya korupsi, sebagai pengaruh pemerintahan di berbagai negara. Penurunan praktik Korupsi menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemahaman karakteristik pembangunan berkelanjutan, secara ringkas menyerukan untuk membangun masyarakat yang memiliki keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan harus terpenuhi. Integrasi ketiga dimensi ini harus menjadi syarat untuk mencapai keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dengan demikian perusahaan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan saat ini dan masa depan termasuk pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang digunakan dan cara menyeimbangkan tanggung jawab organisasi secara efektif.

Makna dan penerapan pembangunan berkelanjutan dalam konteks bisnis ditentukan dengan cara yang berbeda.

Salah satu pernyataan Bansal (2010) adalah bahwa "penciptaan organisasi yang berkelanjutan melalui sistem ekonomi, sosial dan ekologi yang terintegrasi". Perusahaan dengan perilaku lingkungan yang baik memberi sinyal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas perusahaan yang memiliki kinerja buruk dalam penanggulangan lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan berbagai indikator dan menilai bagaimana perilaku mereka terhadap planet mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Dengan governansi korporat yang baik, tidak diragukan lagi bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya sekedar sesuatu yang tertulis di atas kertas dan merupakan "harapan baik", tetapi jelas sekali bahwa pola pikir para pemimpin bisnis, sudah berubah. Untuk mendapatkan keuntungan bukan lagi satu-satunya prinsip utama dalam mengelola perusahaan. Namun gagasan pembangunan berkelanjutan telah masuk juga dalam misi bisnisnya dan berpotensi untuk memajukan planet menjadi lebih baik, sekaligus juga merupakan jaminan atas keberlanjutan bisnis perusahaan.

Governansi yang baik di perusahaan cenderung menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Aspek-aspek yang berkaitan dengan transparansi atau pengungkapan terbukti memiliki

pengaruh paling kuat terhadap kinerja ekonomi. Melindungi hak pemegang saham memiliki pengaruh paling kecil terhadap kinerja ekonomi. Profil yang sesuai terhadap transaksi pihak berelasi ditemukan memiliki pengaruh terkuat terhadap kinerja lingkungan (Ashok Kumar Sar). Seperti yang juga diungkapkan oleh Nicholas J. Price (2019), governansi yang baik pada akhirnya mendorong keberlanjutan, menciptakan nilai-nilai berkelanjutan, dan membantu menggapai nilai-nilai perusahaan. Perusahaan juga menyadari manfaat jangka panjang dari penerapan GCG, termasuk upaya mengendalikan risiko, mengundang pemegang saham baru, serta meningkatkan nilai saham perusahaan.

Sudah banyak perusahaan meyakini bahwa berfokus pada keberlanjutan adalah cara untuk meningkatkan laba dan memenangkan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Kini strategi keberlanjutan perusahaan tidak hanya sebatas menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam perusahaan, tetapi lebih dari itu menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari DNA perusahaan. Dengan demikian kebutuhan untuk membangun rambu-rambu governansi yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sudah menjadi kebijakan perusahaan, sebagai suatu cara untuk memastikan konsep keberlanjutan menjadi DNA perusahaan.

Ketika Kapitalis Mengulurkan Tangan

Riki Frindos
Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI

Kita tengah melewati sebuah periode yang bakal tercatat dengan huruf tebal dalam sejarah dunia hingga ratusan tahun di masa yang akan datang. 'A Crisis Like No Other', menurut IMF, menyikapi krisis kesehatan dan ekonomi yang luar biasa ini.

Ada kekhawatiran, ketika dunia berfokus menghadapi krisis karena Covid-19 ini, isu-isu lingkungan dan keberlanjutan lainnya akan terpinggirkan. Tapi sepertinya tidak, warga dunia justru terlihat menarik pembelajaran yang berharga, meski pahit, untuk meneguhkan komitmen pada agenda-agenda keberlanjutan.

Pembelajaran yang pertama adalah, jangan coba-coba melintasi batas dalam mengeksploitasi dan mengintervensi kapasitas dan keseimbangan alam sebagai fondasi dasar bagi kehidupan manusia. Jangan melintasi batas dalam menginfiltrasi kehidupan alam liar sebagai bagian dari keseimbangan kehidupan di planet bumi. Tidak hanya akan meruntuhkan daya dukung alam bagi kehidupan manusia, tetapi juga meruntuhkan benteng-benteng yang melindungi kita dari berbagai mikroorganisme yang dapat mematikan, seperti virus covid 19 ini.

Yang kedua, ibarat film bioskop, pandemi corona adalah

sebuah *teaser*, sebuah cuplikan 2-3 menit mengenai bencana yang dapat menimpa kita di masa yang akan datang. Namun, pertunjukan penuh 90 menit kelak akan hadir di depan kita, jika kita tidak berbuat sesuatu. Jika kita tidak mengubah gaya hidup kita, proses produksi, pola konsumsi, strategi investasi yang mengindahkan aspek-aspek keberlanjutan Planet Bumi.

Namun, krisis Covid-19 juga menghadirkan *teaser* tentang surga kehidupan di dunia yang menanti jika kita berhenti berbuat dosa pada alam dan segenap makhluk ciptaan Tuhan. *Lockdown* yang sempat diterapkan di Jakarta tentu bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Tapi, sekonyong-konyong langit Jakarta bersinar biru bening, sejernih udara segar yang kita hirup. Tiba-tiba, di jalanan Jakarta kita mendengar kicauan burung, gemercik suara air, yang selama ini tenggelam entah kemana di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Kita ternyata punya pilihan: *a better and beautiful world to live in*.

Sangat menarik juga mengamati bagaimana respon dari investor di pasar modal dunia, yang selama ini sering dipersepsikan sebagai sarangnya kapitalis yang semata-mata berorientasi keuntungan finansial. Kuartal pertama tahun 2020 ini ditandai dengan anjloknya bursa saham di

berbagai belahan dunia yang memicu kaburnya dana-dana dari berbagai produk investasi.

Namun, produk-produk investasi berbasis *sustainability* atau *ESG* (*Environmental, Social, and Governance*) justru menunjukkan tren yang sebaliknya. Menurut laporan UBS *Asset Management*, dana terus mengalir berinvestasi pada produk-produk investasi ESG. Bahkan, di AS produk investasi ESG mencatat rekor *inflow* pada kuartal pertama 2020.

Hal yang serupa terjadi juga di Indonesia. Dana keluar dari berbagai reksadana saham sepanjang paruh pertama 2020 menyikapi gejolak di Bursa Efek Indonesia. Namun selama periode tersebut reksadana yang mengacu pada Indeks SRI KEHATI (indeks saham ESG Indonesia) justru tetap tumbuh dan mencatat rekor baru dalam hal dana kelolaan.

Melejitnya popularitas investasi berkelanjutan atau ESG di pasar modal memang cukup fenomenal. ESG merupakan segmen investasi yang tumbuh paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan riset Opimas mengungkapkan bahwa total dana kelolaan berbasis ESG mencapai US$40 triliun pada tahun 2020 ini, atau tumbuh

dua kali lipat dalam empat tahun terakhir, dan tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir.

AS seringkali dianggap relatif tertinggal dibanding Eropa dalam hal investasi berkelanjutan. Namun, dengan pertumbuhan yang sangat pesat saat ini, perusahaan konsultan Deloitte memperkirakan separuh dari dana kelolaan investasi di pasar modal AS akan berbasis ESG dalam lima tahun ke depan.

Di Indonesia, investasi berkelanjutan masih dalam fase yang sangat awal. Meskipun Yayasan KEHATI telah merintis pada tahun 2009 dengan meluncurkan indeks saham ESG pertama di Asia Tenggara, yaitu Indeks SRI KEHATI, namun respons pasar sangat minim. Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir terlihat pertumbuhan yang cukup menggembirakan seiring dengan upaya-upaya aktif yang dilakukan KEHATI.

Saat ini, melihat pada data Juni 2020, total dana kelolaan reksadana ESG yang mengacu pada indeks SRI KEHATI telah melebihi Rp 2 triliun, atau naik hampir 10 kali lipat dibandingkan tahun 2017 yang baru mencapai Rp 250 miliar. Namun, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total dana kelolaan industri reksadana di Indonesia.

Maraknya pertumbuhan investasi berkelanjutan atau ESG di pasar modal global mengindikasikan bahwa keberlanjutan bukan lagi dianggap isu pinggiran yang menjadi fokus akademisi atau penggiat lingkungan dan sosial saja. Isu-isu keberlanjutan secara bertahap bergerak menjadi bagian terintegrasi dari kebijakan pembangunan serta strategi bisnis dan investasi.

Dalam komunitas investasi, sekian lama aspek lingkungan dan sosial dipandang sebagai ekses dari aktivitas bisnis atau keputusan investasi. Oleh karena itu, tindakan korporasi dan investor berfokus dalam menanggulangi dampak atau eksternalitas negatif tersebut. Seringkali, upaya-upaya dalam mengelola isu lingkungan dan sosial ini dianggap sebagai sebuah beban atau biaya tambahan, yang dapat berimplikasi negatif terhadap kinerja perusahaan atau kinerja portofolio investasi.

Namun saat ini berkembang paradigma baru. Penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya dalam rangka mengelola dampak negatif dari keputusan investasi terhadap lingkungan dan komunitas, tetapi juga sebaliknya. Pengelolaan isu-isu lingkungan sosial dan lingkungan justru untuk mengoptimalkan kinerja portfolio investasi. Sebab, jika aspek keberlanjutan tidak dikelola dengan baik

maka perusahaan akan terpapar pada risiko lingkungan dan sosial, atau tidak dapat mengambil kesempatan yang muncul terkait isu dan tren lingkungan dan sosial.

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan tidak mengelola isu perubahan iklim, maka perusahaan tersebut dapat terpapar pada risiko pajak karbon atau naiknya harga karbon di masa yang akan datang. Atau, contoh lain, bagi perusahaan yang bergerak di bidang consumer good, memastikan dan mendukung penerapan sertifikasi organik, sertifikasi fair trade, atau sertifikasi berkelanjutan oleh supplier yang masuk dalam supply chain, akan memperluas akses pasar, memberikan nilai tambah pada produk, dan sekaligus mengoptimalkan kinerja portfolio bisnis mereka.

Oleh karena itu, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial merupakan sebuah keniscayaan bagi pemilik aset atau manajer investasi di pasar modal. Justru, manajer investasi dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik jika tidak mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam proses keputusan investasi mereka.

Jika selama ini para manajer investasi lebih berfokus pada "*impact of portfolio*" yang mereka kelola pada lingkungan

dan masyarakat, saat ini mereka juga harus memahami "*impact on portfolio*", bagaimana isu-isu sosial dan ling–kungan mempengaruhi kinerja portofolio mereka.

Dalam kata lain, manajer investasi tidak hanya harus bertanggung jawab pada lingkungan dan masyarakat, dengan tidak memberikan beban eksternalitas negatif. Tetapi, manajer investasi juga bertanggung jawab pada pemilik dana mereka, dengan mengelola risiko dan peluang terkait aspek lingkungan dan sosial.

Dalam konteks manajemen investasi, mengadopsi ESG adalah sebuah keniscayaan dari *fiduciary duty*. UN-PRI (The United Nations–Principle for Responsible Investment), sebagai lembaga terdepan dalam mendorong investasi berkelanjutan, dalam laporan yang berjudul '*Fiduciary duty in the 21st century*', dengan tegas mengatakan: "*Failing to consider long-term investment value drivers–which include environmental, social and governance issues–in investment practice is a failure of fiduciary duty*".

Pandangan ini didukung berbagai studi empiris, yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) memang material bagi kinerja perusahaan, bagi kinerja portofolio investasi para investor. Studi dari

Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) merupakan sebuah contoh metastudi yang paling intensif terkait ESG. Mereka mengkaji 2200 riset terkait korelasi antara ESG dengan kinerja keuangan perusahaan dan portofolio investasi, yang menyimpulkan adanya hubungan positif yang kuat.

Berbagai data empiris belakangan ini juga makin mendukung hal tersebut. Di Indonesia sendiri, misalnya, Indeks SRI KEHATI sebagai satu-satunya indeks saham ESG di pasar modal Indonesia menunjukkan kinerja lebih baik dari kinerja pasar secara keseluruhan. Sejak peluncurannya tahun 2009 yang lalu, Indeks SRI KEHATI mencatat kenaikan 169%, lebih tinggi dari kenaikan Indeks LQ45 yang meningkat sebesar 92% dalam periode tersebut.

Krisis pasar terkait pandemi tahun ini kembali menunjukkan bahwa produk investasi dan indeks berbasis ESG sebagian besar memiliki kinerja lebih baik. Sebagai contoh, pada 6 bulan pertama 2020, empat indeks saham MSCI World yang berbasis ESG semuanya mencatat kinerja lebih baik dalam rentang 0.69% - 1.73% dibandingkan indeks MSCI World. Hal serupa terlihat di pasar Indonesia, selama 6 bulan pertama tahun 2020 Indeks SRI KEHATI juga

mencatat kinerja lebih baik dari indeks yang sepantar, yaitu 1% dan 2% lebih baik dari Indeks LQ45 dan indeks IDX30.

Selain pesatnya pertumbuhan investasi ESG yang bertanggung jawab, terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap pemilik dana, sebagian investor bergerak lebih jauh dalam konteks keberlanjutan. Sebagian investor dan manajer investasi tidak hanya ingin sekedar bertanggung jawab dengan menghindari dampak negatif sosial dan lingkungan (*doing no harm*), tetapi juga secara spesifik mentargetkan investasi mereka untuk menghasilkan dampak positif sosial dan lingkungan (*doing good*). Tentu, dengan tetap mengharapkan keuntungan finansial. Strategi investasi ini lebih dikenal sebagai *impact investment*.

Impact investing biasanya dilakukan pada perusahaan berskala relatif lebih kecil, termasuk *startup*, yang belum tercatat di bursa efek. Karena untuk perusahaan publik dan sudah *established* lebih sulit bagi pemodal, yang biasanya terfragmentasi, untuk secara spesifik mempengaruhi manajemen untuk mentargetkan dampak lingkungan sosial yang spesifik.

Berdasarkan data *GIIN (Global Impact Investing Network)*, total dana kelolaan *impact investment* di seluruh dunia

pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar US$715 miliar. Angka ini naik drastis dibandingkan US$502 miliar dan US$220 miliar pada tahun 2018 dan 2017. Di Indonesia, *impact investment* juga mulai mendapat perhatian luas dari berbagai investor, mulai dari *venture capital, angel investor,* maupun *philanthropist investors*.

***

Isu-isu keberlanjutan, perlahan namun pasti, tidak lagi sekedar menjadi perhatian akademisi atau aktivis lingkungan, tetapi menjadi bagian terintegrasi dari gaya hidup warga dunia, termasuk pelaku ekonomi. Tujuan pembangunan berkelanjutan, misalnya, telah diadopsi secara resmi dan menjadi komitmen semua negara.

Demikian juga halnya dengan investor di pasar modal, yang sering dipersepsikan sebagai kapitalis yang berdiri berseberangan dengan para penggiat lingkungan. Kini banyak dari mereka mengulurkan tangan untuk berdiri berdampingan dan berjalan beriringan. Bahkan, pada banyak situasi para kapitalis ini berdiri jauh di depan dan berlari lebih cepat dalam mendorong isu-isu keberlanjutan. Sebab, keberlanjutan planet bumi tidak hanya berarti keberlanjutan bagi anak cucu mereka di masa yang akan

datang, tetapi juga keberlanjutan bagi investasi mereka.

Singkat kata, visi dan mimpi yang diperjuangkan Prof. Emil Salim, pendiri Yayasan KEHATI dan Bapak Lingkungan Hidup Indonesia, selama lebih tiga dekade sepertinya pelan-pelan mulai menjelma nyata. Visi yang Beliau kumandangkan baik di Indonesia maupun di kancah global, baik melalui jalan akademik dan ilmu pengetahuan, jalur birokrasi dan politik, ataupun melalui gerakan masyarakat madani.

Bahwa, kepentingan kepentingan ekologi dan ekonomi tidak mesti berkompetisi, namun harus dan memang seyogyanya berjalan beriringan, bergandeng tangan. Bahwa, keuntungan finansial bagi pebisnis dan investor tidak akan berkelanjutan jika aspek sosial dan lingkungan dipinggirkan. Bahwa, pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, adalah pembangunan yang inklusif bagi semua, pembangunan yang mensejahterakan manusia kini tanpa merenggut hak-hak generasi nanti.

Namun harapan agar Pak Emil dapat tersenyum lega di usia Beliau yang ke 90 ini, sepertinya belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Beliau nampaknya tidak dapat menutupi kegelisahannya. Meskipun keberlanjutan kini semakin

menjadi *mainstream* bagi pengambil kebijakan dan investor di ranah global, tanda tanya masih cukup besar mengenai aspirasi dan komitmen negeri kita sendiri.

Jika kita memilih tetap berjalan di tempat atau bahkan mundur atas nama kepentingan ekonomi jangka pendek dan oportunistik, maka tidak hanya Indonesia mengorbankan masa depan generasi mendatang, tetapi juga akan terisolasi dari dunia yang terus bergerak maju, menuju peradaban yang berkelanjutan, yang merupakan sebuah keniscayaan bagi planet bumi dan segenap penghuninya.

Yayasan KEHATI
Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang
Jakarta 12720
www.kehati.or.id

ISBN 978-623-7041-03-0